

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KAWASAN KOTA TAKENGON TAHUN 2016 - 2017**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**IMBAR SURIANTO**

**NIM. 501482963**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Implementasi Pengelolaan Sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017  
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Takengon, 2018

Yang menyatakan



IMBAR SURIANTO  
NIM. 501482963

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN KOTA TAKENGON TAHUN 2016-2017

Imbar Suario  
[azkabios@gmail.com](mailto:azkabios@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Sampah merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia. Pasar dan kawasan publik sampah yang menumpuk dan berbau seakan menjadi hal lumrah dan sangat sering ditemui, masalah sampah tersebut menjadi sangat kompleks terkait dengan pengelolaannya. Produksi sampah di kawasan Kota Takengon menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tengah perlu bekerja keras untuk mengatasi dan menagani permasalahan sampah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sebuah kebijakan atau program menurut Anderson dapat dikaji melalui aspek-aspek implementasi yaitu siapa yang mengimplementasikan, Hakikat dari proses administrasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor penentu pelaksanaan kebijakan atau program ini dapat dilihat melalui teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Melalui metode penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung serta menghambat pelaksanaan program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPA berjalan dengan cukup baik namun untuk Pengelolaan sampah melalui konsep tiga R (3R), yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycling*, belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program ini adalah disposisi yaitu respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana, sedangkan yang menjadi penghambat adalah faktor komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Untuk itu diperlukan penerapan konsep tiga R (3R) tersebut di seluruh kawasan Kota Takengon, melakukan sosialisasi secara intensif, didukung dengan regulasi yang lebih besar dan kuat, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

**Kata Kunci :** *Implementasi kebijakan atau program, pengelolaan sampah, konsep tiga R (3R)*

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT PROGRAM IN  
TAKENONG TOWN AREA YEAR 2016-2017**

Imbar Surianto  
[azkabios@gmail.com](mailto:azkabios@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

Garbage is a fundamental problem faced by cities in Indonesia. Market and public areas, garbage that accumulates and smell as if it is a normal thing and is very often encountered, the garbage problem becomes very complex related to its management. Waste production in the Takengon City area causes the Central Aceh District Environmental Service to work hard to overcome and manage the waste problem. To find out how the implementation of a policy or program according to Anderson can be assessed through the implementation aspects namely who implements, administrative process, compliance and the impact of policy implementation. Then to find out the determinants of the implementation of this policy or program can be seen through the theory by Edward III that is communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Through qualitative research methods, researchers want to know how the implementation and factors that support and inhibit the implementation of waste management programs in Takengon City 2016-2017. From the results of the research, the implementation of waste management starts from the collection, transportation and processing of waste in the landfill which runs quite well but for waste management through the three R (3R) concept, namely Reduce, Reuse, and Recycling, cannot be fully implemented. Furthermore, the supporting factors for the implementation of this program are dispositions which are the responses shown by the implementing apparatus, while the obstacles are communication, resources and bureaucratic structures. For this reason, it is necessary to apply the three concepts of R (3R) throughout the Takengon City area and need to be supported by larger and stronger regulations and adequate facilities and infrastructure.

**Key Word :** *Implementation of policies or programs, waste management, the concept of three R (3R)*

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama/NIM : IMBAR SURIANTO  
NIM : 501482963  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul TAPM : Implementasi Program pengelolaan sampah di Kawasan  
Kota Takengon Tahun 2016-2017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

W a k t u : 13.30 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Dr. TITA ROSITA, M.Pd

Penguji Ahli

Prof. Dr. ENDANG WIRJATMI TL, M.Si

Pembimbing I

Dr. H. RASYIDIN, S.Sos, MA

Pembimbing II

Dr. TUSWOYO, M.Si



Handwritten signatures of the exam committee members, including the Chairman and the two examiners, positioned to the right of their respective names.

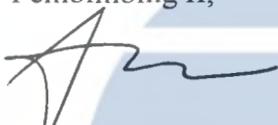
## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Program pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017

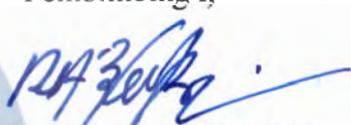
Penyusun TAPM : IMBAR SURIANTO  
 NIM : 501482963  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik – S2 (Reguler)  
 Hari/Tanggal : Sabtu/21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

  
 Dr. TUSWOYO, M.Si  
 NIP. 19620808 198910 1 001

Pembimbing I,

  
 Dr. H. RASYIDIN, S.Sos, MA  
 NIP. 19610506 200112 1 001

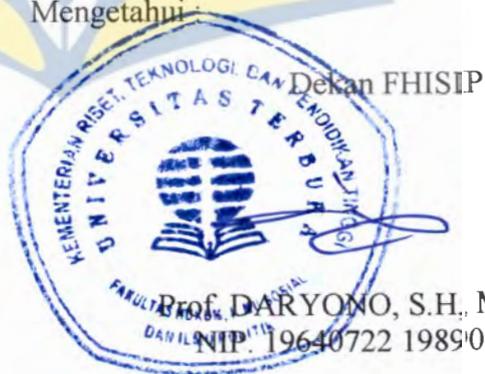
Penguji Ahli :

  
 Prof. Dr. ENDANG WIRJATMI TL, M.Si  
 NIP. 19541014 198103 2 001

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum Sosial  
 dan Ilmu Politik

  
 Dr. DARMANTO, M.Ed  
 NIP. 19591027 198603 1 003



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan shalawat beriring salam kepada sang pencerah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan ahli sahabat, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafa'at beliau.

Sejalan dengan itu peneliti sangat bersyukur dan berterimakasih telah dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Pengelolaan Sampah di Kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017”**. Tanpa rahmat dan karuniaNya serta bantuan dari semua pihak peneliti tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D, Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
3. Bapak, Dr. Darmanto, M.Ed., Ketua Pascasarjana Hukum Sosial dan Politik Universitas Terbuka;
4. Ibu Dr. Lula Nadia, M.A., M.Si., Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh;
5. Bapak DR. H. Rasyidin, S.Sos, MA selaku Dosen dan Pembimbing I Universitas Terbuka;
6. Bapak Dr. Drs. Tuswoyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing II Universitas Terbuka;

7. Tim Pengelola Pascasarjana Program Studi MAP beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis mengikuti pendidikan;
8. Bapak DR. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si, M.Pd dan Ibu DR. Cut Hairani, M.Si selaku Dosen serta Dosen-dosen Tutor Universitas Terbuka;
9. Kedua Orang Tua (Alm. Ayahanda Wandak dan Ibunda Surati) yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan segalanya serta Mertuaku (Alm. Bapak Murnianto dan Alm. Ibu Suparni);
10. Isteri tercinta (Farida Ariani) dan Anak-anak ku terkasih (Azka Naufal As Shidqie dan Feizya Ramadhanindita) kalian adalah motivasiku yang sesungguhnya;
11. Bapak Ir. Zikriadi, MM, Bapak Ihsan, SE dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;
12. Kakanda Lahat dan Ivan Ibrahim, Saudara Il aqa, Fadli dan Mude Angkasa sebagai sahabat se-bimbingan serta rekan-rekan se-angkatan UPBJJ-UT Banda Aceh di Takengon dan teman-teman Tutor Universitas Terbuka;
13. Bapak Khairil Ajhar, S.Pd, SH, MH, terima kasih atas izin dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini; dan
14. Pihak-pihak lain serta informan yang berperan membantu dalam kegiatan penelitian baik dilapangan maupun dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

Dalam penulisan penelitian ini peneliti yakin masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

Di akhir ucapan, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat menjadi amal bagi peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Takengon,

2018

Peneliti



IMBAR SURIANTO  
NIM: 501482963



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : IMBAR SURIANTO  
NIM : 501482963  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Tempat/Tanggal Lahir : Burni Bius, 07 April 1981

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Burni Bius pada Tahun 1994  
Lulus SLTP di SMPS Wihni Bakong pada Tahun 1997  
Lulus SMK di SMKN 1 Jeumpa pada Tahun 2000  
Lulus S1 di Universitas Gajah Putih pada Tahun 2014

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2005 s/d 2017 sebagai Staf di Bagian Umum  
Setdakab Aceh Tengah  
Tahun 2017 s/d Sekarang sebagai Kasubbag Umum dan  
Kerjasama di Sekretariat DPK Korpri Aceh Tengah

Takengon,

2018



IMBAR SURIANTO  
NIM. 501482963

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Pernyataan .....	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji TAPM .....	iv
Lembar Persetujuan TAPM .....	v
Riwayat Hidup .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Berfikir .....	28
D. Operasionalisasi Konsep .....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	38
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan .....	38
C. Instrumen Penelitian .....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	45
B. Hasil .....	51
C. Pembahasan .....	104
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	116

DAFTAR PUSTAKA ..... 119



**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 2.1 Model Keseuaian Implementasi Program Korten .....	11
Bagan 2.2 Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III .....	17
Bagan 2.3 Sistem Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan (Sampah) .....	24
Bagan 2.4 Model Penelitian Implementasi program Pengelolaan Sampah di Kawasan Kota Takengon .....	35
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah .....	50



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Cakupan Pelayanan Area Sampah di Kawasan Kota Takengon.....	3
Tabel 1.2 Estimasi Jumlah Sampah di Kawasan Kota Takengon.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep.....	36
Tabel 4.1 Jumlah Kampung dan Luas Wilayah di Kawasan Kota Takengon..	45
Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk di Kawasan Kota Takengon .....	46
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai DLH berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	48
Tabel 4.4 Sarana dan prasarana perkantoran DLH .....	48
Tabel 4.5 Tata Letak TPS / Kontainer di Kawasan Kota Takengon.....	51
Tabel 4.6 Persentase Volume Sampah di Kawasan Kota Takengon .....	58
Tabel 4.7 Jumlah Timbunan Sampah di Kawasan Kota Takengon .....	62
Tabel 4.8 Jumlah Personil Angkutan Sampah .....	83
Tabel 4.9 Armada dan Jumlah Tenaga Pengangkut Sampah.....	84
Tabel 4.10 Personil di TPA Uwer Tetemi.....	85
Tabel 4.11 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan...	87
Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan.....	87
Tabel 4.13 Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan / Persampahan.....	92
Tabel 4.14 Alat Berat pada TPA Uwer Tetemi.....	95
Tabel 4.15 Luas TPA Uwer Tetemi.....	96



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	121
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	128
Lampiran 3 Dokumentasi.....	151



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Sampah dalam keseharian masyarakat di kawasan perkotaan adalah masalah umum yang terjadi di Indonesia bahkan di belahan dunia lainnya. di berbagai berbagai tempat di kota-kota seperti pasar dan kawasan publik sampah yang menumpuk ataupun tidak terkumpul dan berbau seakan menjadi hal lumrah dan sangat sering ditemui, permasalahan sampah di kawasan perkotaan disebabkan beberapa hal yang saling terkait, yaitu padatnya penduduk dibandingkan pedesaan, kegiatan perekonomian, pola konsumsi masyarakat kota, aktivitas perkotaan, perilaku masyarakat, banyaknya bangunan perkotaan serta masalah perkotaan lainnya. Semua hiruk-pikuk tersebut saling berhubungan sehingga mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang dihasilkan dan berpengaruh juga terhadap lingkungan perkotaan yang signifikan. Maka dari itu sampah merupakan satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

Masalah sampah tersebut menjadi sangat kompleks terkait dengan pengelolaannya, karena dari segi kuantitasnya dapat dipastikan akan terus meningkat, semakin banyak dan semakin bervariasi. Keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum, dampak aktivitas perekonomian dan tingginya aktivitas potensial lainnya yang mengakibatkan banyaknya sampah. Sampah memang tidak ada yang menginginkannya tetapi setiap orang dan makhluk hidup lainnya pastinya menghasilkan sampah dari proses pemenuhan kebutuhan hidup, tentunya banyaknya sampah dapat menimbulkan pencemaran apabila daya asimilasi alam tidak mampu lagi menggerusnya. Selain itu sampah erat kaitannya dengan

kesehatan masyarakat karena dari sampah bermula tumbuhnya organisme penyebab penyakit baik secara langsung maupun tak langsung, Penyakit-penyakit tersebut seperti diare, *dengue haemorrhagic fever* sampai *typhus abdominalis*. Selain itu, dari segi estetika sampah akan menjadi hal paling menakutkan yang merusak pemandangan dan akan menimbulkan bau yang tak sedap apabila tidak segera ditangani dengan baik yaitu dengan cara dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dikelola.

Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Takengon. Kota Takengon merupakan Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten ini menjadi salah satu Kabupaten sebagai destinasi wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang dituntut kelestarian lingkungan dan kebersihannya sebagai salah satu penunjang daerah tujuan wisata, perkembangan kawasan perkotaan Takengon dewasa ini begitu pesat, dibukanya jalan alternatif perkotaan seperti jalan Sukarno – Hatta atau jalan dua jalur, pengoperasian terminal bus dan pasar Paya Ilang dan berbagai kawasan sudut kota lainnya menyebabkan banyaknya penduduk yang mendirikan bangunan baik rumah pribadi maupun pertokoan di kawasan-kawasan tersebut menjadi indikator bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal dan bermukim di perkotaan, meningkatnya jumlah penduduk ini memicu meningkatnya geliat perekonomian, ditambah lagi sebagai daerah tujuan wisata sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah ini akan memicu meningkatnya produksi sampah, mulai rumah tangga, pertokoan, instansi pemerintah, pasar dan sarana publik lainnya. Banyaknya produksi sampah di Kota Takengon menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tengah perlu bekerja keras

untuk mengatasi dan menangani permasalahan sampah tersebut, petugas atau bahkan Bapak Kepala Dinas dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat, sering kali membersihkan saluran air atau *drainase* yang tersumbat dikarenakan banyaknya sampah yang tersebar dan menyebabkan banjir serta genangan air di jalan-jalan berpenduduk ramai sekitar kawasan Kota Takengon.

Cakupan pelayanan area sampah di kawasan Kota Takengon menurut data dari DLH Kabupaten Aceh Tengah meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bebesen, Kebayakan, Lut Tawar dan Pegasing, berdasarkan luas pelayanan sebesar 92,34 Km<sup>2</sup>, terbagi pada 4 Kecamatan dimaksud, dengan rincian persentase cakupan setiap Kampung di masing-masing Kecamatan, seperti pada Tabel 1.1. berikut ini :

**Tabel 1.1.**  
**Cakupan Pelayanan Area Sampah di Kawasan Kota Takengon**

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah Kampung Terlayani	Persentase Kampung Terlayani (%)	Luas Area Total (Km <sup>2</sup> )	Luas Area Terlayani (Km <sup>2</sup> )
1.	Bebesen	33	15	45,45	29,57	13,44
2.	Kebayakan	23	5	21,74	54,83	11,92
3.	Lut Tawar	28	9	32,14	87,59	28,15
4.	Pegasing	35	5	14,29	271,78	38,83
	Jumlah	119	34	28,41	443,76	92,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dengan demikian persentase total cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon, dengan luas total wilayah 443,76 Km<sup>2</sup>, cakupan area sampah 92,34 Km<sup>2</sup> atau dengan persentase kampung terlayani sebesar 28,41 %.

Lebih dari itu dalam kurun waktu tahun 2016, sampah yang dihasilkan dari penduduk di kawasan Kota Takengon menurut data dari DLH Kabupaten Aceh Tengah dari area terlayani sebanyak 4 Kecamatan yang meliputi rata-rata sampah dari rumah tangga, pertokoan, industri, hotel dan sampah-sampah lainnya, seperti yang tergambar dalam Tabel 1.2. berikut ini :

**Tabel 1.2.**  
**Estimasi Jumlah Sampah di Kawasan Kota Takengon Tahun 2016**

No.	Jumlah Rata-rata Sampah / Angkutan (Kg)	Jumlah Rata-rata Angkutan Sampah / Hari (Kali)	Jumlah Sampah / Hari (Kg)	Jumlah Hari dalam 1 Tahun	Jumlah Total Sampah / Tahun (Kg)
1.	2.513	19	47.747	365	17.427.655

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Sedangkan untuk estimasi jumlah timbulan sampah tahun 2017 berdasarkan SNI Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, prediksi produksi sampah rumah permanen di kota kecil sebesar 2,5 liter per orang/hari. Apabila jumlah penduduk kawasan Kota Takengon diestimasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 adalah 101.468 jiwa, maka jumlah volume sampah mencapai 253.670 liter/hari atau apabila dirata-ratakan 1 liter = 0,5 kg, maka jumlah sampah rata-rata sebesar 50.734 kg/hari, dikalikan jumlah hari dalam setahun yaitu 365 hari, maka jumlah sampah tahun 2017 adalah 18.517.910 kg atau 18.517,91 ton. Tentunya jumlah timbulan sampah ini akan bertambah setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Sebelum Tahun 2016 Kabupaten Aceh Tengah memiliki TPA di kawasan Bur lintang Kecamatan Pegasing, dikarenakan kawasan tersebut sudah tidak memadai baik dari segi penampungan ataupun dari kajian dampak lingkungan, sehingga sejak Tahun 2016, TPA dialihkan ke kawasan Uwer Tetemi Kecamatan Silih Nara, melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tertanggal 3 Mei 2016, yang sebelumnya sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar pada saat itu, namun dengan pendekatan yang preventif yang dilakukan pihak-pihak terkait, akhirnya diperoleh kesepakatan dengan masyarakat di sekitar kawasan TPA tersebut. Pengelolaan sampah di kawasan TPA belum dilakukan secara maksimal, untuk saat ini dilakukan penimbunan atau *sanitary landfill* terhadap sampah-sampah yang masuk ke TPA, sehingga apabila tidak dilakukan tindakan pengurangan timbulan sampah yang diangkut ke TPA, dikhawatirkan suatu saat akan terjadi kelebihan muatan dan mencemari udara serta air tanah yang berdampak pada kualitas kesehatan penduduk sekitar TPA.

Selain itu masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, antara lain, minimnya kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya, seringkali petugas tidak mengambil sampah rumah tangga yang membayar retribusi secara rutin dikarenakan jam kerja petugas yang memang memerlukan hari libur. Kurangnya peralatan, perlengkapan, fasilitas persampahan seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah, TPS dan fasilitas pendukung pengelolaan sampah di TPA yang mungkin dikarenakan kurangnya dukungan dana pengadaan dan atau pemeliharaan, menjadi masalah klasik yang harus ditanggulangi. Belum adanya Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) menjadi masalah tersendiri, sehingga sampah-sampah yang

dihasilkan dari kawasan kota Takengon di TPS langsung diangkut ke TPA tanpa adanya pemilahan jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang atau yang masih bernilai ekonomi. Saat ini hanya segelintir pemulung yang mau melakukan pemilahan di TPS yang ada, itupun dilakukan hanya sebentar yaitu diwaktu menjelang malam sebelum sampah-sampah tersebut diangkut ke TPA.

Minimnya fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah ini masih menjadi hambatan utama pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon. Adapun petugas dan fasilitas berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang dimiliki DLH Kabupaten Aceh Tengah,

Disamping masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memerlukan peran aktif serta tanggung jawab pihak terkait seperti pihak swasta, orang pribadi dan masyarakat terhadap pengolahan sampah di kawasan Kota Takengon.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara ilmiah dengan judul **Implementasi Program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan *Problem Statement* sebagai berikut: "Program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017 belum maksimal dan efektif, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah, memenuhi harapan yang diinginkan". Dari *Problem Statement* ini, peneliti mengemukakan *research question* sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat antara lain :

#### **1. Kegunaan akademik**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu.

#### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan program atau kebijakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Implementasi program

Berdasarkan pernyataan dari Edward dalam Winarno (2014: 147) “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”. Sedangkan Lester dan Stewart dalam Winarno (2014: 147) berpendapat bahwa “Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome)”.

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan atau kegiatan (tanpa tindakan atau kegiatan) oleh aktor-aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Udoji dalam Solichin (2016: 126) memberikan pandangannya mengenai pentingnya implementasi kebijakan atau program sebagai berikut :

*“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print file jakets unless they are implemented.”* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010  
“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan  
(P2KP) di Kota Gorontalo”, Asna Aneta menyampaikan bahwa:

“Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan itu tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.”

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan tentang asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28) ada tiga pilar kegiatan dalam mengoperasikan program yakni :

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas dibutuhkan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Para penyelenggara harus dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

c. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Haedar Akib dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun. 2010 "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana" menyampaikan :

"Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai."

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
**Model Keseuaian Implementasi Program Korten**



Sumber : Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12) menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau

tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan atau program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan atau program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Sementara, untuk mengukur bagaimana implementasi kebijakan atau program, Anderson (1979: 68) mengemukakan ada 4 aspek yang perlu dikaji, yakni :

- a. Siapa yang mengimplementasikan;
- b. Hakikat dari proses administrasi;
- c. Kepatuhan; dan
- d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Dampak dari implementasi suatu kebijakan atau program dapat diukur dari sejauh mana kepatuhan terhadap penerapan kebijakan atau program dan apa yang terjadi akibat penerapan kebijakan atau program tersebut. Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementator jatuh terhadap prosedur atau standard aturan yang ditetapkan. Sementara untuk apa yang terjadi

mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, peneliti mengambil indikator-indikator yang disampaikan oleh Anderson untuk menjelaskan proses implementasi program pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon. Hal ini dikarenakan keempat indikator yang disampaikan Anderson (siapa yang mengimplementasikan, hakikat dari proses administrasi, kepatuhan, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan atau program) dipandang paling sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Kemudian untuk mengetahui faktor penentu implementasi menurut Edward III dalam Subarsono (2015: 90-92), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi. (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dari empat variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi

tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media.

#### b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Edward dalam Winarno (2014: 184-196) juga mengatakan bahwa Sumber-sumber dimaksud adalah staf, informasi dan wewenang.

Staf. Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Informasi. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, (1) informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya.

Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. (2) data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

**Wewenang.** Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat, namun sering sekali terjadi suatu badan yang mempunyai wewenang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

**Fasilitas.** Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan pernah berhasil.

#### c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka yang bersangkutan juga akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dicita-citakan oleh pembuat kebijakan.

Pada saat implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan dapat berjalan kurang baik dan tidak efektif.

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia ketiga atau negara berkembang menunjukkan bahwa komitmen dan kejujuran aparat pelaksana sangat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul seperti di Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat pelaksana dalam implementasi program-program pembangunan.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi itu sendiri. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

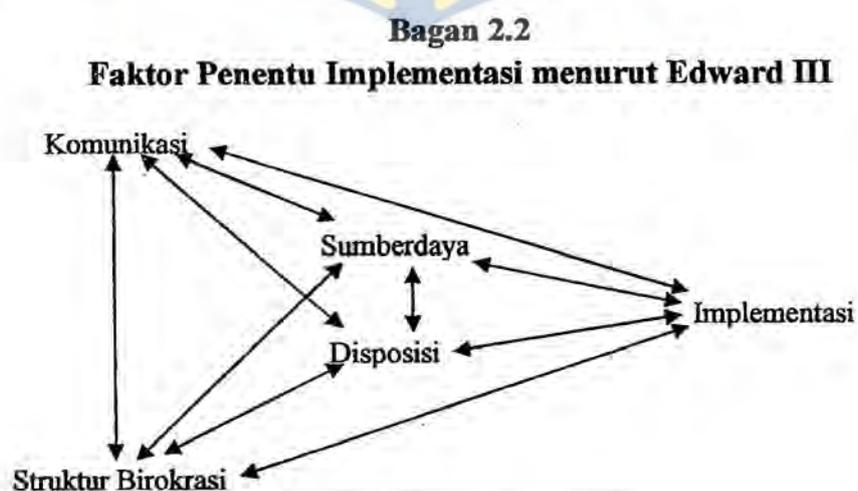
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit, berbelit-belit dan kompleks. Pada suatu saat akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards dalam Winarno (2014: 206) terdapat dua karakter utama birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi. Dalam uraiannya lebih lanjut, ditegaskan bahwa yang pertama (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dan yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Mengenai SOP, sangat baik apabila kebijakan merupakan kebijakan-kebijakan rutin dan dikerjakan secara berulang. Namun manakala kebijakan menyangkut hal yang baru dan bersifat kreatif, maka SOP yang ada akan cenderung menghambat implementasi kebijakan, bila tidak diiringi dengan SOP yang baru.

Fragmentasi sebagai karakter yang kedua birokrasi, menggambarkan bahwa tanggungjawab kebijakan bidang tertentu, tersebar dalam beberapa organisasi. Sering terjadi bahwa diantara organisasi yang memegang tanggungjawab kebijakan tertentu, sulit berkoordinasi, yang sesungguhnya sangat perlu. Kedua karakter utama birokrasi tersebut akan mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi kebijakan.

Adapun faktor penentu implementasi menurut Edward III dalam Subarsono (2015: 91), sesuai dengan uraian di atas, terlihat sebagai berikut :



Sumber : Subarsono, 2015 : 91

Peneliti berpendapat bahwa indikator faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program yang telah disampaikan Edward III dipandang tepat untuk menjelaskan implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon. Karena Penetapan indikator dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program harus berdasarkan pada perkiraan yang memungkinkan dan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang telah terorganisir.

## 2. Penyelenggaraan pengelolaan sampah

### a. Definisi sampah

Menurut Kamus Istilah Lingkungan dalam Alex S (2015: 3) mendefinisikan sampah adalah suatu bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

Menurut Soekidjo (2011: 190) mengatakan bahwa "Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang".

### b. Jenis-jenis sampah

Menurut Alex S (2015 : 5), berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi dalam :

- 1) Sampah alam yaitu Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering

dihutan yang terurai menjadi tanah. Diluar kehidupan liar sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

- 2) Sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti *feses* dan *urin*. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vektor* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.
- 3) Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
- 4) Sampah konsumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang.
- 5) Sampah perkantoran merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan, sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
- 6) Sampah daerah industri. Sampah industri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat.
- 7) Sampah nuklir. Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

c. Pengelompokkan sampah

Menurut Alex S (2015 : 8), berdasarkan jenisnya sampah dapat dibagi menjadi :

- 1) Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya.
- 2) Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.

Sementara menurut Alex S (2015 : 15), karakteristik sampah ditinjau dari kualifikasinya ada tiga macam yaitu dalam :

- 1) *Garbage* yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat lekas membusuk. Sampah ini rata-rata hanya membutuhkan waktu sekitar 18 jam dalam proses pembusukannya. Contoh dari sampah jenis ini antara lain : Sampah dapur, sampah alam dan lain-lain.
- 2) *Rubbish* yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik atau anorganik yang tidak/tahan berubah sifatnya atau tidak membusuk. Contoh dari sampah jenis ini adalah : Sampah plastik, kaleng/logam, kertas, kaca dan lain-lain.
- 3) *Ashes* atau *dust* yaitu sampah-sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari bahan-bahan partikel kecil yang mempunyai sifat mudah berterbangan.

#### d. Pengelolaan Sampah

Menurut Djuli Murtadho dan E. Gumbira Said (1987) berpendapat bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang memerlukan beberapa cara dalam penanganan/pengolahannya, yaitu :

### 1) Penumpukan (*dumping*)

Cara pengolahan sampah ini sangat sederhana, sering digunakan di negara berkembang. Biasanya dimanfaatkan untuk menutup lekukan tanah, rawa atau jurang, sampah dibuang ketempat tersebut tanpa penutupan tanah. Dengan cara pengolahan sampah seperti ini maka akan terjadi pencemaran lingkungan yaitu pencemaran bau, berjangkitnya penyakit akibat perkembangbiakan populasi lalat atau nyamuk, pencemaran air permukaan maupun air tanah oleh air lindi/ *leachate* akibat terbilasnya timbunan sampah oleh air hujan.

### 2) Pengomposan (*composting*)

Pengomposan dilakukan untuk kepentingan mengolah limbah dan sekaligus mendapat hasil dari kompos tersebut. Sampah harus dipilih yaitu yang benar-benar bisa menjadi kompos yaitu sampah organik daun- daunan, sisa makanan dan sampah lain yang dapat membusuk. Sampah sebagai rabuk mempunyai keistimewaan antara lain :

- a) Merubah keadaan tanah menjadi seperti humus;
- b) Mengembalikan bahan-bahan organis yang terpungut;
- c) Memperkaya zat N, P, K, Ca yang sangat penting untuk tanaman; dan
- d) Proses penyuburan berlangsung perlahan-lahan dan tahan lama.

### 3) Pembakaran (*incineration*)

Pembakaran sampah harus dilakukan dengan sangat berhati-hati karena pembakaran sampah dapat mengakibatkan pencemaran udara. Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (*skrap*) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energy listrik. Keuntungan lainnya dari penggunaan alat ini antara lain :

- a) Dapat mengurangi volume sampah antara 75%-80% dari sumber sampah tanpa proses pemilahan. Cara pembakaran relative memerlukan biaya yang tinggi sekitar tiga kali lipat, oleh karena itu sampah yang dibakar adalah benar-benar sampah yang sudah tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain.
- b) Abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan sehingga dapat langsung dibawa ketempat penimbunan pada lahan kosong, rawa, ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurug.
- c) Pada instalasi yang cukup besar dengan kapasitas sekitar 300 ton/hari dapat dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya proses. Tipe-tipe inceneter antara lain : Suhu tinggi (*high temperature*) Jika sampah tidak dipisahkan antara sampah yang dapat dibakar (*combustible*) dan sampah yang tidak dapat dibakar (*non combustible*). Suhu antara 800°C-1000°C. Suhu sedang (*semi high temperature*) Jika sampah tidak dipisahkan, tetapi lebih banyak sampah yang dibakar. Suhu rendah (*low temperature*) Digunakan untuk sampah yang mudah dibakar (*garbage, combustible*). Suhu antara 650°C-750°C.

#### 4) Sanitasi dalam tanah (*sanitary landfill*)

Sanitary landfill merupakan cara pengolahan sampah yang cukup baik dilakukan dengan menempatkan sampah di dalam tanah kemudian menutup kembali sampah tersebut dengan tanah. Apabila semua sampah diproses dengan metode ini maka akan memerlukan tanah yang sangat luas. Oleh karena itu, sampah yang diproses adalah sampah yang benar-benar tidak

dapat dimanfaatkan untuk keperluan apapun. Metode ini banyak digunakan di Negara sedang berkembang. Prinsipnya adalah :

- a) Sampah dibuang ditempat yang berlegok;
- b) Sampah dipadatkan; dan
- c) Ditutup dengan tanah.
- e. Penanganan sampah

Pengelolaan sampah kawasan kota merupakan masalah bersama, yang jasa penyediaanya masih merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. Secara teknis operasional pengelolaan sampah kawasan kota, dilaksanakan dalam tahapan pengumpulan, pengangkutan dan tahap pembuangan/pemusnahan. Kodoatie (2005: 218) berpendapat bahwa pada sisi teknis pengumpulan sampah merupakan kegiatan awal dari urutan/ proses pengelolaan persampahan/ kebersihan disamping kegiatan pewadahan yang merupakan tanggung jawab dari penghasil/sumber sampah. Faktor-faktor penting dalam pengumpulan sampah sampai ke tempat pembuangan, yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Sumber sampah;
- 2) Waktu pengumpulan;
- 3) Pemilihan peralatan;
- 4) Petunjuk rute pengangkutan;
- 5) Perkiraan jumlah sampah;
- 6) Waktu pengangkutan;
- 7) Kebutuhan tenaga kerja; dan
- 8) Tempat pembuangan akhir (TPA).

Kodoatie (2005:217) berpendapat bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen itu adalah :

- 1) Sub sistem kelembagaan (sub sistem institusi);
- 2) Sub sistem teknik operasional (sub sistem teknik);
- 3) Sub sistem pembiayaan (sub sistem finansial);
- 4) Sub sistem hukum dan pengaturan (sub sistem hukum); dan
- 5) Sub sistem peran serta masyarakat.

Adapun pemaparan Kodoatie tersebut di atas dapat dijelaskan sesuai bagan berikut :



Sumber : Robert, J. Kodoatie, 2005 : 218

Negara-negara di dunia telah mengembangkan pengelolaan sampah terpadu mulai dari tahap pengumpulan pra pengumpulan, tahap pengumpulan hingga tahap akhir. Bagchi (2004: 10) menyebut pengelolaan sampah terpadu ini sebagai *Integrated Solid Waste Management (ISMW)*, di Indonesia pengelolaan sampah terpadu disebut tempat pengelolaan sampah terpadu atau selanjutnya disingkat TPST. Dalam konsep ini dikenal adanya konsep tiga R

(3R), yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycling*. Dengan *reduce* berarti pengurangan produksi sampah (pra pengumpulan). Hal ini dapat dilakukan dengan konsep *zero waste* dalam arti anggota masyarakat beraktivitas tanpa memproduksi sampah misalnya “makanan tanpa sisa” atau belanja ke pasar dengan bungkusannya secukupnya. *Reuse* berarti penggunaan kembali barang-barang yang masih bermanfaat, dipakai kembali oleh pihak lain. *Recycling* berarti “mendaur ulang” sampah organik diproses menjadi kompos, sampah organik diproses untuk bahan baku produk lain.

Terakhir, tujuan semua dari konsep di atas adalah untuk mengurangi banyaknya sampah dan sebisa mungkin dimaksudkan untuk membangun dan mengubah paradigma masyarakat, bahwa sampah dapat dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan turut serta mengurangi pengaruh dampak lingkungan yang ditimbulkan dari banyaknya *volume* timbunan sampah, meskipun timbunan sampah tersebut adalah dampak dari makhluk hidup terutama manusia dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, mengandalkan program 3R dalam penyelesaian masalah sampah, merupakan suatu hal mustahil, paling tidak dengan dua alasan yaitu: pertama, untuk mencapai keberhasilan maksimum dari 3R, membutuhkan proses panjang untuk mengubah perilaku masyarakat. Kedua, proses pelaksanaan melalui 3R itu tetap menghasilkan residu (sisa) yang harus diolah dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan sampah, keterkaitan atau perbedaan beberapa penelitian terdahulu terhadap penelitian penulis ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan atau Perbedaan
1.	Ni Komang Ayu Artiningsih (Undip) (2008)	Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang Kota Semarang)	Pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat di Sampangan dan Jomblang dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, namun belum optimal dilaksanakan baik dalam pemilahan dan atau dalam pengomposan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Komposisi timbulan sampah di Jomblang terdiri dari sampah organik 50,75%, plastik 17,14% kertas 19,42%, kaca/logam 12,70%. Sedangkan di Sampangan terdiri dari sampah organik 49,52%, plastik 18,06%, kertas 19,29% kaca/logam 12,52%. Sampah organik yang dimanfaatkan menjadi kompos akan mengurangi timbulan sampah maupun mengurangi beban lingkungan, sedangkan hasil pemilahan selain dapat mengurangi timbulan juga dapat dijual atau dikelola sehingga menambah pendapatan.	Keterkaitan : Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Perbedaan : Subjek yang diteliti pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2.	Cholif Fatah Furqoni (Undip) (2010)	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus RW III Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang)	Pengelolaan sampah yang ada di RW III Kelurahan Magelang Tengah Kota Magelang belum melaksanakan dengan prinsip 3R dalam proses pemilahan sampah. Kedua sistem pengelolaan yang ada hanya sebatas memindahkan sampah dari satu titik ke titik yang lain, sehingga beban yang ditanggung oleh TPA	Keterkaitan : Kurangnya Sarana dan Prasarana. Perbedaan : Sama sekali belum melaksanakan prinsip 3R.

			tidak berkurang. Ketiga, belum adanya upaya pemilahan sampah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Keempat, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kelima, Kebijakan penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R tidak diikuti Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.	
3.	Revmon Kesuma (UNILA) (2011)	Kajian terhadap Pengolahan Sampah di Kota Bandar Lampung	Kondisi persampahan Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 197,22 km <sup>2</sup> , tingkat kepadatan penduduk 4.460 jiwa/km <sup>2</sup> ±1.180 ton/hari, jumlah sampah yang terangkut sekitar 560 ton/hari, menggunakan 15 armada truk, dibuang di TPA bakung menggunakan teknologi <i>open dump</i> sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i> .	Keterkaitan : Armada angkutan lebih kurang sama jumlahnya. Perbedaan : Pengolahan sampah di TPA menggunakan teknologi <i>open dump</i> .
4.	Dyah Ernawati, Sri Budiastuti, M. Masykuri (UNS) (2012)	Analisis komposisi, jumlah dan Pengembangan strategi pengelolaan Sampah di wilayah pemerintah kota Semarang berbasis analisis SWOT	Kondisi persampahan Kota Semarang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota mulai dari pengumpulan sampah ke TPS, pengangkutan dan pengolahan sampah TPA mencakup di 132 kelurahan dengan volume sampah terangkut sebesar 64,7%, setara 3.073,25 m <sup>3</sup> /hari sampah terangkut sedangkan sampah tidak terangkut setara dengan 1.676,75 m <sup>3</sup> /hari. Timbulan sampah Kota Semarang sebesar 4.757,10 m <sup>3</sup> /hari, 81,5% sumber sampah berasal dari sampah permukiman, komposisi sampah didominasi sampah organik sebesar 61,95% dengan kandungan air tinggi, 38,05% sampah anorganik.	Keterkaitan : Pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA dikelola oleh Dinas terkait. Perbedaan : Penelitian berupa analisis dan hasil yang diperoleh berupa data.
5.	Saiful Bahri (UNSAT) (2015)	Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kabupaten Tangerang	Luas daerah pelayanan sampah sebesar 66,623 km <sup>2</sup> dengan penduduk 2.838.620 jiwa volume sampah mencapai 4.258 m <sup>3</sup> /hari pengolahan	Keterkaitan : Pengelolaan sampah berdampak kurang baik terhadap masyarakat. Perbedaan :

			sampah di TPA hanya dengan proses pembakaran, Masyarakat yang tinggal disekitar TPA merasa kecewa karena bau busuk sampah dan kerumunan alat yang masuk ke rumah-rumah.	Pengolahan sampah di TPA dengan proses pembakaran.
--	--	--	---	--

### C. Kerangka Berpikir

Kawasan kota akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh penambahan jumlah penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta diikuti kegiatan kota yang makin berkembang akan menimbulkan dampak adanya buangan/ limbah yang meningkat dan bervariasi.

Suprihatin (1996) mengatakan bahwa buangan tersebut bisa berupa sampah padat dan limbah cair yang merupakan hasil kegiatan pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Salah satu masalah lingkungan yang selalu dihadapi umat manusia adalah masalah sampah. Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, kesehatan dan lingkungan.

Masalah pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya seperti pelaku usaha. Dari perspektif pemerintahan, maka implementasi kebijakan atau program pengelolaan hendaknya memberikan manfaat ganda, disamping dapat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, juga dapat menambah nilai pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya melalui kewajiban membayar retribusi sampah bagi setiap pelaku usaha dan rumah tangga yang berada di wilayah pelayanan persampahan.

Dalam penelitian ini untuk mempermudah melihat proses implementasi program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anderson (1979: 68), yang mengemukakan ada 4 aspek yang peneliti gunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan atau program yaitu :

1. Siapa yang mengimplementasikan

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Namun jika ditanyakan siapa aktor-aktor Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan atau melaksanakan program tentang pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon hal ini telah dijawab dalam pedoman teknis operasional atau *Standard Operational Procedure (SOP)* tentang pengelolaan sampah, telah

secara jelas menyebutkan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.

Dikarenakan fokus penelitian ini adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah maka pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku salah satu SKPK Aceh Tengah adalah yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah ini.

## 2. Hakikat dari proses administrasi

Sondang Siagian dalam Sudarso dkk (2011: 1.5) mendefinisikan administrasi sebagai “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan definisi proses administrasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program pengelolaan sampah adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang dimaksud dinas disini adalah kerjasama pejabat beserta staf-stafnya. Secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

## 3. Kepatuhan

Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementator patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini adalah kepatuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah terhadap segala isi peraturan – peraturan yang ada.

#### 4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan

Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan dimaksud, rujukan utama dampak yang ditimbulkan adalah bagaimana masyarakat atau pihak-pihak lain sebagai penerima manfaat pelayanan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon ataupun dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah ini. Dalam penelitian ini peneliti berfokus hanya pada dampak yang ditimbulkan bagi kebersihan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu dalam mengkaji berbagai permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program pengelolaan sampah maka penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Edward III, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2015: 90). Model yang dikemukakan Edwards III bahwa ada empat faktor penentu implementasi. Keempat faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Model ini dipandang lebih sesuai untuk mengkaji permasalahan penelitian mengenai implementasi program pengelolaan sampah. Bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan implementasi kebijakan atau program, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi

Seperti ditegaskan dalam tinjauan pustaka, komunikasi kebijakan atau program publik meliputi tiga hal penting yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi antara pembuat kebijakan atau program khususnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta masyarakat sebagai tujuan implementasi, yang dimaksud pembuat

kebijakan atau program disini adalah DPRK dan Bupati Aceh Tengah. Sedangkan pelaksana kebijakan atau program adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yaitu pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan perangkatnya) sedangkan para pihak lain dan masyarakat dianggap sebagai tujuan dari kebijakan atau program dimaksud.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Edwards, komunikasi kebijakan yang efektif ditandai dengan Dinas Lingkungan Hidup, harus memahami benar apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara cermat, serta petunjuk pelaksanaan yang dipahami harus jelas. Disamping itu kebijakan juga harus konsisten. Secara jelas disebut oleh Edwards (Winarno, 2014: 179): “keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang efektif”. Demikian pula halnya, pesan yang terkandung dalam kebijakan, harus jelas bagi pelaksana kebijakan. “Ketidakjelasan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal” (Edwards dikutip dalam Winarno, 2014: 180). Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup juga harus intensif melakukan sosialisasi kepada pihak lainnya dan masyarakat.

## 2. Sumberdaya

Faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III adalah sumberdaya yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan atau program. Sumberdaya atau sumber-sumber menurut Edward

ini meliputi aspek: staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Dalam konteks pelaksanaan/implementasi program tentang pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon, staf lebih terkait dengan jumlah dan kualifikasi personil pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan informasi lebih menekankan pada ketersediaan petunjuk pelaksanaan kebijakan atau program dan data personil yang mengatasi atas petunjuk pelaksanaan dan menaatinya.

Wewenang lebih menunjuk pada independen pelaksana kebijakan atau program dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan kebijakan atau program. Dalam hal implementasi kebijakan atau program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon, aspek kewenangan dalam faktor sumberdaya lebih melihat apakah dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut, personil Dinas Lingkungan Hidup benar-benar independen atau memperoleh tekanan-takanan/ intervensi dari pihak lain, seperti legislatif, atasan, atau bahkan pihak pers, sehingga merasa takut untuk mengimplementasikan kebijakan atau program. Hal ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program.

Demikian pula halnya, fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan atau program, merupakan salah satu aspek yang juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program. Semakin lengkap fasilitas yang diperlukan, akan semakin efektif implementasi kebijakan atau program tersebut.

### 3. Disposisi

Faktor ketiga adalah disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki implementator, yang lebih terkait dengan kuat tidaknya dukungan dari pelaksana. Semakin kuat dukungan pelaksana atas kebijakan atau program berupa komitmen dan kejujuran yang telah diamanatkan oleh pembuat kebijakan atau program, maka terbuka kemungkinan besar pelaksana kebijakan atau program melaksanakan kebijakan atau program sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan atau program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon, disposisi ini terkait dengan kuat tidaknya dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah terhadap program penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut. Komitmen itu sendiri, termasuk dukungan perangkat dinas terhadap pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Semakin kuat dukungan perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah terhadap kebijakan atau program, semakin efektif pula implementasi kebijakan atau program tersebut.

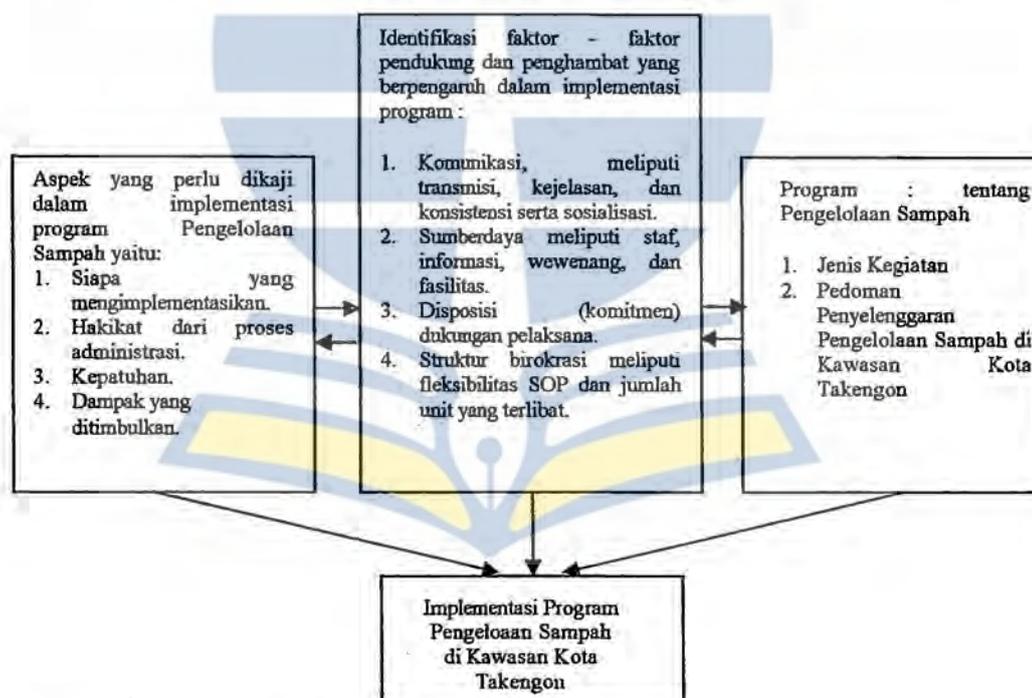
### 4. Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang dikemukakan Edward III sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan atau program adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon, struktur birokrasi akan lebih berfokus pada aspek standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. Dapat

dikemukakan bahwa semakin besar program pengelolaan sampah membutuhkan perubahan dalam cara yang lebih lazim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, semakin besar pula kemungkinan SOP menghambat implementasi program.

Fragmentasi terkait dengan jumlah unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau program. Semakin banyak unit yang terlibat akan semakin sulit koordinasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan atau program.

**Bagan 2.4**  
**Model Penelitian Implementasi program Pengelolaan Sampah**  
**di Kawasan Kota Takengon**



#### **D. Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Perumusan definisi operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat

diobservasi (sebagaimana dikutip dalam Siagian, 2011:141). Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya, Dalam hal ini peneliti menentukan satu variabel atau variabel tunggal yaitu implementasi program atau kebijakan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka berpikir di atas, peneliti akan menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Edward III yang berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor penentu implementasi yang dipergunakan sebagai variabel yang dapat diukur dan diteliti, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Operasionalisasi Konsep**

Variabel	Indikator
1. Komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman maksud dan tujuan program pengelolaan sampah dan Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana pada DLH melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah;</li> <li>2. Sosialisasi program pengelolaan sampah dan Penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi para pihak;</li> <li>3. Konsistensi pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan masyarakat.</li> </ol>
2. Sumberdaya (staf, informasi, wewenang, dan fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM di DLH apakah sudah memadai untuk melaksanakan program kebijakan pengelolaan sampah;</li> <li>2. SDM di DLH mempunyai informasi, pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan implementasi program pengelolaan sampah;</li> <li>3. DLH mempunyai wewenang utama untuk melaksanakan implementasi program pengelolaan sampah;</li> <li>4. Dukungan dana terhadap DLH, Alokasi dana khusus untuk penanganan pengelolaan sampah, Dana yang dialokasikan sudah menunjang penanganan dan pengelolaan sampah untuk menunjang operasional serta sarana</li> </ol>

	prasarana penunjang implementasi program pengelolaan sampah.
3. Disposisi (komitmen)	1. Kuat tidaknya komitmen berupa dukungan DLH dalam implemementasi program pengelolaan sampah.
4. Struktur birokrasi (fleksibilitas SOP dan jumlah unit yang terlibat)	1. SOP dalam implemementasi program pengelolaan sampah dan SOP program pengelolaan sampah menjadi pedoman untuk DLH dan pihak terkait; 2. Fragmentasi terkait dengan jumlah pihak yang terlibat dan koordinasi pihak terkait dalam implementasi program pengelolaan sampah.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah implementasi program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon. Sebagaimana diuraikan dalam bab pendahuluan, fenomena pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon ini menarik untuk diteliti, yaitu apakah implementasi program pengelolaan sampah sudah memenuhi standar minimum dalam upaya turut serta menjaga kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **A. Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam J. Lexy Moleong (2017: 5) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Gambaran dari objek penelitian yang diamati adalah mengenai implementasi program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon.

#### **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu Informan yang dijadikan sumber informasi merupakan orang yang sengaja dipilih karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai hubungan dengan tema penelitian.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah;
4. Kepala Kampung Lot Kala Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kepala UPTD TPA Uwer Tetemi;
6. Staf dan Petugas Pengelola Sampah; dan
7. Masyarakat.

### **C. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2016: 307) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri dengan bantuan beberapa instrumen pendukung seperti buku, dokumen, pedoman wawancara dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen utama melakukan validasi terkait dengan kesiapan melakukan penelitian sebelum peneliti terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif dan penguasaan wawasan objek yang diteliti seperti program publik, hambatan dalam melaksanakan program dan mendukung program. Penelitian ini difokuskan pada implementasi program pengelolaan sampah.

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 309) “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi”. Lebih lanjut Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2016: 309) mengemukakan bahwa “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”.

Selaras dengan pendapat tersebut, maka data-data utama dalam penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi, ketiga teknik tersebut digunakan secara berulang –ulang sesuai keperluan pada saat penelitian dilakukan.

##### 1. Wawancara

Moleong (2017:186) menjelaskan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan implementasi program pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian.

## 2. Observasi

Marshal dalam Sugiyono (2016: 309) mengemukakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Selanjutnya Sugiyono (2016: 196) menyebutkan bahwa “Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengamati pengelolaan sampah di kawasan kota Takengon.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sugiyono (2016: 326) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sugiyono (2016: 327) juga menyebutkan bahwa hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah, laporan pelaksanaan pengelolaan sampah, dan berbagai dokumen lain yang mendukung.

## E. Metode Analisis Data

Bogdan & Biklen ( sebagaimana yang dikutip dalam Moeleong 2017: 248) mengidentifikasikan analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan secara terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini analisa data berperan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data *Deskriptif-Kualitatif*. Sedangkan tujuannya agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci dan alasan mengapa teknik analisis data ini digunakan karena mampu menggali informasi secara lebih luas, lebih terperinci, dan lebih mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial tertentu, terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Juga dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi pada lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi konsep.

Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan dari teknik analisis data dimaksud :

### 1. Reduksi data

Sugiyono (2016: 33) mengemukakan bahwa “Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan”. Selanjutnya Sugiyono (2016 : 336) mengatakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan”.

### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 339).

### 3. Penarikan kesimpulan

Prasetya Irawan (2009: 6.2) mengemukakan bahwa “ Kesimpulan (*conclusion*) adalah suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus, dan menunjukkan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus tersebut”. Selanjutnya untuk kesimpulan dalam penelitian kualitatif Sugiyono (2016: 343) mengatakan bahwa “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografi

Keadaan topografi Kota Takengon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Tengah yang tepat berada di tengah-tengah Provinsi Aceh tepat berada di pinggiran danau Laut Tawar. Kawasan Kota Takengon yang secara geografis terletak pada koordinat meliputi sebagian wilayah yang berasal dari 4 (empat) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Kebayakan dan Kecamatan Pegasing.

Kota Takengon secara geografis terletak pada koordinat  $4^{\circ}22'14,42''$ - $4^{\circ}37'53.0''$  LU dan  $96^{\circ}50'32.6''$  BT. Kawasan Kota Takengon yang terdiri dari sebagian wilayah Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Kebayakan dan Kecamatan Pegasing terdiri dari 119 Kampung termasuk Kampung Persiapan. Untuk lebih jelasnya jumlah kampung dalam Kawasan Kota Takengon seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah Kampung dan Luas Wilayah di Kawasan Kota Takengon**

No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Kampung		Luas Wilayah Km <sup>2</sup>
			Definitif	Persiapan	
1	2	3	4	5	6
1	Bebesen	1	28	5	29,57
2	Kebayakan	1	20	3	54,83
3	Lut Tawar	2	18	10	87,59
4	Pegasing	1	31	4	271,78
Total		5	97	22	443,76

Sumber : BPM & PK 2016 dan RTRW Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak memiliki Kampung yang termasuk ke dalam kawasan Kota Takengon adalah

kecamatan Pegasing, sedangkan Kecamatan dengan jumlah kampung paling sedikit berada di Kecamatan Kebayakan.

## 2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk di kawasan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 adalah 101.468 jiwa, dengan rata rata kepadatan penduduk 43 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Kepadatan Penduduk di Kawasan Kota Takengon**

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	
		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	2	3	4
1	Bebesen	29,57	41.340
2	Kebayakan	54,83	18.857
3	Lut Tawar	87,59	21.605
4	Pegasing	271,78	19.666
	Jumlah	443,76	101.468

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

## 3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2017. tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan atau program teknis dalam lingkup lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. Pemnataan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- i. Melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pembinaan UPTD; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh

Tengah. Gambaran SDM berdasarkan jenis pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Pegawai DLH berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	PNS	46
2	Tenaga Kontrak	294
	a. Supir Truk	14
	b. Penyapu	260
	c. Pemungut Retribusi	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

#### 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Sarana dan prasarana perkantoran DLH**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1
2	Meja Kerja	35
3	Kursi Kerja	50
4	Lemari Arsip	8
5	Filling Cabinet	14
6	Komputer PC	15
7	Laptop	10
8	Printer	12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

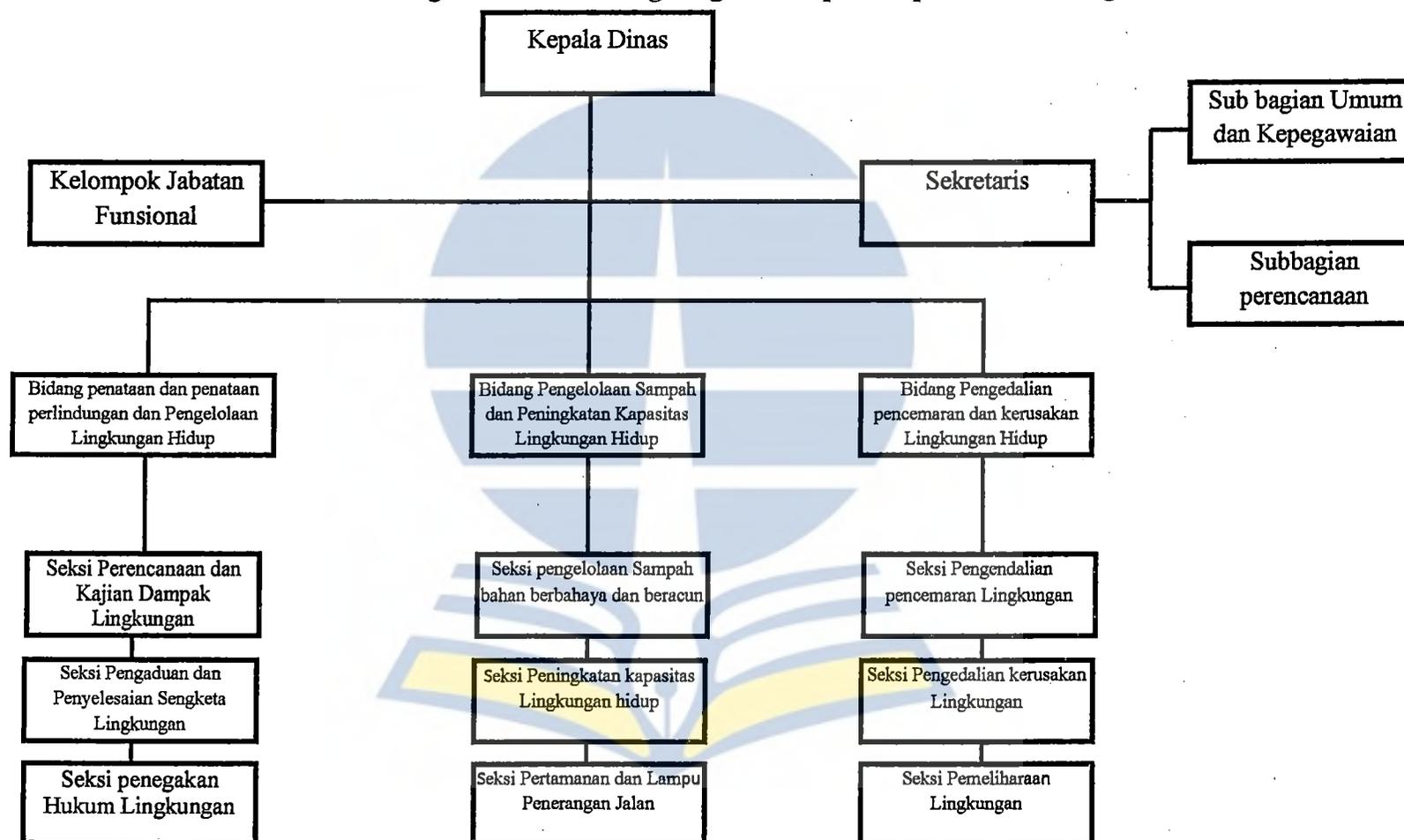
#### 6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2016, secara garis besar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari seorang kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kepala bidang

pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kepala pengendalian pencemaran lingkungan. Struktur organisasi dapat dilihat pada bagan berikut ini :



**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

## B. Hasil

### 1. Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon

Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon didasari dari tahapan pengelolaan sampah yang meliputi 3 (tiga) alur kegiatan yang saling terkait yaitu :

#### a. Pengumpulan sampah

Sampah diambil/dikumpulkan dilingkungan/lokasi masing – masing pada pagi hari, kemudian sampah ditransit di gudang, atau sebagian sampah oleh masyarakat sekitar dibuang atau dikumpulkan di TPS-TPS atau Kontainer dengan lokasi yang telah ditentukan. TPS-TPS atau Kontainer tersebut seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Tata Letak TPS / Kontainer di Kawasan Kota Takengon**

NO	NAMA TPS	LOKASI (KAMPUNG /KAWASAN/JALAN)	KAPASITAS (BESAR/KECIL)
1	Paya Ilang I	Kawasan Pasar Paya Ilang Takengon	Besar
2	Paya Ilang II	Kawasan Pasar Paya Ilang Takengon	Besar
3	Paya Ilang III	Kawasan Pasar Paya Ilang Takengon	Besar
4	Pasar Inpres	Jalan Sengeda Takengon	Besar
5	Pintu Masuk Terminal Bus Lama	Jalan Sengeda Takengon	Besar
6	Pintu Keluar Terminal Bus Lama	Jalan M. Hasan Gayo Takengon	Besar
7	Depan Mall Pasar Inpres	Jalan Gatot Subroto Takengon	Besar
8	Bale Atu	Komplek Terminal Bale Atu Takengon	Besar
9	Totor Bale	Jalan Lut Tawar Kp. Bale Takengon	Besar
10	SMP 10	Komplek SMPN 10 Takengon	Besar
11	Pesantren Bur Jimet	Komplek Pesantren Bur Jimet Takengon	Besar
12	Pasar Ikan	Jalan Pasar Ikan Bawah Takengon	Besar
13	SMP 1	Komplek SMPN 1 Takengon	Besar
14	Sp. Lembaga	Jalan Yos Sudarso Takengon	Kecil
15	GOS	Jalan Yos Sudarso Takengon	Kecil
16	DPRK	Jalan Kartini Takengon	Kecil
17	Setdakab	Jalan Kartini Takengon	Kecil
18	SMP 1	Jalan SMPN 1 Takengon	Kecil
19	Mahkamah	Jalan Mahkamah Takengon	Kecil
20	Sp. Pendopo	Jalan GOR Gentala Takengon	Kecil
21	Blang Kolak I	Jalan Lebe Kader Takengon	Kecil

22	Sp. Kelaping	Jalan Malem Dewa Pegasing	Kecil
23	Sp. Kp. Baru	Simpang Kampung Baru Takengon	Kecil
24	Belakang Polres	Jalan Pahlawan Takengon	Kecil
25	Depan SMA 1	Jalan Pahlawan Takengon	Kecil
26	Kute Lot	Dusun Kute Lot Takengon	Kecil
27	MTsN 1	Komplek MTsN 1 Takengon	Kecil
28	SMP 2	Komplek SMPN 2 Takengon	Kecil
29	SMEA	Komplek SMK 1 Takengon	Kecil
30	SD	Komplek SD 2, 3 dan 6 Lut Tawar	Kecil
31	SMA Pegasing	Komplek SMAN 3 Takengon	Kecil
32	SMP Pegasing	Komplek SMPN 5 Takengon	Kecil
33	Puskesmas Pegasing	Komplek Puskesmas Pegasing	Kecil
34	SMA 2	Komplek SMAN 2 Takengon	Kecil
35	SMA 4	Komplek SMAN 4 Takengon	Kecil
36	Terminal Paya Ilang	Komplek Terminal Terpadu Paya Ilang Takengon	Kecil

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

#### b. Pengangkutan sampah

Setelah sampah terkumpul baik digudang transit ataupun di TPS/bak sampah maka armada Dinas Lingkungan Hidup akan mengangkutnya ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar sampah yang terkumpul tersebut tidak membusuk digudang transit dan berserakan di TPS. Pengangkutan sampah tersebut tiap harinya terjadwal pada pukul 21.00 Wib. Dengan jumlah armada 9 truk. Setiap armada terdiri dari 1 orang sopir dan 2 orang tenaga pengangkut.

#### c. Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Hal ini merupakan tahap akhir atau tahap pemusnahan sampah yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sebelumnya sampah-sampah tersebut diangkut oleh armada truk sampah. Tahap pemusnahan sampah merupakan tahap terakhir dari penanganan sampah. Selama ini mekanisme pemusnahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan metode :

*Sanitary landfill*, yaitu pemusnahan sampah dengan cara mengurug sampah dengan bahan pengurug. Adapun metode *sanitary landfill* tersebut dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menyebarkan sampah dalam lapisan-lapisan kemudian dipadatkan;
- 2) Menyebarkan dan memadatkan bahan penutup di atas lapisan sampah;
- 3) Menyebarkan dan memadatkan penutup antara dan penutup final.

Dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kawasan Kota Takengon, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah kabupaten tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya mengantisipasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki program pengelolaan sampah.

Program tentang pengelolaan sampah ini sejatinya memiliki asas dan tujuan. Asas utama yang termuat dalam program pengelolaan sampah ini masih sebatas asas tanggungjawab dan asas berkelanjutan, tetapi asas-asas lainnya seperti asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi belum secara jelas termuat dalam program ini. Adapun penjelasan dari asas-asas yang termuat dalam program ini adalah, asas tanggung jawab memiliki pengertian bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Sedangkan asas yang belum termuat secara jelas dalam program pengelolaan sampah ini dapat dijelaskan secara ringkas, dimulai dari asas manfaat adalah

bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Asas keselamatan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia. Asas keamanan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Sedangkan tujuan dari program ini jelas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan diharapkan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komperhensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian di kembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan

sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon hingga saat ini masih menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan hanya menganjurkan komponen lainnya seperti pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola sampah dilingkungannya, diperlukan kebijakan atau program yang lebih besar dan kuat untuk mewajibkan keterlibatan seluruh pihak dalam pengelolaan sampah seperti peraturan daerah ataupun qanun.

Secara lebih jelas hasil temuan dan identifikasi tentang implementasi program pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Siapa yang mengimplementasikan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon berdasarkan program pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah yang dikelola disini ada dua jenis yaitu sampah rumah tangga termasuk lumpur tinja dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat yang berasal dari rumah tangga, sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga. Kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam disebutkan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan pelaku usaha dan masyarakat

dianjurkan untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.

Dengan demikian sudah jelas bahwa pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon dari proses pengurangan hingga penanganan sampah. Untuk lebih jelasnya siapa-siapa saja yang melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Pengurangan Sampah

Dalam kaitannya kegiatan pengurangan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang bertujuan agar timbulan sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak terlalu banyak. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sebagaimana dimaksud dengan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dalam kenyataan pelaksanaannya untuk kegiatan menentukan target pembatasan pengurangan sampah masih belum di tetapkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan atau program berupa peraturan daerah. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

“Kalau targetnya itu kita tetapkan sebesar 2%, tapi kami mengalami kendala. Disatu sisi kita memang diarahkan untuk bisa mengurangi volume sampah. Tetapi di sisi lain belum ada regulasi yang kuat terhadap pengelolaan sampah yang melibatkan pihak terkait dan masyarakat.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak MZ Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

“Untuk jumlah volume sampah selalu berubah dik, kadang naik kadang turun, tapi kecenderungannya naik. Kalau target pastinya perbulannya harus segini kita bisa tetapkan, karena jumlah sampah selalu berubah-ubah. Karena memang agak sulit karena regulasinya berupa bentuk qanun belum ada.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari penjelasan Bapak IS dan Bapak MZ menerangkan bahwa target pengurangan sampah sudah ditetapkan namun dikarenakan belum adanya regulasi yang kuat berupa qanun daerah yang melibatkan semua pihak jadi target tersebut masih terkendala untuk direalisasikan.

Selanjutnya untuk kegiatan pengurangan sampah berupa penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mengguna ulang atau mendaur ulang apakah sudah ada sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat? pengurangan sampah yang mana sampah tersebut dapat dijadikan kompos dan bahan kerajinan seperti tas, dompet, keset dan bahan kerajinan lainnya. Apakah Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinan dengan masyarakat dengan sosialisasi baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan, selain itu apakah mereka juga memfasilitasi alat-alat beberapa komposter maksudnya untuk mengolah sampah organik rumah

tangga yang mana nanti bisa digunakan untuk pembuatan kompos. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Kalau untuk penerapan teknologi ramah lingkungan itu belum ada, tapi kalau tingkat sosialisasi itu sudah dan sedang kita lakukan ke masyarakat dan sekolah-sekolah, apalagi untuk peralatan komposter kita belum punya” (Wawancara 3 Maret 2018)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak MZ :

“Untuk daur ulang kita masih terkendala peralatan sebenarnya” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan Bapak IS dan Bapak MZ, untuk kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang yang mana menjadi komponen utama dalam pengurangan sampah selama ini sebenarnya masih terkendala peralatan namun untuk sosialisasi sudah dan sedang dilaksanakan di masyarakat dan sekolah-sekolah.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola sampah di Kawasan Kota Takengon dapat di jelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 4.6.**  
**Persentase Volume Sampah di Kawasan Kota Takengon**

No.	Uraian	Volume (m <sup>3</sup> ) /hari	Prosentase (dari total timbunan)
1	Diangkut ke TPA	110,2	42,70%
2	Tidak terangkut	147,82	57,30%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sampah yang diangkut ke TPA adalah 110,2 m<sup>3</sup>/hari dan yang tidak terangkut sebesar 147,82 m<sup>3</sup> /hari. Sampah

yang tidak terangkut adalah sampah yang masih menginap di TPS atau ditempat sumber timbulan sampah dihasilkan. Sedangkan sampah yang diolah dan dikelola oleh masyarakat seperti yang terdata pada bank sampah Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan sebesar 800 kg – 1 ton/minggu.

Upaya pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menumbuhkan semangat masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada cukup baik, ini terlihat dari himbauan-himbauan dan sosialisasi baik kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah, namun hal yang belum dilakukan untuk produk atau bahan daur ulang yang telah dipisahkan yaitu dengan menyisihkan sebagian anggaran yang ada untuk pembelian produk-produk sampah dari masyarakat di Kawasan Kota Takengon.

Adapun yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan dengan mendirikan dan mengoperasikan bank sampah induk DLH yang menampung dan membeli berdasarkan jenis dan kriteria sampah, namun ada juga bank sampah yang dikelola oleh masyarakat yaitu pada bank sampah Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan, yaitu sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis disetorkan ke bank sampah, dimana sampah tersebut ada yang dijadikan bahan pembuatan produk-produk kreatif yang dapat digunakan kembali ataupun dijual, sedangkan untuk sampah anorganik yang tidak dapat diolah dijual kembali kepada pengepul. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, bahwa :

“Ya, kita memiliki bank sampah induk yang dikelola DLH, bank sampah induk ini sudah beroperasi sejak tanggal 24 Februari lalu” (Wawancara 3 Maret 2018).

Ditambahkan oleh Kepala Seksi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak MZ :

“Intinya kita menampung dan membeli sampah anorganik yang disetorkan oleh masyarakat, dengan harapan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah yang masih bernilai ekonomis ” (Wawancara 3 Maret 2018).

Selanjutnya untuk bank sampah yang dikelola oleh Kampung Lot Kala seperti yang diungkapkan oleh Bapak KG selaku Kepala Kampung, seperti penuturannya berikut ini :

“Ya, untuk Kampung Lot Kala sendiri telah memiliki bank sampah yang pengelolaannya dilakukan oleh Kampung. Intinya masyarakat menyetorkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis untuk ditukarkan dalam bentuk uang, sembako ataupun pulsa telpon seluler selanjutnya sampah-sampah tersebut ada yang bisa dijadikan bahan kerajinan seperti tas dan perlengkapan dapur sedangkan yang tidak dapat diolah kami jual kembali ke pengepul” (Wawancara 14 Maret 2018).

## 2) Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah merupakan salah satu kegiatan penyelenggara pengelolaan sampah yang mana meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Selanjutnya pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, jumlah sampah dan /atau

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media secara aman.

Pada dasarnya pelaksanaannya kegiatan penanganan sampah di Kawasan Kota Takengon dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, jadi DLH jugalah yang bertanggungjawab untuk mengambil dan memindahkan sampah dari sampah rumah tangga ke TPS, menggunakan kendaraan roda 3 bagi rumah tangga yang membayar retribusi untuk lokasi atau gang sempit yang tidak terjangkau oleh truk pengangkut sampah, sedangkan untuk lokasi jalan protokol truk pengangkut sampah langsung memuat sampah dari depan pertokoan ataupun rumah warga.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggungjawab mengangkut sampah dari sumber sampah yang berasal dari jalan-jalan utama dan protokol serta pasar dan kawasan perkantoran yang ada di Takengon. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Bapak IS yang mengatakan bahwa :

“Untuk pengangkutan itu memang sesuai Tupoksi yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah itu menjadi tanggungjawab DLH” (Wawancara 3 Maret 2018)

Namun ada pula beberapa kampung di kawasan Kota Takengon yang telah melaksanakan pengumpulan sampah menggunakan kendaraan roda 3 bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, hal ini dibenarkan oleh Bapak KG Kepala Kampung Lot Kala yang mengatakan bahwa :

“Ya, ada bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berupa kendaraan pengangkut sampah roda 3 untuk mengangkut sampah organik ke TPS, namun untuk sampah anorganik seperti plastik dan bahan anorganik lainnya yang bernilai ekonomis, masyarakat mengantarnya sendiri ke Bank Sampah Kampung Lot Kala” (Wawancara 14 Maret 2018).

Dari pendapat Bapak IS, Bapak dan Bapak KG bisa dikatakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga, perkantoran, pasar

dan tempat umum lainnya ke TPS dilakukan oleh DLH, namun ada beberapa kampung yang mengumpulkan sampah sendiri karena ada kendaraan pengangkut sampah roda 3 bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk dipergunakan dikampung tersebut. sedangkan untuk pengangkutan sampah ke TPA sepenuhnya dilakukan oleh DLH Kabupaten Aceh Tengah .Rata-rata jumlah timbulan sampah dari tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7.**  
**Jumlah Timbulan Sampah di Kawasan Kota Takengon**

No.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rata-rata Sampah / Angkutan (Kg)	Jumlah Rata-rata Angkutan Sampah / Hari (Kali)	Jumlah Sampah / Hari (Kg)	Jumlah Hari dalam 1 Tahun	Jumlah Total Sampah / Tahun (Kg)
1.	101.468	2.513	19	47.747	365	17.427.655

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Selanjutnya proses akhir penanganan sampah di TPA Uwer Tetemi adalah pengolahan sampah. Teknik pengolahan yang diterapkan di TPA sesuai pedoman teknis operasional pengelolaan TPA Uwer Tetemi adalah *sanitary landfill* yaitu pengolahan sampah dengan cara mengurug sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara berlapis tipis kemudian dipadatkan dan pada akhirnya ditimbun dengan tanah, yang mana prosesnya adalah sampah yang berasal dari TPS yang diangkut oleh armada pengangkutan sampah lalu sampah-sampah tersebut diturunkan, kemudian sampah-sampah tersebut didorong dan diratakan dengan whelloader serta dipadatkan selanjutnya lapisan sampah tersebut ditimbun tanah menggunakan bulldozer. Teknik pengelolaan *sanitary landfill*

merupakan teknik pengelolaan sampah yang telah memenuhi standar persyaratan lingkungan. Teknik ini dipilih digunakan di Uwer Tetemi karena untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak AH selaku kepala UPTD TPA Uwer Tetemi yang menyatakan bahwa :

“Iya.. untuk pengelolaan sampah di TPA Uwer Tetemi ini, kita sudah menggunakan teknik *sanitary landfill*” (Wawancara 15 Maret 2018)

Sedangkan untuk pengolahan lumpur tinja, TPA Uwer Tetemi juga memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sesuai Pedoman Teknis Operasional IPLT, jenis limbah yang diolah pada IPLT Uwer Tetemi meliputi limbah cair *Black Water* yaitu limbah yang dihasilkan dari WC meliputi *urine*, tinja, material pembersih lainnya seperti kertas dan air pembersih. Limbah selanjutnya adalah *Grey Water* yaitu air limbah yang dihasilkan dari bekas air kebutuhan rumah tangga seperti air bekas mandi, mencuci dan buangan air dari dapur.

b. Hakikat dan proses administrasi

Proses administrasi pada hakekatnya merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon ada beberapa pihak yang bertanggungjawab di dalamnya mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Mulai dari *reduce, reuse, recycle*, pemasaran hinga

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan. Dari beberapa kegiatan penyelenggaraa pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang paling bertanggungjawab menjalankan kegiatan di atas, diantaranya sosialisasi pemilahan, pengangkutan, dan pengolahannya. Namun ada juga beberapa kampung di kawasan Kota Takengon yang memiliki kendaraan roda 3 bermesin yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga serta untuk urusan pengelolaan sampah seperti di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan yang telah memiliki bank sampah sendiri termasuk manajemennya dikelola sendiri oleh Kampung tersebut, namun untuk sampah yang tidak terolah diangkut ke TPS terdekat menggunakan kendaraan tersebut, seperti yang dituturkan oleh Bapak KG selaku Kepala Kampung Lot Kala Kecamatan Bebesen berikut ini :

“Untuk sampah anorganik umumnya memang bisa kita olah ataupun kita jual kembali ke pengepul, namun untuk sampah yang tidak terolah atau sampah organik kita angkut ke TPS terdekat” (Wawancara 14 Maret 2018).

Namun pada kenyataan ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh beberapa Kampung dalam pengangkutannya hanya sampai ke TPS sedangkan untuk pengangkutan selanjutnya ke TPA masih dilakukan oleh pihak DLH sendiri sehingga peran Kampung tersebut tidak bisa terlepas dengan peran yang dimiliki oleh DLH. Misalnya saja dalam hal pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kendaraan sampah roda 3 dari Kampung-kampung tersebut masih terkait erat dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Diantaranya terkait aturan jam buang yang harus dipatuhi oleh petugas kendaraan sampah roda 3 Kampung tersebut yaitu sampah harus dibuang sebelum jam 21.00 Wib karena petugas pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampah dari TPS untuk diangkut ke TPA pada

pukul 21.00 Wib, jadi agar sampah tidak menginap di TPS, petugas kendaraan sampah roda 3 dari Kampung-kampung harus mematuhi jam buang yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Selain itu petugas kendaraan sampah roda 3 juga harus membuang sampah yang telah dikumpulkannya ke dalam bak TPS, seperti dituturkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS berikut ini :

“Sampah-sampah yang terkumpul di TPS setiap hari kita angkut ke TPA pukul 21.00 Wib, jika ada masyarakat yang membuang sampah di bawah jam tersebut berarti akan tinggal di lokasi TPS tersebut dan keesokan harinya baru diangkut” (Wawancara 3 Maret 2018).

Hal tersebut senada seperti yang dituturkan oleh Bapak LM selaku salah satu sopir kendaraan pengangkut sampah roda 3 :

“Sampah-sampah yang kami kumpulkan ini pak kami angkut langsung ke TPS harus sebelum jam 9 malam, kalau tidak nanti tidak terangkut ke TPA pak” (Wawancara 5 Maret 2018).

Dari penuturan yang disampaikan Bapak IS dan Bapak LM, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kampung yang bersangkutan berkoordinasi terkait masalah sampah yang ada di wilayah setempat. Khususnya untuk hal aturan jam buang pihak Dinas Lingkungan Hidup. namun masih ada juga petugas sampah yang tidak membuang sampah sesuai dengan aturan jam buang yang telah ditetapkan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan himbuan kepada pihak Kampung untuk mengingatkan kepada petugas kendaraan pengangkut sampah untuk membuang sampah ke dalam bak TPS.

Koordinasi juga dilakukan oleh DLH kepada pihak swasta / badan usaha dan instansi pemerintah lainnya menghasilkan sampah umum yaitu sampah-

sampah yang berasal dari restoran, hotel atau perkantoran, sampah yang mereka hasilkan untuk dibuang ke bak sampah TPS terdekat yang tersedia, Berikut penuturan yang disampaikan oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, berikut ini :

“Untuk sampah umum yang dihasilkan oleh pihak swasta seperti hotel, rumah makan dan sampah yang dihasilkan oleh perkantoran instansi pemerintah kita haruskan untuk dibuang ke dalam bak sampah TPS terdekat, selanjutnya kita yang angkut ke TPA” (Wawancara 3 Maret 2018).

Dari segi koordinasi pihak Dinas Lingkungan Hidup telah menyampaikan keharusan kepada pihak swasta seperti hotel dan restoran serta instansi lainnya di perkantoran untuk membuang sampah di dalam bak sampah TPS terdekat yang tersedia, namun pada kenyataannya masih ada pihak dan masyarakat yang masih membuang sampah tidak dalam bak sampah TPS, seperti yang dituturkan oleh Bapak IR selaku sopir Truk Armrol kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke TPA berikut ini :

“Ya masih ada saja yang membuang sampah tidak tepat ke dalam bak sampah, melainkan disampingnya, terkadang memang bak sampah TPSnya sudah penuh, namun kadang-kadang masih ada juga baknya kosong tapi main buang sembarangan aja” (Wawancara 5 Maret 2018).

Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri sebenarnya telah melakukan sosialisasi agar membuang sampah pada tempatnya, seperti himbauan berbentuk spanduk ataupun baliho, namun masih ada saja yang tidak menghiraukan himbauan tersebut.

### c. Kepatuhan

Kepatuhan kelompok pelaksana dan masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan program penyelenggaraan pengelolaan sampah akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya program penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon.

Adanya kepatuhan yang baik dari aparat pelaksana maupun masyarakat atau pelaku usaha akan sangat berdampak baik terhadap implementasi program pengelolaan sampah. Ketaatan dari Dinas Lingkungan Hidup akan tercermin saat setiap aparat pelaksana menaati prosedur yang berlaku saat melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mengimplementasikan program pengelolaan sampah belum semua melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam aturan penyelenggaraan pengelolaan sampah disebutkan proses penanganan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir. Beberapa proses yang belum dilaksanakan oleh aparat pelaksana Dinas Lingkungan Hidup adalah terkait proses pemilahan sampah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Pemilahan itu mestinya sudah lewat sosialisasi dan himbauan tetapi kita sendiri masih kesulitan untuk pola pengangkutannya. Tetapi ini sudah dirintis. Kita sudah mulai menyediakan tempat sampah untuk organik sendiri, sampah anorganik sendiri. Nanti yang DLH ambil yang daun-daun, yang plastik dan kaleng diambil pemulung, inikan teori, tetapi prakteknya masyarakat pada umumnya tidak bisa seperti itu, mungkin saja masih memerlukan aturan berbentuk qanun yang memuat kebijakan atau program lebih besar” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak IS, pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menyediakan tempat sampah untuk organik dan tempat sampah anorganik, disebagian tempat tapi memang masih belum semua tempat, umumnya masih di kawasan perkantoran ataupun sekolah-sekolah dan bebarapa sarana umum, yang mana rencananya Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampah organiknya dan pemulung mengambil sampah plastiknya hasil pemilahan oleh warga. Namun untuk realitanya masyarakat belum bisa seperti itu dan Dinas Lingkungan Hidup juga masih kesulitan dalam pola pengangkutannya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Masyarakat apa sudah paham dengan masalah pemilahan sampah ini, kenyataanya pada umumnya masyarakat belum memiliki kesadaran memilah sampah itu, kecuali di kawasan yang sudah memiliki bank sampah seperti di Kampung Lot Kala, untuk masyarakat lainnya di kawasan kota ini masih harus memerlukan sosialisasi lebih lanjut terkait memupuk kesadaran atau pemahaman. Belum lagi pengangkutannya. Nanti kalau sampah dipilah, ditruknya terpaksa juga harus dicampur karena belum ada truk khusus untuk sampah-sampah yang sudah dipilah. Ya paling tidak kan kita harus punya truk khusus. Ada truk yang ngangkut sampah daun, dan ada yang ngangkut sampah plastik sendiri. Ini kan berdampak kesitu, ini yang harus kita pikirkan. Untuk pemilahan itu efektifnya di lapangan rumah tangga, kalau diangkutan belum efektif.” (Wawancara 3 Maret 2018).

Dari keterangan yang disampaikan Bapak IS, pola pemilahan oleh masyarakat belum bisa dilakukan karena harus ada upaya sosialisasi dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait pemilahan sampah ini. Kalaupun nantinya sampah sudah dipilah-pilah berdasarkan jenisnya Dinas Lingkungan Hidup belum siap terkait pola pengangkutannya karena tidak

adanya fasilitas untuk pemisahan sampah organik dan anorganik, misalnya truk untuk pengangkut sampah organik dan truk pengangkut sampah anorganik. Untuk saat ini untuk pemilahan efektif pelaksanaannya masih ditataran rumah tangga itupun harus disertai pemahaman dan kemauan dari masyarakat, sedangkan untuk diangkutan Dinas Lingkungan Hidup mengakui masih belum efektif.

Proses pemilahan sampah untuk saat ini masih belum bisa dipatuhi oleh aparat pelaksana khususnya Dinas Lingkungan Hidup di Kawasan Kota Takengon mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat proses penanganan sampah yang disebutkan dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Kota Takengon adalah proses daur ulang sampah rumah tangga dimana disebutkan memilah yakni mengelompokkan sampah rumah tangga yang berdasarkan jenisnya. Pemilahan ini harapannya bukan hanya ditataran rumah tangga saja, namun juga di pengangkutan, di TPS dan di TPA. Sehingga jelas nantinya sampah mau dimanfaatkan untuk apa. Hal lain yang harus diperhatikan dalam penanganan sampah adalah proses pengangkutan yaitu membawa sumber sampah atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Dalam hal ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh atasan. Beberapa diantaranya terkait jadwal dan rute pengambilan sampah yang dijalankan oleh pegawai angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup, Hal ini disebutkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Untuk pengangkutan sampah kita sudah melakukan sesuai dengan jam buang, untuk jalan-jalan protokol kita berangkat ke kawasan

Kota Takengon untuk mengambil jam 06.30 dan ke lokasi transit jam 09.30 dan di angkut jam 21.00 Wib ke lokasi TPA. Ya kadang ada sampai di atas jam tersebut itu hanya beberapa armada saja, paling 1-2 armada saja terlambat. Selain itu kita juga punya rute sendiri dan harus mentaati rute tersebut.” (Wawancara 3 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak SH selaku penjaga lokasi transit Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa :

“Saya selama menjadi penjaga disini memperhatikan armada pengangkut sampah yang ngambil sampah di Kota rata-rata di bawah jam 10.00 sudah terisi penuh dan sudah diparkir menunggu jam 09.00 malam, sedangkan untuk truk armrol rata-rata berangkat dari sini jam setengah 8 malam untuk ngambil kontainer sampah TPS armrol selanjutnya sama-sama jam 09.00 malam berangkat menangkut sampah ke TPA bang.” (Wawancara 5 Maret 2018).

Dari wawancara dengan Bapak IS dan Bapak SH, angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah mempunyai aturan jadwal dan rute yang telah ditetapkan oleh DLH, yaitu mulai dari jadwal pengambilan di depan pertokoan atau rumah masyarakat di jalan protokol dan TPS kontainer mini antara jam 06.30 sampai jam 09.30 di lokasi transit dan pengambilan sampah oleh truk armrol berangkat dari lokasi transit jam 19.30 untuk kemudian jam 21.00 Wib bersama-sama berangkat ke TPA.

Untuk rute dan waktu pengambilan telah ditetapkan oleh pihak DLH, walaupun sudah ditetapkan jadwal dan rute pengangkutan yang mana sebagian besar sudah ditaati oleh petugas angkutan sampah, namun ada beberapa petugas yang kadang melanggar aturan jadwal tersebut, yaitu untuk petugas angkutan sampah roda 3 yang melakukan pengangkutan sampah di lokasi timbulan sampah yang tidak terjangkau oleh armada truk, misalnya jalan-jalan atau lorong sempit. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah,

Bapak IS :

“Pengambilan sampah oleh petugas truk dari lokasi timbulan sampah itu setiap hari dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, namun untuk lokasi timbulan sampah dari rumah masyarakat pembayar retribusi yang tidak terjangkau oleh truk ini seharusnya dilakukan setiap hari oleh angkutan sampah bermesin roda 3, ini terkadang belum sepenuhnya terkontrol jadwalnya” (Wawancara 3 Maret 2018).

Masyarakat juga ada yang komplain, khususnya rumah tangga yang membayar retribusi sampah, seperti yang dituturkan oleh Ibu UI selaku warga Kampung Kemili yang tidak terjangkau oleh armada truk pengangkut sampah sebagai berikut :

“Pengambilan sampah oleh petugas sampah 3 hari sekali dik, malas kali kita kalau udah 3 hari sampah ini kan bau, maunya kan tiap hari diangkut” (Wawancara 8 Maret 2018).

Tetapi alasan berbeda juga disampaikan oleh salah satu petugas pengangkut roda 3 yang mengatakan bahwa :

“Pengambilan sampah oleh petugas sampah makanya sampai 3 hari sekali bang, karena volume sampah disini sedikit, makanya harus 3 hari baru penuh bang bak sampah kereta ini jadi biar hemat BBM bang” (Wawancara 10 Maret 2018).

Senada dengan yang disampaikan Bapak IS, Ibu YT pemilik toko pakaian pengguna jasa retribusi kebersihan yang berada di jalan protokol menggunakan angkutan truk sampah, sebagai berikut :

“Kita kumpulkan sampah di tempat sampah atau plastik dik, setiap pagi petugas truk sampah datang ngambil” (Wawancara 12 Maret 2018).

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Oleh Saudara KM, pemilik toko kelontong yang berada di sekitar kontainer TPS pintu masuk terminal jalan sengeda Takengon, sebagai berikut :

“Biasanya petugas pengangkut sampah yang pakai truk itu kesininya 1hari sekali. Ya biasanya malam selepas Isya, tapi pasti setiap harinya ambil sampah kesini bang, namun terkadang ga terangkut semua, kadang-kadang udah penuh kontainernya, kadang-kadang orang buang sampah terlalu malam pada waktu truk kontainer itu sudah berangkat, ya diletak aja disitu” (Wawancara 12 Maret 2018).

Dari keterangan yang diungkap oleh hasil wawancara nara sumber di atas disimpulkan masih ada petugas yang belum mematuhi jadwal pengambilan sampah namun umumnya untuk armada truk sudah tertib. Namun tidak serta merta hal tersebut teratasi, sebab kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di TPS pada waktu dan tempatnya juga masih kurang.

Harusnya walaupun sedikit volumenya harus tetap diangkut setiap hari, yang bertujuan agar tidak menimbulkan bau tak sedap atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh sampah. Namun jika petugas tertib secara rutin mengambil sampah Hal ini tentu saja berdampak baik pada masyarakat.

Untuk meminimalisir hal tersebut tentunya harus ada tindakan dari DLH bagi petugas yang tidak mematuhi jadwal pengangkutan sampah, Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah mengatakan :

“Kita akan mendata dulu di lokasi mana saja yang tidak mematuhi jadwal, kita cari tau dulu apa penyebabnya, jika memang itu kesalahan petugas yaitu tenaga kontrak, sanksi tegas tentunya akan dikenakan, namun sesuai prosedur harus melalui teguran dulu sebanyak 3 kali, jika masih seperti itu selanjutnya kita lakukan tindakan tegas yaitu pemutusan hubungan kerja” (Wawancara 3 Maret 2018).

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Kalau ada tugas yang belum bisa dilaksanakan masing-masing bagian atau petugas itu biasanya diadakan upaya preventif. Kita cari penyebabnya apa, lalu kita cari solusinya. Tidak cepat-cepat untuk memberikan sanksi formal, karena kita memahami permasalahan kita sangat kompleks. Kalau kita bisa kita tangani dulu secara personal” (Wawancara 13 Maret 2018).

Dari kesimpulan wawancara dengan Bapak IS dan Bapak ZK, Dinas Lingkungan Hidup telah mempunyai keputusan sanksi sendiri kepada pegawai yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera terhadap aparat pelaksana atas tindakannya melanggar aturan yang ada.

Selain dari aparat pihak pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah peran masyarakat juga sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Dengan adanya kepatuhan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya akan ikut membantu aparat pelaksana dalam proses penanganan sampah khususnya proses pengangkutan. Namun dalam realitanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini belum maksimal, mungkin dikarenakan belum ada aturan yang lebih mengikat yang lebih besar dan kuat seperti peraturan daerah atau qanun. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pembuangan sampah spesifik. Yang mana salah satu aturan yang belum ada yaitu untuk sampah spesifik berupa bongkaran bangunan, kaca dan material lainnya masyarakat sebenarnya dilarang membuang di TPS, namun langsung di buang

TPA. dikarenakan aturannya belum ada maka yang disampaikan kepada masyarakat hanya bersifat himbauan.

Selain itu ada masyarakat yang masih membuang sampah di luar TPS. Jadi tidak heran ketika di luar TPS banyak sampah berupa bongkaran bangunan ataupun sampah rumah tangga yang masih berceceran. Terkait kurangnya kesadaran masyarakat ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Untuk kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, kami rasa masih kurang, kita sudah juga melakukan himbauan-himbauan dan pemberitahuan, namun buktinya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi untuk sampah spesifik itu diletakkan begitu saja di kontainer TPS. Tapi mau bagaimana lagi, aturannya dalam bentuk qanun ini yang belum ada jadi kita tidak bisa berbuat banyak” (Wawancara 13 Maret 2018).

Hal tersebut ditambahkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Pada dasarnya sudah ada masyarakat sudah membantu. Tapi masih banyak pula yang belum memiliki kesadaran. Banyak masyarakat yang membuang di TPS itu tidak di dalam tetapi di luar. Terus sisa-sisa bangunan, kaca seharusnya tidak di buang ke TPS, tetapi kenyataannya masyarakat masih membuang sampah tersebut di TPS. Dia tidak berani buangnya siang, tetapi malam hari. Kadang buangnya di dalam tapi kadang ada juga yang di luar, jadi di TPS itu kanan kirinya tidak pernah bersih.” (Wawancara 3 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Saudara IR salah satu Sopir Truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Kita sering mendapatkan sampah yang bukan sampah rumah tangga, seperti batu-batuan bongkaran bangunan, kaca, kayu. Harusnya sampah tersebut langsung dibuang ke TPA, tapi karena udah di TPS ini ya terpaksa kita angkat bang” (Wawancara 13 Maret 2018).

Dari hasil wawancara dengan Bapak ZK, Bapak IS dan Saudara IR, dikarenakan kesadaran masyarakat, jenis sampah spesifik yang mana seharusnya tidak boleh dibuang ke tempat penampungan sementara namun langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi DLH tidak bisa berbuat banyak karena aturan tentang sampah spesifik tersebut memang belum ada.

d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan atau program

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program merupakan hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan atau program secara keseluruhan, baik atau buruknya dampak yang ditimbulkan tersebut berbanding lurus dengan bagaimana kebijakan atau program tersebut dilaksanakan, dalam hal pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon diharapkan berdampak baik terhadap lingkungan terutama aspek kebersihan, seperti yang disampaikan oleh Bapak ZK, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Anda bisa lihat sendiri sekarang kawasan Kota bersih kan? Untuk hal-hal lain kita mengharapkan dengan program pengelolaan sampah ini dapat membantu pelestarian lingkungan, membantu menjaga kesehatan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan dapat meningkatkan kualitas kebersihan di Kota Takengon dalam menunjang Kota Takengon meraih Adipura” (Wawancara 13 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu YT, selaku masyarakat yang tinggal di kawasan Jalan Sengeda Takengon, yang mengatakan bahwa :

“Dampaknya tentu saja baik dan bersih untuk lingkungan, bisa kita bayangkan kalau tidak ada pengelolaan sampah dari pemerintah, kita harus buang sendiri sampah-sampah kita ini, kan repot” (Wawancara 12 Maret 2018).

Lebih dari itu, diharapkan dampak yang positif lainnya dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dari program pengelolaan sampah ini yaitu kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga, seperti yang diungkapkan oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya program pengelolaan sampah ini dapat merubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dampak tersebut dapat dirasakan langsung oleh Ibu UI selaku masyarakat yang sudah terbiasa mengumpulkan sampah untuk diletakkan di depan tokonya, berikut ungapannya :

“Dengan adanya pelayanan sampah ini, kami jadi terbiasa untuk mengumpulkan sampah dari rumah dan halaman sekitar untuk dikumpulkan di depan toko setiap hari” (Wawancara 8 Maret 2018).

Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPS kurang baik, terutama masalah bau yang ditimbulkan dan pemandangan yang tidak menyenangkan ketika sampah-sampah tercecer di luar TPS, seperti yang diungkapkan Bapak KM selaku masyarakat yang tinggal di sekitar TPS terminal bus lama berikut ini :

“Ya itu dik baunya tadi yang tidak enak, apalagi kalau musim hujan baunya lebih menyengat, pemandangan juga tidak enak kalau sampahnya kececeran, maunya kita kan jangan ada disini lah TPSnya tapi mau bagaimana lagi kita semua kan butuh TPS atau paling kurang ditutuplah kontainernya” (Wawancara 12 Maret 2018).

Hal senada juga diutarakan oleh Saudara IW selaku Masyarakat Pedagang di sekitar TPS Pasar Inpres Takengon sebagai berikut :

“Baunya tadi bang yang tidak enak, apalagi sampahnya ini seringnya yang dibuang itu sudah busuk jadi lalatnya banyak sekali disini bang, tetapi mau bagaimana lagi kita sudah terbiasa dengan baunya tiap hari kita hirup” (Wawancara 12 Maret 2018).

Untuk pengolahan sampah di TPA, diakui oleh Bapak AH selaku kepala UPTD TPA Uwer Tetemi bahwa pihaknya memiliki kekhawatiran tentang dampak yang ditimbulkan oleh TPA terhadap lingkungan, dikarenakan letak TPA yang kurang jauh dari pemukiman masyarakat, berikut ungkapannya :

“Dampaknya untuk saat ini, lalat akan banyak sekali sampai ke pemukiman warga, jika terlalu lama tidak disemprot anti lalat oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan. Dan saya khawatir suatu saat nanti kegiatan di TPA ini dapat mencemari sumber air untuk masyarakat, karena memang letak TPA ini kurang jauh dari pemukiman warga” (Wawancara 15 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Memang kita akui TPA Uwer Tetemi masih terlalu dekat dengan pemukiman warga dan letaknya juga tepat di bawah jalan menuju salah satu kampung di Kecamatan Silih Nara, kita mengkhawatirkan memang nanti ada dampak tidak baik terhadap kesehatan Masyarakat, tetapi mau bagaimana lagi untuk saat ini lokasi itu yang ada, untuk kedepan kita juga sedang memikirkan untuk mencari lokasi yang betul-betul memenuhi untuk keberadaan TPA” (Wawancara 13 Maret 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program pengelolaan sampah yang ada saat ini, di satu sisi telah memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi di sisi lain yaitu pada letak TPA yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat masih menimbulkan kekhawatiran meskipun teknik pengelolaan sampahnya menggunakan teknik *sanitary landfill* yang telah memenuhi standar lingkungan.

## 2. Identifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Program Pengolahan Sampah

Adapun faktor-faktor penentu implementasi program pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon dijadikan suatu indikator yang berpengaruh dan memberikan kontribusi. Faktor-faktor yang dibahas berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program atau kebijakan atau program sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III, Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut akan dijelaskan satu per satu faktor tersebut.

### a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif ditandai dengan aparat pelaksana dalam hal ini khususnya aparat Dinas Lingkungan Hidup harus memahami benar apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara jelas, serta petunjuk pelaksanaan yang dipahami harus jelas. Disamping itu program atau kebijakan atau program juga harus konsisten. Beberapa hal yang menjadi efektif tidaknya komunikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan atau program salah satunya adalah transmisi. Dalam melaksanakan kebijakan atau program penyelenggaraan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup merujuk pedoman teknis atau SOP pengelolaan sampah menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan. Namun dalam realitanya hanya sebagian kegiatan pengurangan sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan penjelasan hasil sebelumnya di hal siapa yang mengimplementasikan. Pada program pengelolaan sampah urusan

sampah dari hulu ke hilir dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 jelas disebutkan bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha seperti pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Khususnya untuk kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah, selama ini yang menangani kegiatan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup, selain itu sekarang dalam keputusan Bupati Aceh Tengah nomor : Tahun 2017 Tupoksi untuk masalah sampah berada di Dinas Lingkungan Hidup.

Terkait masalah penanganan sampah khususnya pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju ke TPA, dan di TPA sampah tersebut diolah. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Ya memang untuk peraturan daerah atau qanun pengelolaan sampah ini belum ada, namun menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 itu jelas menyebutkan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah itu kan pemerintah, ya kalau di takengon ini kan Dinas Lingkungan Hidup selaku SKPK Aceh Tengah dikuatkan lagi melalui Tupoksi SKPK, untuk sekarang memang belum secara jelas pembagian wewenangnya, namun ke depan kita wacanakan semua pengelolaan sampah di kampung itu diserahkan ke kampung, nanti yang ke TPA itu baru mutlak kita yang tangani, untuk saat ini sudah ada juga beberapa kampung yang telah melaksanakan pengangkutan ke TPS.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Hal ini ditanggapi oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang menjelaskan :

“Untuk tupoksinya kita kan sudah diatur dalam keputusan Bupati. Dalam Undang-undang juga sudah jelas pengelolaan sampah

menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kalau di Takengon ini ya DLH, ada beberapa kampung yang juga sudah mengelola sampah sendiri namun kebanyakan masih sebatas pengangkutan ke TPS.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak ZK dan Bapak IS dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pengelolaan sampah menjadi wewenang mutlak dari DLH namun ada beberapa kampung yang sudah mengelola sampah sendiri terutama masalah pengangkutan ke TPS, namun sejauh mana peran kampung dalam pengelolaan sampah ini belum secara jelas batas-batasnya.

Belum adanya peraturan daerah atau qanun, mengakibatkan belum ada kejelasan siapa yang akan meneruskan perintah ini setelah pemerintah daerah, karena makna pemerintah daerah begitu luas selain itu bagaimana dan kapan suatu kebijakan atau program dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan juga belum dijelaskan secara rinci atau bersifat kabur.

Ketidajelasan pesan komunikasi yang berkenaan dengan implementasi program dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Untuk itu dibutuhkan segera aturan penjabar dalam bentuk peraturan daerah atau qanun kabupaten yang salah satunya merinci secara detail kepada siapa, kapan dan bagaimana kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah di implementasikan.

Sedangkan faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap proses komunikasi kebijakan atau program adalah konsistensi. Dalam pedoman teknis pengelolaan sampah rumah tangga menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan sampah tidak hanya bagaimana menangani sampahnya namun ada juga kegiatan pengurangan

sampah. Namun belum ada penekanan kepada pihak terkait termasuk masyarakat dalam program tersebut, ini tidak lain karena regulasinya belum ada.

Di sisi lain ada juga masyarakat sudah mulai inisiatif untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan memanfaatkan sampah menjadi barang-barang kerajinan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lot Kala Kecamatan kebayakan, meskipun jumlahnya belum begitu signifikan terhadap total timbunan sampah, namun ini dinilai baik.

Hal ini sesuai pernyataan Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Ya.. kita sangat mengapresiasi upaya masyarakat dalam upaya pengurangan sampah seperti yang dilakukan oleh Kampung Lot Kala, meskipun jumlahnya belum begitu signifikan namun ini bernilai positif, nantinya kalau regulasinya sudah ada, kita dapat lebih menekankan pengelolaan sampah di kampung tersebut menjadi tanggung jawab kampung, termasuk juga income nya, baik retribusi ataupun penghasilan lain dari pengelolaan sampah tersebut, sedangkan pengurangan sampah lainnya itu masih dilakukan pemulung” (Wawancara 13 Maret 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak ZK dapat disimpulkan selama ini terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sampah khususnya terkait masalah pengurangan sampah tersebut karena belum ada regulasi yang melibatkan pihak terkait termasuk masyarakat. Namun sudah ada masyarakat yang juga sudah berpartisipasi dalam pengurangan sampah ini.

Terkait dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah diungkapkan oleh Kepala Kampung Lot Kala Bapak KG :

“.. Bisa dibbilang kita membelinya dari masyarakat. Untuk sampah yang bisa didaur ulang atau kita jual kembali ke pengepul itu sekitar 800 kg hingga 1 ton per minggu .” (Wawancara 14 Maret 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak KG bahwa sudah ada upaya masyarakat dalam program pengelolaan sampah khususnya masalah pengurangan sampah namun yang sudah berjalan memang masih di Kampung Lot Kala Kecamatan Bebesen.

#### b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu indikator menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kebijakan atau program. Walaupun perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan baik, namun ketika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumberdaya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan atau program. Beberapa sumberdaya sebagai penentu faktor keberhasilan atau faktor kegagalan dari kebijakan atau program dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon, yaitu :

##### 1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau program adalah staf (pegawai). Pada saat kebijakan atau program sudah diimplementasikan penyebab adanya ketidakberhasilan dari implementasi tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan penguasaan staf yang tidak memadai dan tidak kompeten, selain itu karena jumlah staf yang tidak mencukupi.

Dalam kaitannya penyelenggaraan sampah di Kawasan Kota Takengon yang mana tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah. Untuk pengangkutan sampah sehari-harinya menjadi tanggungjawab dari seksi angkutan sampah dan untuk seksi pengelolaan sampah

mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan pengolahan sampah di kawasan Kota Takengon.

Untuk menunjang kegiatan pengangkutan sampah, Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah mempunyai sumber daya staf atau pegawai yang terdiri 14 orang pengemudi truk sampah, 7 orang kendaraan roda 3 dan terdapat 35 orang tenaga pengangkut serta 1 orang koordinator lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.8.**  
**Jumlah Personil Angkutan Sampah**

No.	Personil	Jumlah
1	Pengemudi Truk Sampah	14
2	Pengemudi Roda 3	7
3	Tenaga Pengangkut	35
4	Koordinator Lapangan	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Jumlah personil yang tertera dalam tabel tersebut sudah sesuai dengan jumlah peralatan yang ada, namun sekiranya ada penambahan peralatan tentunya personil tersebut masih kurang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Ya untuk personil angkutan sampah ini sudah mencukupi sesuai peralatan yang ada, kalau untuk peralatan seperti dump truk yang masih kurang, jadi kalau nantinya truknya ditambah ya personilnya juga tentunya harus ditambah.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Bapak MZ :

“Kalau jumlah staf sementara ini tercukupi, karena memang peralatannya segitu dan mungkin jumlah beban jumlah kerjanya sedikit lebih karena memang peralatannya yang kurang.”  
(Wawancara 3 Maret 2018)

Kesimpulan dari wawancara Bapak IS dan Bapak MZ adalah jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian angkutan sampah sudah mencukupi namun kendalanya di peralatan masih perlu adanya tambahan, tentu saja hal ini berpengaruh terhadap besarnya beban kerja yang diterima oleh Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun.

Adapun armada, sopir dan jumlah tenaga pengangkut sampah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.9.**  
**Armada dan Jumlah Tenaga Pengangkut Sampah**

No.	Armada	Nama Sopir	Jumlah Tenaga Pengangkut	Keterangan
1	BL 8032 GB	SUNARYO	2	Dump Truk
2	BL 8023 AM	KAUSAR MAHRAJA	2	Dump Truk
3	BL 8032 AM	SUMARNO	2	Dump Truk
4	BL 8027 AM	KARMIN	2	Dump Truk
5	BL 8029 AM	DEDI IRWAN	2	Dump Truk
6	BL 8024 AB	SH. Z	2	Dump Truk
7	BL 8049 GB	HERIANTO	2	Dump Truk
8	BL 8017 G	USIA FAZRI	2	Dump Truk
9	BL 8015 GB	SAMSUL BAHRI	2	Dump Truk
10	BL 8026 G			Dump Truk (Rusak Berat)
11	BL 8027 GB	PANG	2	Truk Armroll
12	BL 8028 GB	NASUTION	2	Truk Armroll
13	BL 8047 GB	IR	2	Truk Armroll
14	BL 8057 GB	GADUNG	2	Truk Armroll
15	BL 8012 GB	ARWINSYAH	2	Truk Armroll
16	BL 8017 GB			Truk Armroll (Rusak)

				Berat)
17	BL 8013 GB			Truk Armroll (Rusak Berat)
18	BL 2521 GC	SURATMAN	1	Kendaraan R3 Bermesin
19	BL 2522 GC	LM	1	Kendaraan R3 Bermesin
20	BL 2523 GC	GEMA SATRIA	1	Kendaraan R3 Bermesin
21	BL 2524 GB	ZIKRA	1	Kendaraan R3 Bermesin
22	BL 2525 GB			Kendaraan R3 Bermesin (Rusak Berat)
23	BL 2753 GC	LM	1	Kendaraan R3 Bermesin
24	BL 2755 GC	MUKLIS	1	Kendaraan R3 Bermesin
25	BL 2754 GC	INDRA BUDIMAN	1	Kendaraan R3 Bermesin
	JUMLAH		35	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk armada truk memiliki 2 tenaga pengangkut dan untuk kendaraan bermesin roda 3 memiliki 1 tenaga pengangkut.

Selanjutnya untuk petugas pengelola sampah di TPA Uwer Tetemi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.10.**  
**Personil di TPA Uwer Tetemi**

No.	Personil	Jumlah
1	Kepala UPT TPA	1
2	Operator alat berat	2
3	Tenaga Pembersih	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk jumlah personil di Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun untuk

personil pengangkutan sampah sudah mencukupi, hal ini akan berpengaruh pada pemaksimalan jumlah sampah yang diangkut dari TPS ke TPA.

Lain halnya dengan kondisi personil yang ada di UPTD pengelolaan sampah di TPA. Menurut hasil wawancara yang dilakukan jumlah personil yang ada di seksi pengolahan sampah belum mencukupi sesuai dengan besarnya beban kerja yang diterima. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT TPA Uwer Tetemi Bapak AH :

“Kalau sumberdaya manusianya untuk alat operator alat berat 2 orang itu belum cukup rasanya, karena mereka masuk tiap hari tanpa ada pergantian atau *shift* kalau bisa ditambah 2 orang operator lagi sesuai beban kerjanya, juga saya takutnya terkait dengan kesehatan operator ini, jika tanpa istirahat dan terlalu capek ditambah lagi menghirup zat beracun dari sampah-sampah ini.” (Wawancara 15 Maret 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak AH, menunjukkan bahwa untuk di TPA jumlah personil operator alat berat belum mencukupi sesuai dengan beban kerja dan kondisi yang ada dalam proses kegiatan pengelolaan sampah di TPA Uwer Tetemi. Tentunya bukan hanya jumlah staf yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan atau program. Kualitas personil tersebut juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi sebuah kebijakan atau program. Salah satu hal yang paling mudah dinilai terkait kualitas dari staf yang ada dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dalam menjalankan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan, mulai dari tingkat SLTP hingga S3. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.11.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	5
3	S1	17
4	SLTA	15
5	SLTP	8
	<b>Jumlah Total</b>	<b>46</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Kondisi staf atau pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Menunjukkan bahwa dominasi tingkat pendidikan dari pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Kota Takengon adalah S1 dan SMA. Dengan jumlah 17,39 % berlatar belakang pendidikan SLTP; 32,61 % berlatar belakang SLTA; dan 36,96 % berlatar belakang S1. Sedangkan yang berpendidikan S2 dan S3 masing-masing sebesar 10,87% dan 2,17 %. Dengan banyaknya pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1 dan SLTA, maka seharusnya sebanding dengan banyaknya pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas., namun untuk tenaga kontrak umumnya didominasi oleh tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dalam implementasi program tentang pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon, jumlah banyaknya tenaga kontrak dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.12.**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	110
2	SLTP	130
3	SLTA	53
4	D3	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>294</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

## 2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan atau program. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan atau program. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan atau program harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan atau program. Lebih lanjut hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Bapak IS :

“Dari Pemerintah Kabupaten sudah mendisposisikan Tupoksi tentang pengelolaan sampah kepada kami. Karena SKPK menurut keterangan Tupoksi tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ya kami menjalankan tugas dengan menyesuaikan keputusan tersebut.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari penjelasan yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak IS tersebut dapat diketahui Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memberikan Tupoksi dalam bentuk Surat Keputusan tentang pengelolaan sampah kepada dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dan hal ini dibenarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang akan menjalankan tugas-tugasnya dengan berdasar pada keputusan tersebut.

Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksana kebijakan atau program mentaati pedoman ataukah tidak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Cuma kalau pemahaman terhadap peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang misalnya, masih kurang, namun kalau pedoman teknis yang ada sudah cukup baik. Sosialisasi atau himbauan tentang pengelolaan sampah yang ada sekarang ini kan sudah dan sedang kita lakukan juga, namun untuk retribusi sampah sesuai qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2010 itu sudah berjalan cukup baik, nah sekarang masalahnya di pengelolaan ini yang masih kita tunggu qanunnya” (Wawancara 13 Maret 2018)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak IS, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Untuk saat ini pedoman teknisnya kan sudah ada, untuk pemahaman personil saya rasa cukup memahami. Cuma masalahnya di qanunnya ini belum ada jadi pemahamannya terhadap pedoman teknis yang ada dulu ” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari wawancara dengan Bapak ZK dan Bapak IS, untuk pemahaman personil terhadap pedoman teknis dan peraturan yang ada termasuk qanun retribusi itu sudah cukup baik.

### 3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan menjamin bahwa program atau kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan atau program. Dalam implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon wewenang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan sebagian pihak kampung yang telah memiliki kendaraan angkutan sampah yang bertugas dalam proses penanganan sampahnya khususnya kegiatan pengumpulan sampah yang

“Cuma kalau pemahaman terhadap peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang misalnya, masih kurang, namun kalau pedoman teknis yang ada sudah cukup baik. Sosialisasi atau himbauan tentang pengelolaan sampah yang ada sekarang ini kan sudah dan sedang kita lakukan juga, namun untuk retribusi sampah sesuai qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2010 itu sudah berjalan cukup baik, nah sekarang masalahnya di pengelolaan ini yang masih kita tunggu qanunnya” (Wawancara 13 Maret 2018)

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak IS, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Untuk saat ini pedoman teknisnya kan sudah ada, untuk pemahaman personil saya rasa cukup memahami. Cuma masalahnya di qanunnya ini belum ada jadi pemahamannya terhadap pedoman teknis yang ada dulu ” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari wawancara dengan Bapak ZK dan Bapak IS, untuk pemahaman personil terhadap pedoman teknis dan peraturan yang ada termasuk qanun retribusi itu sudah cukup baik.

### 3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan menjamin bahwa program atau kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan atau program. Dalam implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon wewenang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan sebagian pihak kampung yang telah memiliki kendaraan angkutan sampah yang bertugas dalam proses penanganan sampahnya khususnya kegiatan pengumpulan sampah yang

dilakukan oleh petugas sampah di bawah pengawasan kampung setempat. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dalam hal peralatan khususnya alat berat, sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan kinerja tiap-tiap bagian yang bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Namun sangat disayangkan ketika dalam pedoman teknis yang ada termasuk upaya pengurangan sampah tersebut. Hal ini masih menjadi tidak jelas karena dalam pedoman teknis tersebut tidak jelas disebutkan kepada siapa wewenang pengurangan sampah ini dilimpahkan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih besar dan kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Sementara ini, yang ada sekarang ini pengurangan sampah justru dilakukan oleh pemulung dan sebagian petugas pengangkut sampah yang ingin mencari tambahan dan ada juga kampung yang secara swadaya dan swakelola melakukan pengurangan sampah ini. Dengan demikian untuk kegiatan pengurangan sampah pembagian wewenang belum berjalan dengan baik.

#### 4) Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Adanya fasilitas yang memadai mempermudah aparat pelaksana untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, seksi pengelolaan sampah membutuhkan adanya fasilitas yang memadai agar proses pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir bisa berjalan efektif.

Selanjutnya dalam hal ini armada pengangkutan sampah berupa truk sampah menjadi modal utama bagi pegawai seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk menjalankan kegiatan pengangkutan sampah setiap harinya. Jumlah truk angkutan sampah sebanyak 14 Unit dan kendaraan roda 3 sebanyak 7 Unit yang beroperasi dianggap belum memadai, karena jumlah truk belum sebanding dengan jumlah perjalanan dari TPS ke TPA dengan rata-rata 19 trip/hari dan jumlah kendaraan roda 3 tidak sebanding dengan jumlah kampung terlayani sebanyak 34 kampung. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“Hambatannya di sarana prasarana. Jadi mungkin karena keterbatasan truk. Idealnya kita harus ada 19 truk yang beroperasi sehingga tidak ada keterlambatan waktu pengangkutan ke lokasi transit dan untuk roda 3 sesuai jumlah kampung terlayani harusnya kita memiliki 34 unit untuk masing-masing kampung.”  
(Wawancara 3 Maret 2018)

Adapun fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 4.13.**  
**Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan / Persampahan**

No	Nama Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Truck (Unit)	10	1 Unit rusak berat (tidak beroperasi)
2	Truck Amrol (Unit)	7	2 Unit rusak berat (tidak beroperasi)
3	Truck Tinja (Unit)	2	
4	R3 Bermesin (Unit)	8	1 Unit rusak berat (tidak beroperasi)
5	Kontainer Besar	14	
6	Kontainer Mini	33	
7	Bak sampah beton	2	
8	Alat Berat (Unit)	2	
9	Tong sampah piber (Krisbo 100 Liter)	68	
10	Tong sampah piber (Krisbo 600 Liter)	9	
11	Tong sampah piber untuk sekolah (pasang)	219	
12	TPA	1	
13	IPLT	1	
14	Gudang Transit	1	
III	Sarana dan Prasarana Pertamanan		
1	Kren Lampu	1	
2	Tangki air	1	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Perlu juga ada peningkatan armada truk yang dimiliki. Karena masih belum sesuai dengan jumlah perjalanan pengangkutan sampah per hari. Roda 3 juga harus ditambah sesuai jumlah kampung, kemudian untuk sarana di TPA seperti kantor dan bengkel juga harus ada serta peralatan pengolahan sampah berteknologi seperti komposter juga kita belum punya .”  
(Wawancara 13 Maret 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak MZ selaku Kepala Seksi

Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Tengah :

“Terutama untuk angkutan sampah sarannya harus ditambah misalnya truk dan roda 3 itu masih kurang, kontainer TPS juga

ada yang kondisinya tidak baik, sudah diperbaiki berkali-kali juga rusak lagi, sudah karatan, jadi harus diganti.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari hasil wawancara dan data tabel diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan adanya penambahan jumlah armada truk sampah. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan jumlah perjalanan angkutan sampah per hari. Selain itu kondisi 17 unit truk yang tidak semuanya dalam kondisi baik yang mana hanya 14 unit truk sampah saja yang dalam kondisi baik dan dapat beroperasi optimal. Untuk roda 3 dari 8 unit juga ada 1 unit yang rusak berat dan tidak beroperasi.

Selain perlunya penambahan jumlah maupun peremajaan truk dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi tempat penampungan sementara sampah baik kontainer TPS yang ada di kawasan Kota Takengon. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat agar sampah di sekitar tempat pembuangan sementara itu tidak menimbulkan bau yang menyengat dan sampah yang ada di tempat pembuangan sementara tersebut tidak berceceran hingga ke jalan-jalan.

Berikut adalah tanggapan yang dikemukakan oleh Saudara IW, salah satu pedagang sembako di dekat kontainer TPS Pasar Inpres Jalan Sengeda Takengon :

“Kami sudah biasa dengan bau dari kontainer TPS itu. Tapi ya kalau bisa tidak menimbulkan bau. Sekarang ini rasanya tiap hari bau sampahnya menyengat bang, apalagi sampah disini umumnya kan dari pedagang sayur mayur dan ikan kadang-kadang sudah membusuk, tapi walau bagaimanapun kita tetap butuh TPS.” (Wawancara 12 Maret 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saudara KM, pedagang kelontong di depan kontainer TPS Terminal Bus Lama Takengon :

“Yang namanya sampah sudah pasti bau dik, tapi yang saya inginkan kalau bisa sampah yang ada di kontainer ini tidak tercecer kemana-mana.” (Wawancara 12 Maret 2018)

Adanya beberapa keluhan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar TPS, mengenai kondisi TPS dibenarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh tengah melalui Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

“Ya memang TPS yang ada saat ini masih banyak yang mengganggu masyarakat. Untuk tuntutan masyarakat kalau sampah kan tidak mengganggu, tapi kita kan memang belum mampu untuk penyediaan fasilitas untuk TPS seperti di negara-negara maju yang sudah menerapkan teknologi tinggi karena butuh dana yang besar. selain dana tinggi juga butuh lahan yang luas. Jadi ini masih sedang dipelajari dan dicari solusi supaya penerapan kebijakan atau program ini tidak menjadi gangguan masyarakat atau dengan kata lain bisa memenuhi keinginan masyarakat agar tidak terjadi keluhan-keluhan tersebut.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak ZK, beliau mengakui bahwa kondisi TPS saat ini masih meresahkan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPS. Dari Dinas Lingkungan Hidup pun sedang mempelajari mengatasi permasalahan agar sampah tidak bau dan berceceran, namun untuk menjalankan hal tersebut tidaklah mudah karena dibutuhkan dana yang cukup besar dan lahan yang luas untuk setiap TPSnya. Untuk permasalahan ini, dari Dinas Lingkungan Hidup masih mencari solusi yang tepat dan realistis untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Tidak hanya dari pengangkutan sampah yang mengalami permasalahan terkait fasilitas, hal serupa juga terjadi pada pengelolaan sampah di TPA terkait fasilitas pengolahan sampah di TPA Uwer Tetemi.

Kemudian untuk teknik pengolahan sampah *sanitary landfill* yang dilakukan di TPA selama ini memang sudah memenuhi standar pengendalian dampak

lingkungan, namun fasilitas lain seperti kantor dan perbengkelan juga belum ada seperti hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak ZK :

“Untuk sistem pengolahan sampah di TPA Uwer Tetemi dengan teknik *sanitary landfill* yaitu penyebaran, penimbunan dan pemadatan menggunakan alat berat sudah memenuhi standar, namun untuk fasilitas lain seperti kantor dan fasilitas bengkel itu belum ada, memang ini juga menjadi satu kendala Kota Takengon untuk mendapatkan adipura.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Adapun kebutuhan dasar yang ada pada TPA Uwer Tetemi berupa alat berat untuk melaksanakan pengolahan sampah akhir seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 4.14.**  
**Alat Berat pada TPA Uwer Tetemi**

No	Jenis	Type	Tahun	Kondisi
1	Bulldozer	Komatsu D68 ESS-12 EQ	2015	Baik
2	Excavator	Komatsu PC200-GMO	2015	Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Kota Takengon memiliki 2 alat berat yang terdiri dari 1 excavator dan 1 bulldozer. Untuk kondisinya dapat beroperasi dengan baik. Dan menurut hasil wawancara dengan Bapak ZK, pada saat ini dengan alat berat yang ada pengolahan sampah pada TPA Uwer Tetemi menggunakan teknik *sanitary landfill* sudah memenuhi standar, namun untuk fasilitas lain seperti kantor, dan bengkel, belum ada.

Sedangkan Bapak AH menyampaikan hal yang sedikit berbeda yaitu disamping kantor dan bengkel, diperlukan penambahan 1 unit alat berat berupa *compactor* dengan tonase besar yang berfungsi memadatkan tanah yang digunakan untuk menimbun tumpukan sampah dan kendaraan *pick up* yang khusus difungsikan sebagai kendaraan untuk mendistribusikan bahan bakar

minyak alat berat di lokasi TPA, selengkapnya dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak AH selaku Kepala UPTD Uwer Tetemi :

“Kantor dan bengkel memang belum ada dan kita butuhkan itu sebagai pusat operasional TPA ini, sedangkan untuk kendaraan, kita butuh 1 unit alat berat berupa *compactor* yang berat untuk memadatkan tanah penimbun sampah agar lebih padat lagi serta 1 unit lagi kendaraan *pick up* untuk mengantar logistik BBM alat berat disini.” (Wawancara 15 Maret 2018)

Sedangkan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dimiliki yaitu TPA Uwer Tetemi digunakan untuk menampung sampah dari seluruh wilayah 5 kecamatan di Kawasan Kota Takengon. TPA Uwer Tetemi memiliki luas sekitar 3 hektar, yang efektif terpakai untuk pengolahan atau penimbunan sampah seluas 2,5 hektar dan untuk fasilitas IPLT seluas 0,5 hektar. Rincian masing- masing luas lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.15.**  
**Luas TPA Uwer Tetemi**

No.	Keterangan	Luas (ha)
1	Lahan efektif	2,5
2	Lahan tidak efektif	-
3	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	0,5
4	Kantor, garasi, jalan, saluran drainase	-
Jumlah		3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Lahan efektif untuk pembuangan/pemrosesan akhir seluas 3 ha yang tertera dalam tabel di atas dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ini terpakai sekitar 0,3 hektar dengan ketinggian sekitar 5 meter dari titik dasar, timbunan sampah tersebut masih bisa ditinggikan dari dasar tanah hingga 8 meter Jadi diperkirakan TPA Uwer Tetemi bisa dipergunakan hingga tahun 2030. Namun

sesuai hasil wawancara dengan Bapak ZK, fasilitas pendukung di TPA seperti kantor dan bengkel belum ada, sehingga meskipun teknik pengolahannya sudah standar tetap saja menjadi kendala Kota Takengon untuk meraih adipura.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam program pengelolaan di kawasan Kota Takengon, di sana sini masih banyak kekurangan fasilitas dan sarana yang diperlukan, namun konsekuensi dari itu semua masih ditemukan kendala klasik yaitu masalah pendanaan, diperlukan dana yang tidak sedikit untuk memenuhinya, seperti yang disampaikan Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah berikut ini :

“Kita harus mengakui memang di sana-sini masih banyak kekurangan fasilitas dan peralatan, namun kita juga harus memaklumi bahwa untuk memenuhi hal tersebut diperlukan pendanaan yang tidak sedikit, ini masih menjadi kendala klasik kita bersama.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Dapat dimaklumi, kendala tersebut masih menjadi masalah bersama dikarenakan prioritas pemerintah daerah pada khususnya dan pemerintah pada umumnya bukan hanya pada pengelolaan sampah, namun juga permasalahan lainnya seperti masalah kesejahteraan sosial, moneter dan lain-lain.

#### c. Disposisi

Sebelum program penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon diimplementasikan, terlebih dahulu harus ada respon yang baik dari aparat pelaksana, respon tersebut akan dapat mempengaruhi kemauan aparat pelaksana untuk dapat melaksanakan program penyelenggaraan pengelolaan sampah. Selama ini respon dari aparat pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini juga merupakan program dari Pemerintah Kabupaten

sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Respon dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak diabaikan, apabila sudah mendapatkan tugas cepat untuk dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan bahwa :

“Respon pegawai dan petugas sangat baik, kalau sudah ada tugas untuk melaksanakan pekerjaan segera cepat-cepat dilaksanakan.”  
(Wawancara 13 Maret 2018)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak MZ :

“Sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kan tidak mungkin dia abaikan.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap program penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pemahaman terhadap program penyelenggaraan pengelolaan sampah tergantung pada latar belakang pendidikan dari setiap pegawai dan petugas, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan pegawai menginterpretasikan secara berbeda-beda pula, secara umum pemahaman pegawai dan petugas cukup baik, tapi terdapat beberapa pegawai dan petugas yang kurang memahami.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah:

“Pegawai atau petugas itukan latar belakang pendidikannya berbeda-beda jadi mereka menginterpretasikan berbeda-beda, umumnya mereka memahami tapi ada beberapa yang kurang memahami, tergantung intepretasi masing-masing.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak IS :

“SDMnya kita kan tidak sama, jadi sumber daya yang kita hadapi itu kan beragam, umumnya itu baik tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya sesekali ada lah kesalahan. Bahkan yang pendidikannya tinggipun ada juga. Tidak kita pungkiri itu.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Adanya respon dan pemahaman terhadap implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah akan membantu untuk mengetahui intensitas dari aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program penyelenggaraan pengelolaan sampah. Intensitas dari aparat pelaksana tersebut ditunjukkan dengan selalu aktifnya setiap aparat pelaksana untuk mendukung program penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik kegiatan pengangkutanya maupun pengolahannya. Sebagai pegawai Dinas Lingkungan Hidup para pegawai harus melaksanakan tugasnya sesuai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Aparat Pemerintah telah memiliki tupoksi sehingga tanggung jawab terhadap visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Berikut ini penuturan oleh Bapak IS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah :

“Bentuk tanggung jawab tentunya sudah melekat sesuai dengan tupoksinya masing-masing.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak MZ :

“Pegawai selalu aktif untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah itu baik pengangkutan maupun pengolahannya, sebagai pegawai dan petugas di DLH tetap harus melaksanakan sesuai visi misi DLH.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari hasil wawancara-wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon dari aparat pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sampah, semakin baik respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana akan semakin baik pula pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sampah. Respon yang diberikan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, namun pegawai juga harus mampu mengembangkan kreatifitas dan kompetensinya sehingga pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sampah akan berjalan semakin baik lagi.

Adanya pegawai dengan latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi pemahamannya terhadap program penyelenggaraan pengelolaan sampah, sehingga pegawai membutuhkan bimbingan teknis untuk dapat lebih mengasah kemampuan dan pengetahuannya, walaupun tidak sedikit pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kekurangpahaman pegawai yang berkompotensi kurang baik akan dapat ditutupi oleh kerjasama tim yang baik dari masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan adanya respon yang baik terhadap

program penyelenggaraan pengelolaan sampah juga akan membawa pengaruh terhadap intensitas aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program penyelenggaraan pengelolaan sampah, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sampah disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masih berjalan sesuai dengan tupoksinya.

#### d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan atau program. Struktur birokrasi dapat mencerminkan arah hubungan, garis komando dan alur koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Struktur birokrasi meliputi dua aspek, antara lain ketersediaan pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Pedoman teknis atau Standar operasional prosedur menjadi sesuatu yang penting dalam implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon, pedoman teknis atau SOP implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah para pejabat yang menjadi informan menunjuk pada Tupoksi sesuai keputusan Bupati Aceh Tengah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak IS selaku Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan bahwa :

“Yang menjadi acuan kita dalam pengelolaan sampah selama ini memang Tupoksi sesuai Keputusan Bupati dan pedoman teknis pengelolaan sampah itu sendiri yang memuat tata cara pengelolaannya. Khusus untuk retribusi sampah kita sudah berpedoman pada qanun nomor 4 Tahun 2010 .” (Wawancara 3 Maret 2018)

Penjelasan dalam wawancara tersebut di atas lebih menunjuk pada gambaran esensi dari Tupoksi dan pedoman teknis pengelolaan sampah yang belum menjelaskan secara rinci tentang keterlibatan semua pihak terkait. Dalam wawancara lebih lanjut dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun, Bapak MZ menjelaskan :

“Untuk pengelolaan sampah tahun 2016/2017 aturan berupa qanun untuk memperkuat keterlibatan pihak terkait dan masyarakat kan belum ada, kita tunggu sajalah nanti qanun tersebut, disana nanti sudah jelas masalah wewenang, tanggungjawab dan hal-hal lain mengenai pengelolaan sampah ini.” (Wawancara 3 Maret 2018)

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak MZ, untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup belum punya ukuran dasar prosedur kerja yang jelas, tegas dan rinci terkait pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon. Sementara, para informan kategori staf dan petugas lapangan mengaku tidak memperdulikan tentang adanya rencana penetapan Peraturan Daerah ataupun rencana akan dibuatnya Qanun Kabupaten sebagai aturan yang kuat dan mempertegas tentang pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon. Berikut hasil penuturan Bapak EW selaku Staf Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk aturan berupa qanun saya tidak terlalu memikirkan. masalah kebijakan atau program itu kan urusan atasan, nanti bisa ditanyakan langsung ke kabid yang lebih tahu tentang kebijakan atau program tersebut, kalau kami staf yang penting kerja sesuai program yang ada sekarang.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saudara BS selaku petugas lapangan Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang mengungkapkan bahwa :

“Urusan kebijakan atau program yang tahu atasan, kalau saya tahunya ya apa yang saya kerjakan selama menjadi petugas lapangan seksi pengelolaan sampah. Kita kan hanya diberikan tugas saja dan kita melaksanakan tugas tersebut. Kalau untuk kebijakan atau programnya seperti apa atasan yang tahu.” (Wawancara 13 Maret 2018)

Kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat implementasi kebijakan atau program secara teknis, kurang memahami pedoman pelaksanaan kebijakan atau program yang menjadi dasar dari pelaksanaan tugas mereka masing-masing. Baik staf maupun petugas lapangan hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari atasan dalam hal ini adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Mengenai fragmentasi, yang mana tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan atau program sering tersebar di antara beberapa organisasi. Begitu juga dengan kondisi para pelaksana terkait pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon. Ada para pihak yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa kampung yang mengangkut sampah rumah tangga ke TPS, ini juga masih menjadi permasalahan karena belum ditentukan bagaimana retribusinya karena sejauhmana peran dari kampung tersebut aturannya juga belum jelas, hanya berupa perjanjian penyewaan TPS atau kontainer milik Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut disampaikan Bapak ZK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut

“Ya, ada beberapa kampung di akhir tahun 2017 yang memiliki kendaraan roda 3 pengangkut sampah bantuan dari Pemda juga, itu memang belum semua kampung seperti itu, aturannya juga belum ada sejauh mana peran kampung tersebut, tapi karena sarana pengangkutannya sudah ada, untuk sementara ini kita memakai surat perjanjian sewa TPS atau kontainer dulu, jadi intinya pihak kampung mengutip retribusi dari masyarakat dan kemudian pihak kampung

membayar sewa kontainer kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup.”  
(Wawancara 13 Maret 2018)

Selanjutnya untuk penyemprotan lalat pada TPA Uwer Tetemi dan kawasan Kampung di sekitarnya, Dinas Lingkungan Hidup masih memerlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah sebagai pelaksana penyemprotan lalat di TPA Uwer Tetemi dan Kampung sekitarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak AH selaku Kepala UPTD TPA Uwer Tetemi sebagai berikut :

“Untuk penyemprotan lalat disini kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kalau keadaan normal biasanya 3 bulan sekali disemprot, tapi kalau lalatnya terlalu banyak kita dapat meminta penyemprotan lalat sesuai kebutuhan kita di TPA ini sekalian di Kampung-kampung sekitar sini juga.” (Wawancara 15 Maret 2018)

Dalam logika sederhana semakin banyak pihak terkait, maka pelaksanaan kebijakan atau program semakin efektif tetapi tidak selalu demikian. Dengan adanya arogansi sektoral dan sulitnya melakukan koordinasi, maka pelaksanaan kebijakan atau program akan semakin kurang maksimal. Memang diakui dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa sebuah implementasi kebijakan atau program, semakin banyak pihak terkait semakin sulit koordinasi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon**

Pelaksanaan program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon secara umum dimulai dari 3 (tiga) alur kegiatan yang saling terkait yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan dan pengolahan atau pemrosesan akhir di lokasi TPA. Alur kegiatan tersebut secara garis besar telah memenuhi kaidah dasar pengelolaan

sampah, tetapi jika dikaji lebih lanjut, untuk proses pemilahan sampah baik secara :

a. Pengumpulan sampah

Proses pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampah atau lingkungan masing-masing yang ada di kawasan Kota Takengon untuk diangkut ke lokasi transit, hal ini dilakukan karena pengangkutan ke TPA dilaksanakan pada pukul 21.00 Wib.

Dalam pengelolaan sampah modern dikenal dengan *Integrated Solid Waste Management* (ISMW) atau di Indonesia dikenal dengan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, menurut peneliti, seharusnya di lokasi transit inilah keberadaan yang tepat untuk TPST dimaksud.

b. Pengangkutan sampah

Pengangkutan dari sumber sampah menggunakan truk dan kendaraan pengangkut sampah roda 3 bermesin, untuk truk dilaksanakan pada pagi hari ke lokasi transit, menurut peneliti hal ini sudah tepat dikarenakan pada setiap pagi truk pengangkut sampah mengambil sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat yang bermukim di jalan protokol, tetapi tidak semua lokasi pelayanan sampah oleh armada truk, sehingga pengangkutan sampah dari sumber sampah masyarakat harus menggunakan kendaraan roda 3 bermesin ke lokasi TPS terdekat dan tidak setiap hari dilakukan. Menurut peneliti kegiatan pengangkutan menggunakan kendaraan roda 3 ini harus setiap hari dilakukan. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan sampah pada lokasi timbulan sampah.

Setelah sampah-sampah terkumpul di lokasi transit, proses pengangkutan selanjutnya adalah pengangkutan sampah dari lokasi transit ke lokasi TPA

dilakukan menggunakan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup setiap hari pada pukul 21.00 Wib, sedangkan TPS yang berupa kontainer besar langsung diangkut menggunakan truk *armroll* pada waktu yang bersamaan.

c. Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

Pengolahan sampah pada tempat pengolahan akhir atau TPA dapat dilakukan dengan teknik penumpukan (*dumping*), pengomposan (*composting*), pembakaran (*incineration*) dan sanitasi dalam tanah (*sanitary landfill*).

Menurut peneliti pengolahan sampah di TPA Uwer Tetemi yang menggunakan sistem *sanitary landfill*, yaitu pemusnahan sampah dengan cara mengurug sampah dengan bahan pengurug yang ada di lokasi TPA sudah tepat, karena dinilai dapat mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, tetapi akan lebih baik lagi jika di masa yang akan datang khusus untuk sampah organik dapat ditambah pengolahan menggunakan teknik *composting* sehingga pengolahan yang dilakukan dapat memiliki nilai lebih.

Dari uraian kegiatan di atas, selanjutnya peneliti membahas tentang bagaimana implementasi pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon menurut yang dikemukakan oleh Anderson sebagai berikut :

a. Siapa yang mengimplementasikan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai pelaku utama atau implementator program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon, ini terlihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Secara umum penanganan sampah di kawasan Kota Takengon berjalan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, tetapi ada proses yang belum berjalan sesuai yang diharapkan seperti kegiatan pengurangan sampah dan

pengolahan sampah itu sendiri yaitu kegiatan pembatasan timbulan dan pemilahan sampah belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya regulasi atau qanun yang menekankan keterlibatan semua pihak terkait termasuk masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengolahan sampah ini.

Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

b. Hakikat dari proses administrasi

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan, kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon yaitu adanya kerjasama dari pejabat dengan staf ataupun staf dengan staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, selain itu ada kerjasama dengan instansi lain seperti dengan Dinas Kesehatan terkait dengan penyemprotan lalat di lokasi TPA, dengan pemerintah Kampung di kawasan Kota Takengon terkait pengangkutan sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermesin roda 3.

Untuk kerjasama yang sedang dirintis dengan masyarakat maupun sekolah-sekolah, salah satunya dengan masyarakat yang telah memulai pengelolaan sampah secara mandiri seperti masyarakat Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan.

c. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan sejauhmana implementator dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah memehuhi dan mematuhi perintah yang ada pada program yang tertuang dalam petunjuk teknis pengelolaan sampah. Dilihat dari antusias pejabat, staf dan petugas pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah secara umum sudah cukup baik. ini dapat dilihat dari temuan peneliti pada hasil di atas bahwasanya para petugas telah cukup patuh menerima perintah dari atasan.

Kepatuhan pihak lain termasuk masyarakat terkait keikutsertaan dalam program pengelolaan sampah masih diperlukan regulasi yang lebih besar dan kuat. Untuk saat ini yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk terus melakukan upaya meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada masyarakat baik secara langsung melalui penyuluhan ataupun bentuk himbauan secara visual melalui baliho atau spanduk. Mengingat kesadaran masyarakat di kawasan Kota Takengon umumnya masih kurang. Meskipun demikian ada salah satu kampung yaitu Kampung Lot Kala Kecamatan Bebesen yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk mengelola sampah melalui bank sampah kampung tersebut.

d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan

Secara umum dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan di kawasan Kota Takengon cukup baik, yaitu pada saat ini Kota Takengon terlihat cukup bersih ini terbukti dari hasil penelitian di atas dan amatan langsung peneliti sendiri, dampak lain dari program ini masyarakat sudah mulai terbiasa untuk mengumpulkan sampah di lingkungan sekitarnya, meskipun masih pada tahap pengumpulan tetapi

bernilai positif sebagai cikal bakal pengelolaan sampah berbasis mandiri kepada masyarakat yang telah mampu menerapkan pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycling*.

Terkait pengolahan sampah di TPA, meskipun pengolahannya sudah cukup baik yaitu menggunakan teknik *sanitary landfill*, tetapi dikarenakan keberadaan TPA yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat hanya berada di samping bawah jalan menuju salah satu kampung menjadi permasalahan tersendiri yaitu banyaknya lalat di pemukiman warga sekitar jika terlalu lama tidak disemprot anti lalat. Suatu saat hal lain yang juga dikhawatirkan adalah tercemarnya air tanah yang juga berdampak tidak baik bagi masyarakat.

Menurut peneliti, dampak baik lainnya yang diharapkan adalah dengan adanya program pengelolaan sampah ini dapat memberi nilai lebih bagi perekonomian masyarakat yaitu dengan adanya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah melalui prinsip 3R disamping dapat mengurangi timbulan sampah, sampah-sampah juga dapat dimanfaatkan seperti dijadikan produk-produk kerajinan, dijadikan kompos untuk pupuk tanaman atau dengan proses pemilahan sampah-sampah yang tidak terpakai bisa dijual kembali ke pengepul melalui bank-bank sampah yang diharapkan ada pada setiap kampung di kawasan Kota Takengon.

## 2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon

Adapun pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Faktor komunikasi yang berpengaruh dapat dilihat dari transmisi, kejelasan dan konsisten. Pengaruh faktor transmisi yaitu dalam peraturan perundangan dan tupoksi yang ada pengelolaan menjadi wewenang mutlak dari DLH namun ada beberapa kampung yang sudah mengelola sampah sendiri terutama masalah pengangkutan ke TPS, namun sejauh mana peran kampung dalam pengelolaan sampah ini belum secara jelas batas-batasnya.

Belum adanya peraturan daerah atau qanun, mengakibatkan belum ada kejelasan siapa yang akan meneruskan perintah ini setelah pemerintah daerah, karena makna pemerintah daerah begitu luas selain itu bagaimana dan kapan suatu kebijakan atau program dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan juga belum dijelaskan secara rinci atau bersifat kabur. Meskipun sosialisasi telah dilakukan namun dirasa perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dan pihak terkait memahami dan pesan yang ada dalam program pengelolaan sampah ini benar-benar sampai kepada masyarakat.

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah khususnya terkait masalah pengurangan sampah yang ditandai dengan pengurangan sampah masih dilakukan oleh pemulung, meski sudah ada peran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah ini, namun masih 1 kampung yang sudah memulai program pengurangan sampah sehingga jumlahnya belum begitu signifikan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya berupa staf, informasi, wewenang dan fasilitas berpengaruh terhadap implementasi program, Staf untuk petugas pengangkutan yang terdiri

dari sopir dan tenaga pengangkut, dengan jumlah armada angkut yang ada, jumlahnya telah mencukupi. Namun untuk petugas pengolahan sampah di TPA Uwer Tetemi masih membutuhkan 2 orang operator alat berat yang diperlukan sebagai petugas apusan sesuai beban kerja yang ada. Dari tingkat pendidikan, untuk pegawai/ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan tingkat pendidikan yang didominasi berlatar belakang pendidikan S1 dan SLTA, maka seharusnya sebanding dengan banyaknya pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas, namun untuk tenaga kontrak umumnya didominasi oleh tingkat pendidikan SD dan SMP.

Dari segi informasi, pegawai dan petugas DLH Kabupaten Aceh Tengah sudah memahami terhadap pedoman teknis dan peraturan yang ada termasuk qanun retribusi dengan cukup baik.

Wewenang dalam implementasi program penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon wewenang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, khusus untuk upaya pengurangan sampah seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, sehingga pihak-pihak terkait dan masyarakat akan secara sadar dan ikut berperan dalam upaya pengelolaan sampah ini, namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang lebih besar dan kuat. sehingga secara umum untuk saat ini pembagian atau pelimpahan wewenang ini belum berjalan dengan baik.

Fasilitas yang ada untuk pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon pada umumnya masih kekurangan, diantaranya perlu penambahan untuk armada

truk angkutan sampah, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, TPS atau kontainer dengan penutup, peralatan dan fasilitas di TPA berupa alat berat compactor, kendaraan pengangkut logistik BBM, perkantoran serta fasilitas bengkel. Untuk memenuhi fasilitas dan peralatan dimaksud masih ditemui masalah klasik, yaitu pendanaan yang tidak sedikit, menurut peneliti khusus untuk truk angkutan sampah untuk saat ini dalam rangka menanggulangi banyaknya sampah, meskipun jumlahnya dianggap masih kurang bisa saja ditanggulangi dengan menambah jumlah perjalanan angkutan menjadi dua kali sehari, namun untuk kendaraan roda 3 idealnya memang setiap kampung memiliki satu unit sehingga mudah dalam mengkoordinirnya.

#### c. Disposisi

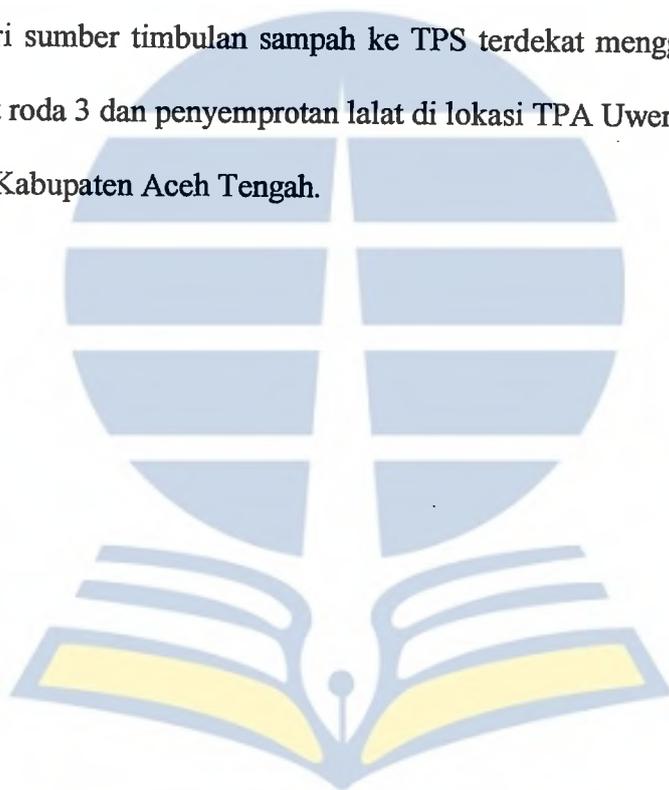
Disposisi berupa respon yang baik juga berpengaruh terhadap implementasi program. Respon dari aparat pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini juga merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi program pengelolaan sampah.

Adanya respon yang baik terhadap program pengelolaan sampah juga akan membawa pengaruh terhadap intensitas, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga berpengaruh terhadap tanggung jawab dan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup.

#### d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi program. Gambaran esensi dari tupoksi

dan pedoman teknis pengelolaan sampah belum menjelaskan secara rinci tentang keterlibatan semua pihak terkait, sehingga Dinas Lingkungan Hidup belum punya ukuran dasar prosedur kerja yang jelas, tegas dan rinci terkait pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon dikarenakan belum adanya peraturan daerah berupa qanun untuk pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon, yang termasuk didalamnya mengatur keterlibatan sejumlah pihak seperti keterlibatan beberapa Kampung dalam hal pengangkutan sampah dari sumber timbulan sampah ke TPS terdekat menggunakan kendaraan pengangkut roda 3 dan penyemprotan lalat di lokasi TPA Uwer Tetemi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bagaimana Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017?

Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017 melalui 3 (tiga) tahap yang saling berkaitan yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA sudah berjalan cukup baik, tetapi secara umum untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R belum berjalan dengan baik.

Identifikasi bagaimana implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017 melalui 4 (empat) aspek pengkajian yaitu :

- a. Siapa yang mengimplementasikan

Pada prinsipnya pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan hingga pengolahan di TPA diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Tetapi dalam kegiatan pengangkutan ada keterlibatan beberapa kampung di kawasan Kota Takengon.

- b. Hakikat dan proses administrasi

Hakikat dan proses administrasi di lingkungan pelaksana program yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah cukup baik, tetapi koordinasi dan kerjasama belum dilakukan secara maksimal dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak swasta maupun masyarakat baik dalam proses pengurangan maupun penanganan sampah.

c. Kepatuhan

Kepatuhan aparat pelaksana yaitu pejabat, staf dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah cukup baik, tetapi kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan pihak lain masih kurang baik.

d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan

Dampak yang ditimbulkan dari program ini cukup baik yaitu terlihat semakin bersihnya kawasan Kota Takengon, tetapi dampak tidak baik yang umum dirasakan masyarakat di sekitar TPS yaitu bau tidak sedap dan pemandangan tidak menyenangkan, kemudian dampak di TPA juga masih menimbulkan kekhawatiran dikarenakan letak TPA Uwer Tetemi yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017?

a. Faktor-faktor yang menghambat implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 – 2017 adalah :

1) Komunikasi

Faktor komunikasi secara keseluruhan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Saluran komunikasi atau transmisi yang timbul karena peran kampung dan pihak-pihak lain termasuk pihak swasta dalam pengelolaan sampah ini belum jelas peran dan batas-batasnya, meskipun sosialisasi kepada pihak terkait dan masyarakat telah dilakukan tetapi belum intensif.

2) Sumberdaya

Pembagian dan pelimpahan wewenang untuk pihak lain termasuk masyarakat, belum berjalan dengan baik, fasilitas dan peralatan yang ada masih

kurang, namun untuk memenuhi fasilitas dan peralatan dimaksud masih ditemui masalah klasik, yaitu pendanaan yang tidak sedikit.

### 3) Struktur Birokrasi

Tupoksi dan pedoman teknis pengelolaan sampah belum menjelaskan secara rinci tentang keterlibatan semua pihak terkait, sehingga Dinas Lingkungan Hidup belum punya ukuran dasar prosedur kerja yang jelas, tegas dan rinci terkait pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon.

b. Faktor yang mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 – 2017 adalah :

#### 1) Disposisi

Respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

### B. Saran

#### 1. Implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon

Perlu segera dilakukan upaya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di seluruh kawasan Kota Takengon yaitu dengan mendirikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan memperbanyak bank sampah di kawasan Kota Takengon.

Saran terhadap 4 (empat) aspek pengkajian implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016-2017 :

#### a. Siapa yang mengimplementasikan

Keterlibatan beberapa kampung dalam pengelolaan sampah termasuk dalam pengangkutan sampah ke TPS dapat dimuat ke dalam SOP atau pedoman teknis pengelolaan sampah.

b. Hakikat dan proses administrasi

Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak swasta dan masyarakat terkait pengurangan maupun penanganan sampah.

c. Kepatuhan

Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan pihak lainnya terkait penanganan sampah.

d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan

Untuk kontainer TPS yang ada kiranya dapat diberikan penutup agar baunya tidak begitu menyengat dan pemandangan tidak begitu mengganggu, Untuk TPA perlu dicarikan dan ditetapkan lokasi TPA baru yang letaknya jauh dari pemukiman untuk mengatasi dampak yang tidak baik bagi masyarakat.

2. Saran terhadap faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon

a. Saran terhadap faktor yang menghambat implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 – 2017 :

1) Komunikasi

Keterlibatan pihak kampung dan pihak-pihak lain dalam pengelolaan sampah perlu diperjelas peran serta atau batas-batasnya dan dapat dimuat pada SOP atau pedoman teknis serta perlu dilakukan sosialisasi secara intensif tentang pengelolaan sampah kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat.

## 2) Sumberdaya

Pembagian dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab untuk pihak lain termasuk masyarakat perlu dilakukan, perlu penambahan fasilitas dan peralatan pengelolaan sampah. Disamping pengadaan dari dana pemerintah, penambahan fasilitas dan peralatan jika memungkinkan dapat dijangkau bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta untuk berinvestasi dalam proses penyelenggaraan sampah.

## 3) Struktur Birokrasi

Perlu dibuatkan regulasi yang lebih besar dan kuat dalam bentuk peraturan daerah atau qanun sebagai ukuran dasar prosedur kerja yang jelas, tegas dan rinci bagi Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kawasan Kota Takengon.

b. Saran terhadap faktor yang mendukung implementasi program pengelolaan sampah di kawasan Kota Takengon Tahun 2016 - 2017 :

### 1) Disposisi

Aparat pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah diharapkan mampu mempertahankan respon yang sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun. 2010. Makassar : Universitas Negeri Makassar.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Diambil 17 Pebruari 2018. Dari situs World Wide Web : <https://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc>
- Alex S . 2015. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart, and Winston, New York.
- Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun. 2010. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo.
- Bagchi, A. 2004 . *Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management*. New Jersey :John Willey and Sons.
- Irawan, Prasetya. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murtadho, Djuli dan Said Gumbira. 1987. *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ripley, Randall & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*; Second Edition. Illinois, USA: The Dorsey Press.

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.

Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarso, dkk. 2011. *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatin, Agung Dwi Prihanto dan Michel Gelbert. 1996. *Sampah dan Pengelolaannya*. Malang: PPPGT / VEDC.

Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Kita.

#### **Dokumen-dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan TPA Uwer Tetemi.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

SNI Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman.

Pedoman Teknis Operasional Pengolahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Uwer Tetemi.

Pedoman Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Pedoman Teknis Operasional IPLT Uwer Tetemi.

## Lampiran 1.

**PEDOMAN WAWANCARA**

## A. Informan I

Nama	:	
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	

1. Apakah tindakan yang dilakukan apabila ada petugas yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah? Apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah? Dan apa kendalanya?
3. Bagaimana wewenang yang diberikan terhadap DLH? Untuk saat ini apakah sudah ada pembagian wewenang pengelolaan sampah?
4. Bagaimana tanggapan Bapak tentang partisipasi yang telah dilakukan masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah?
5. Bagaimanakah pemahaman staf atau petugas terhadap peraturan ataupun SOP yang ada? Dan apa upaya untuk meningkatkan pemahaman tersebut?
6. Apakah perlu penambahan untuk sarana angkutan sampah atau sarana lainnya?
7. Bagaimana tanggapan Bapak tentang penempatan TPS yang dinilai banyak mengganggu masyarakat di sekitarnya? Dan apa solusinya dari DLH?
8. Bagaimana pengolahan sampah di TPA saat ini? Dan apakah sarana dan prasarana di TPA telah mencukupi?
9. Apakah secara keseluruhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah telah mencukupi? Jika belum apa kendala terbesar yang dihadapi?
10. Bagaimana interpretasi pegawai atau petugas terhadap program pengelolaan sampah yang ada di DLH?
11. Apakah ada koordinasi yang dilakukan kepada pihak kampung terkait pengelolaan sampah? Dan bagaimana hal tersebut dilakukan?
12. Menurut Bapak apa dampak yang diharapkan dari program pengelolaan sampah ini?

13. Menurut Bapak apakah TPA yang ada saat ini sudah tepat letaknya dari pemukiman warga?

B. Informan II

Nama	:	
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	

1. Apakah sudah ada ditetapkan target pengurangan sampah? Apakah ada kendala dalam realisasinya?
2. Apakah ada penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap pengurangan sampah atau kegiatan mengguna ulang atau mendaur ulang apakah sudah ada sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat?
3. Apakah ada upaya pengurangan sampah seperti pengoperasian bank sampah?
4. Siapakah yang bertanggungjawab untuk pengangkutan sampah di kawasan Kota Takengon?
5. Kapan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA? Dan bagaimana jika ada masyarakat yang membuang sampah ke TPS di bawah waktu tersebut?
6. Bagaimana koordinasi tentang pembuangan sampah dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta?
7. Dari seluruh proses pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan hingga proses akhir di TPA di bagian proses yang mana belum bisa dilaksanakan secara maksimal?
8. Apakah masyarakat sudah paham dengan pola pemilahan ini dan bagaimana model pengangkutannya?
9. Kapan jadwal pengangkutan sampah dan Bagaimana kepatuhan petugas terhadap jadwal dan rute pengambilan/pengangkutan sampah?
10. Bagaimana jadwal pengambilan sampah ke lokasi timbulan sampah? Apakah setiap hari dilakukan?
11. Bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap petugas yang tidak mematuhi jadwal pengangkutan sampah?

12. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah?
13. Bagaimana wewenang yang diberikan terhadap DLH? Untuk saat ini apakah sudah ada pembagian wewenang pengelolaan sampah?
14. Apakah personil angkutan sampah yang ada saat ini sudah mencukupi?
15. Bagaimana dengan tugas pokok yang diberikan oleh atasan?
16. Bagaimana pemahaman personil atau petugas terhadap peraturan ataupun SOP yang ada?
17. Apakah hambatan utama dalam pengangkutan sampah? Dan bagaimana seharusnya?
18. Bagaimana respon pegawai atau petugas dalam menjalankan suatu tugas?
19. Bagaimana interpretasi pegawai dan petugas terhadap program pengelolaan sampah?
20. Bagaimana intensitas petugas terkait tupoksi masing-masing petugas dan visi misi DLH?
21. Apa yang menjadi dasar dan acuan program pengelolaan sampah ini?
22. Apakah dampak yang diharapkan dari masyarakat terhadap program pengelolaan sampah ini?

### C. Informan III

Nama	:	
Jabatan	:	Kepala Seksi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	

1. Apakah sudah ada ditetapkan target pengurangan sampah? Apakah ada kendala dalam realisasinya?
2. Apakah ada penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap pengurangan sampah atau kegiatan mengguna ulang atau mendaur ulang?
3. Bagaimana pengoperasian bank sampah yang direncanakan? Dan apa dampak yang diinginkan?

4. Apakah jumlah petugas seperti personil angkutan sampah yang ada saat ini sudah mencukupi?
5. Dalam pengeolaan sampah ini, sarana apa sajakah yang dirasa masih kurang?
6. Bagaimana respon bawahan anda atau petugas terhadap tugas yang diberikan?
7. Bagaimana intensitas petugas terkait tupoksi masing-masing petugas dan visi misi DLH?
8. Apakah sudah ada peraturan daerah untuk pengelolaan sampah ini? Jika belum apa harapan Bapak terhadap Perda tersebut?

#### D. Informan IV

Nama	:	
Jabatan	:	Kepala Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana pengoperasian dan pengelolaan bank sampah di Kampung Lot Kala ini? Dan apa reward untuk masyarakat yang menyetorkan sampah disini?
2. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah? Dalam bentuk apa? Dan bagaimana penggunaannya?
3. Bagaimana Pengolahan sampah organik dan anorganik di Kampung Lot Kala ini?
4. Bagaimana upaya pengurangan sampah yang dilaksanakan di Kampung Lot kala ini? Dan kira-kira berapa volume sampah yang tertampung di bank sampah?

#### E. Informan V

Nama	:	
Jabatan	:	Kepala UPTD TPA Uwer Tetemi
Tanggal Wawancara	:	

1. Untuk Pengolahan sampah Teknik apa yang digunakan pada TPA Uwer Tetemi?

2. Apakah personil atau petugas di TPA ini sudah mencukupi?
3. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan tapi belum ada di TPA ini?
4. Adakah kerjasama dengan pihak atau instansi lain terkait pengolahan sampah di TPA ini?
5. Menurut Bapak apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TPA ini?

#### F. Informan VI

Nama	:	
Jabatan	:	Staf Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana pendapat Bapak apakah perlu dibuatkan Peraturan Daerah atau qanun untuk pengelolaan sampah terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak?

#### G. Informan VII

Nama	:	
Jabatan	:	Petugas Lapangan Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana pendapat Bapak apakah perlu dibuatkan Peraturan Daerah atau qanun untuk pengelolaan sampah terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak?

#### H. Informan VII

Nama	:	
Jabatan	:	Sopir Kendaraan pengangkut sampah roda 3
Tanggal Wawancara	:	

1. Kapan waktu pengangkutan sampah ke TPS dilakukan?

## I. Informan VII

Nama	:	
Jabatan	:	Sopir Kendaraan Truk Pengangkut Sampah
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana kepatuhan para pihak termasuk masyarakat untuk membuang sampah ke dalam bak TPS?
2. Bagaimana jika ada sampah-sampah berat seperti bongkaran bangunan dan material lainnya yang bukan sampah rumah tangga jika dibuang ke TPS?

## J. Informan VIII

Nama	:	
Jabatan	:	Penjaga Gudang Transit
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana jadwal pengangkutan sampah yang masuk dan keluar, dari dan ke lokasi transit ini?

## K. Informan IX

Nama	:	
Jabatan	:	Masyarakat pengguna jasa layanan kebersihan dengan angkutan roda 3
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan roda 3 di lokasi ibu ini?
2. Apakah ada pengaruh program sampah ini terhadap perilaku Saudari dalam pengumpulan sampah?

## L. Informan X

Nama	:	
Jabatan	:	Salah satu sopir kendaraan pengangkut sampah roda 3
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan roda 3 di lokasi ini? Dan apa alasannya?

#### M. Informan XI

Nama	:	
Jabatan	:	Masyarakat pengguna jasa layanan kebersihan dengan angkutan truk sampah
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana cara pengumpulan dan jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan truk sampah di lokasi ibu ini?
2. Menurut anda apa dampak dari pelayanan sampah yang ada saat ini, bagi lingkungan dan bagi anda selaku masyarakat?

#### N. Informan XII

Nama	:	
Jabatan	:	Masyarakat di sekitar lokasi TPS
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana jadwal dan cara pengangkutan sampah yang dilakukan kendaraan truk sampah dari TPS ini? Apakah terangkut semua?
2. Bagaimana keadaan sampah di TPS ini?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan TPS di sini?

#### O. Informan XIII

Nama	:	
Jabatan	:	Pedagang/masyarakat di sekitar lokasi TPS Pasar
Tanggal Wawancara	:	

1. Bagaimana tanggapan anda tentang penempatan TPS di pasar ini? Apakah dampak yang ditimbulkan menurut Saudara?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan TPS di sini?

## Lampiran 2.

## TRANSKRIP WAWANCARA

## A. Informan I

Nama	: Ir. Zikriadi, MM
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 13 Maret 2018

1. Apakah tindakan yang dilakukan apabila ada petugas yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan?

Jawaban :

Kalau ada tugas yang belum bisa dilaksanakan masing-masing bagian atau petugas itu biasanya diadakan upaya preventif. Kita cari penyebabnya apa, lalu kita cari solusinya. Tidak cepat-cepat untuk memberikan sanksi formal, karena kita memahami permasalahan kita sangat kompleks. Kalau kita bisa kita tangani dulu secara personal

2. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah? Apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah? Dan apa kendalanya?

Jawaban :

Untuk kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, kami rasa masih kurang, kita sudah juga melakukan himbauan-himbauan dan pemberitahuan, namun buktinya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi untuk sampah spesifik itu diletakkan begitu saja di kontainer TPS. Tapi mau bagaimana lagi, aturannya dalam bentuk qanun ini yang belum ada jadi kita tidak bisa berbuat banyak

3. Bagaimana wewenang yang diberikan terhadap DLH? Untuk saat ini apakah sudah ada pembagian wewenang pengelolaan sampah?

Jawaban :

memang untuk peraturan daerah atau qanun pengelolaan sampah ini belum ada, namun menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 itu jelas menyebutkan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah itu kan pemerintah, ya kalau di takengon ini kan Dinas Lingkungan Hidup selaku SKPK Aceh Tengah dikuatkan lagi melalui Tupoksi SKPK, untuk sekarang memang belum secara jelas pembagian wewenangnya, namun ke depan kita wacanakan semua pengelolaan sampah di kampung itu diserahkan ke kampung, nanti yang ke TPA itu baru mutlak kita yang tangani, untuk saat ini sudah ada juga beberapa kampung yang telah melaksanakan pengangkutan ke TPS

4. Bagaimana tanggapan Bapak tentang partisipasi yang telah dilakukan masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah?

Jawaban :

Ya.. kita sangat mengapresiasi upaya masyarakat dalam upaya pengurangan sampah seperti yang dilakukan oleh Kampung Lot Kala, meskipun jumlahnya belum begitu signifikan namun ini bernilai positif, nantinya kalau regulasinya sudah ada, kita dapat lebih menekankan pengelolaan sampah di kampung tersebut menjadi tanggung jawab kampung, termasuk juga income nya, baik retribusi ataupun penghasilan lain dari pengelolaan sampah tersebut, sedangkan pengurangan sampah lainnya itu masih dilakukan pemulung

5. Bagaimanakah pemahaman staf atau petugas terhadap peraturan ataupun SOP yang ada? Dan apa upaya untuk meningkatkan pemahaman tersebut?

Jawaban :

Cuma kalau pemahaman terhadap peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang misalnya, masih kurang, namun kalau pedoman teknis yang ada sudah cukup baik. Sosialisasi atau himbauan tentang pengelolaan sampah yang ada sekarang ini kan sudah dan sedang kita lakukan juga, namun untuk retribusi sampah sesuai qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2010 itu sudah berjalan cukup baik, nah sekarang masalahnya di pengelolaan ini yang masih kita tunggu qanunnya

6. Apakah perlu penambahan untuk sarana angkutan sampah atau sarana lainnya?

Jawab :

Perlu juga ada peningkatan armada truk yang dimiliki. Karena masih belum sesuai dengan jumlah perjalanan pengangkutan sampah per hari. Roda 3 juga harus ditambah sesuai jumlah kampung, kemudian untuk sarana di TPA seperti kantor dan bengkel juga harus ada serta peralatan pengolahan sampah berteknologi seperti komposter juga kita belum punya

7. Bagaimana tanggapan Bapak tentang penempatan TPS yang dinilai banyak mengganggu masyarakat di sekitarnya? Dan apa solusinya dari DLH?

Jawaban :

Ya memang TPS yang ada saat ini masih banyak yang mengganggu masyarakat. Untuk tuntutan masyarakat kalau sampah kan tidak mengganggu, tapi kita kan memang belum mampu untuk penyediaan fasilitas untuk TPS seperti di negara-negara maju yang sudah menerapkan teknologi tinggi karena butuh dana yang besar. selain dana tinggi juga butuh lahan yang luas. Jadi ini masih sedang dipelajari dan dicari solusi supaya penerapan kebijakan atau program ini tidak menjadi gangguan masyarakat atau dengan kata lain bisa memenuhi keinginan masyarakat agar tidak terjadi keluhan-keluhan tersebut

8. Bagaimana pengolahan sampah di TPA saat ini? Dan apakah sarana dan prasarana di TPA telah mencukupi?

Jawaban :

Untuk sistem pengolahan sampah di TPA Uwer Tetemi dengan teknik sanitary landfill yaitu penyebaran, penimbunan dan pemadatan menggunakan alat berat sudah memenuhi standar, namun untuk fasilitas lain seperti kantor dan fasilitas bengkel itu belum ada, memang ini juga menjadi satu kendala Kota Takengon untuk mendapatkan adipura

9. Apakah secara keseluruhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah telah mencukupi? Jika belum apa kendala terbesar yang dihadapi?

Jawaban :

Kita harus mengakui memang di sana-sini masih banyak kekurangan fasilitas dan peralatan, namun kita juga harus memaklumi bahwa untuk memenuhi hal tersebut diperlukan pendanaan yang tidak sedikit, ini masih menjadi kendala klasik kita bersama

10. Bagaimana interpretasi pegawai atau petugas terhadap program pengelolaan sampah yang ada di DLH?

Jawaban :

Pegawai atau petugas itu kan latar belakang pendidikannya berbeda-beda jadi mereka menginterpretasikan berbeda-beda, umumnya mereka memahami tapi ada beberapa yang kurang memahami, tergantung interpretasi masing-masing

11. Apakah ada koordinasi yang dilakukan kepada pihak kampung terkait pengelolaan sampah? Dan bagaimana hal tersebut dilakukan?

Jawaban :

Ya, ada beberapa kampung di akhir tahun 2017 yang memiliki kendaraan roda 3 pengangkut sampah bantuan dari Pemda juga, itu memang belum semua kampung seperti itu, aturannya juga belum ada sejauh mana peran kampung tersebut, tapi karena sarana pengangkutannya sudah ada, untuk sementara ini kita memakai surat perjanjian sewa TPS atau kontainer dulu, jadi intinya pihak kampung mengutip retribusi dari masyarakat dan kemudian pihak kampung membayar sewa kontainer kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup

12. Menurut Bapak apa dampak yang diharapkan dari program pengelolaan sampah ini?

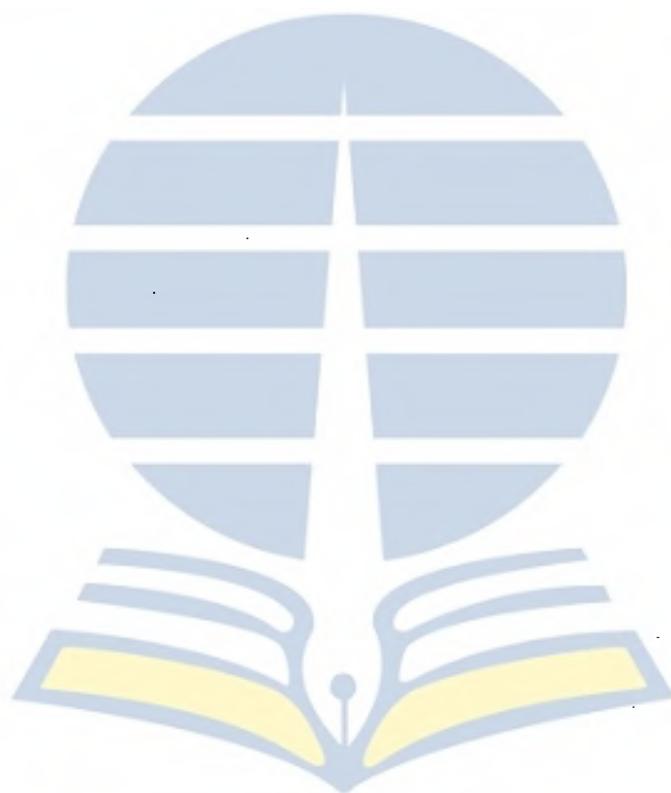
Jawaban :

Anda bisa lihat sendiri sekarang kawasan Kota bersih kan? Untuk hal-hal lain kita mengharapkan dengan program pengelolaan sampah ini dapat membantu pelestarian lingkungan, membantu menjaga kesehatan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan dapat meningkatkan kualitas kebersihan di Kota Takengon dalam menunjang Kota Takengon meraih Adipura

13. Menurut Bapak apakah TPA yang ada saat ini sudah tepat letaknya dari pemukiman warga?

Jawaban :

Memang kita akui TPA Uwer Tetemi masih terlalu dekat dengan pemukiman warga dan letaknya juga tepat di bawah jalan menuju salah satu kampung di Kecamatan Silih Nara, kita mengkhawatirkan memang nanti ada dampak tidak baik terhadap kesehatan Masyarakat, tetapi mau bagaimana lagi untuk saat ini lokasi itu yang ada, untuk kedepan kita juga sedang memikirkan untuk mencari lokasi yang betul-betul memenuhi untuk keberadaan TPA



**B. Informan II**

Nama	: Ikhsan, SE
Jabatan	: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 3 Maret 2018

1. Apakah sudah ada ditetapkan target pengurangan sampah? Apakah ada kendala dalam realisasinya?

Jawaban :

Kalau targetnya itu kita tetapkan sebesar 2%, tapi kami mengalami kendala. Disatu sisi kita memang diarahkan untuk bisa mengurangi volume sampah. Tetapi di sisi lain belum ada regulasi yang kuat terhadap pengelolaan sampah yang melibatkan pihak terkait dan masyarakat.

2. Apakah ada penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap pengurangan sampah atau kegiatan mengguna ulang atau mendaur ulang apakah sudah ada sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat?

Jawaban :

Kalau untuk penerapan teknologi ramah lingkungan itu belum ada, tapi kalau tingkat sosialisasi itu sudah dan sedang kita lakukan ke masyarakat dan sekolah-sekolah, apalagi untuk peralatan komposter kita belum punya.

3. Apakah ada upaya pengurangan sampah seperti pengoperasian bank sampah?

Jawaban :

Ya, kita memiliki bank sampah induk yang dikelola DLH, bank sampah induk ini sudah beroperasi sejak tanggal 24 Februari lalu.

4. Siapakah yang bertanggungjawab untuk pengangkutan sampah di kawasan Kota Takengon?

Jawaban :

Untuk pengangkutan itu memang sesuai Tupoksi yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah itu menjadi tanggungjawab DLH.

5. Kapan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA? Dan bagaimana jika ada masyarakat yang membuang sampah ke TPS di bawah waktu tersebut?

Jawaban :

Sampah-sampah yang terkumpul di TPS setiap hari kita angkut ke TPA pukul 21.00 Wib, jika ada masyarakat yang membuang sampah di bawah jam tersebut berarti akan tinggal di lokasi TPS tersebut dan keesokan harinya baru diangkut

6. Bagaimana koordinasi tentang pembuangan sampah dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta?

Jawaban :

Untuk sampah umum yang dihasilkan oleh pihak swasta seperti hotel, rumah makan dan sampah yang dihasilkan oleh perkantoran instansi pemerintah kita haruskan untuk dibuang ke dalam bak sampah TPS terdekat, selanjutnya kita yang angkut ke TPA

7. Dari seluruh proses pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan hingga proses akhir di TPA di bagian proses yang mana belum bisa dilaksanakan secara maksimal?

Jawaban :

Pemilahan itu mestinya sudah lewat sosialisasi dan himbauan tetapi kita sendiri masih kesulitan untuk pola pengangkutannya. Tetapi ini sudah dirintis. Kita sudah mulai menyediakan tempat sampah untuk organik sendiri, sampah anorganik sendiri. Nanti yang DLH ambil yang daun-daun, yang plastik dan kaleng diambil pemulung, inikan teori, tetapi prakteknya masyarakat pada umumnya tidak bisa seperti itu, mungkin saja masih memerlukan aturan berbentuk qanun yang memuat kebijakan atau program lebih besar

8. Apakah masyarakat sudah paham dengan pola pemilahan ini dan bagaimana model pengangkutannya?

Jawaban :

Masyarakat apa sudah paham dengan masalah pemilahan sampah ini, kenyataanya pada umumnya masyarakat belum memiliki kesadaran memilah sampah itu, kecuali di kawasan yang sudah memiliki bank sampah seperti di Kampung Lot Kala, untuk masyarakat lainnya di kawasan kota ini masih harus memerlukan sosialisasi lebih lanjut terkait memupuk kesadaran atau pemahaman. Belum lagi pengangkutannya. Nanti kalau sampah dipilah, ditruknya terpaksa juga harus dicampur karena belum ada truk khusus untuk sampah-sampah yang sudah dipilah. Ya paling tidak kan kita harus punya truk khusus. Ada truk yang ngangkut sampah daun, dan ada yang ngangkut sampah plastik sendiri. Ini kan berdampak kesitu, ini yang harus kita pikirkan. Untuk pemilahan itu efektifnya di lapangan rumah tangga, kalau diangkutan belum efektif

9. Kapan jadwal pengangkutan sampah dan Bagaimana kepatuhan petugas terhadap jadwal dan rute pengambilan/pengangkutan sampah?

Jawaban :

Untuk pengangkutan sampah kita sudah melakukan sesuai dengan jam buang, untuk jalan-jalan protokol kita berangkat ke kawasan Kota Takengon untuk mengambil jam 06.30 dan ke lokasi transit jam 09.30 dan di angkut jam 21.00 Wib ke lokasi TPA. Ya kadang ada sampai di atas jam tersebut itu hanya beberapa armada saja, paling 1-2 armada saja terlambat. Selain itu kita juga punya rute sendiri dan harus mentaati rute tersebut

10. Bagaimana jadwal pengambilan sampah ke lokasi timbulan sampah? Apakah setiap hari dilakukan?

Jawaban :

Pengambilan sampah oleh petugas truk dari lokasi timbulan sampah itu setiap hari dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, namun untuk lokasi timbulan sampah dari rumah masyarakat pembayar retribusi yang tidak terjangkau oleh truk ini seharusnya dilakukan setiap hari oleh angkutan sampah bermesin roda 3, ini terkadang belum sepenuhnya terkontrol jadwalnya

11. Bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap petugas yang tidak mematuhi jadwal pengangkutan sampah?

Jawaban :

Kita akan mendata dulu di lokasi mana saja yang tidak mematuhi jadwal, kita cari tau dulu apa penyebabnya, jika memang itu kesalahan petugas yaitu tenaga kontrak, sanksi tegas tentunya akan dikenakan, namun sesuai prosedur harus melalui teguran dulu sebanyak 3 kali, jika masih seperti itu selanjutnya kita lakukan tindakan tegas yaitu pemutusan hubungan kerja

12. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah?

Jawaban :

Pada dasarnya sudah ada masyarakat sudah membantu. Tapi masih banyak pula yang belum memiliki kesadaran. Banyak masyarakat yang membuang di TPS itu tidak di dalam tetapi di luar. Terus sisa-sisa bangunan, kaca seharusnya tidak di buang ke TPS, tetapi kenyataannya masyarakat masih membuang sampah tersebut di TPS. Dia tidak berani buangnya siang, tetapi malam hari. Kadang buangnya di dalam tapi kadang ada juga yang di luar, jadi di TPS itu kanan kirinya tidak pernah bersih

13. Bagaimana wewenang yang diberikan terhadap DLH? Untuk saat ini apakah sudah ada pembagian wewenang pengelolaan sampah?

Jawaban :

Untuk tupoksinya kita kan sudah diatur dalam keputusan Bupati. Dalam Undang-undang juga sudah jelas pengelolaan sampah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kalau di Takengon ini ya DLH, ada beberapa kampung yang juga sudah mengelola sampah sendiri namun kebanyakan masih sebatas pengangkutan ke TPS

14. Apakah personil angkutan sampah yang ada saat ini sudah mencukupi?

Jawaban :

Ya untuk personil angkutan sampah ini sudah mencukupi sesuai peralatan yang ada, kalau untuk peralatan seperti dump truk yang masih kurang, jadi kalau nantinya truknya ditambah ya personilnya juga tentunya harus ditambah

15. Bagaimana dengan tugas pokok yang diberikan oleh atasan?

Jawaban : Dari Pemerintah Kabupaten sudah mendisposisikan Tupoksi tentang pengelolaan sampah kepada kami. Karena SKPK menurut

keterangan Tupoksi tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ya kami menjalankan tugas dengan menyesuaikan keputusan tersebut

16. Bagaimana pemahaman personil atau petugas terhadap peraturan ataupun SOP yang ada?

Jawaban :

Untuk saat ini pedoman teknisnya kan sudah ada, untuk pemahaman personil saya rasa cukup memahami. Cuma masalahnya di qanunnya ini belum ada jadi pemahamannya terhadap pedoman teknis yang ada dulu

17. Apakah hambatan utama dalam pengangkutan sampah? Dan bagaimana seharusnya?

Jawaban :

Hambatannya di sarana prasarana. Jadi mungkin karena keterbatasan truk. Idealnya kita harus ada 19 truk yang beroperasi sehingga tidak ada keterlambatan waktu pengangkutan ke lokasi transit dan untuk roda 3 sesuai jumlah kampung terlayani harusnya kita memiliki 34 unit untuk masing-masing kampung

18. Bagaimana respon pegawai atau petugas dalam menjalankan suatu tugas?

Jawaban :

Respon pegawai dan petugas sangat baik, kalau sudah ada tugas untuk melaksanakan pekerjaan segera cepat-cepat dilaksanakan

19. Bagaimana intepretasi pegawai dan petugas terhadap program pengelolaan sampah?

Jawaban :

SDMnya kita kan tidak sama, jadi sumber daya yang kita hadapi itu kan beragam, umumnya itu baik tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya sesekali ada lah kesalahan. Bahkan yang pendidikannya tinggipun ada juga. Tidak kita pungkiri itu

20. Bagaimana intensitas petugas terkait tupoksi masing-masing petugas dan visi misi DLH?

Jawaban :

Bentuk tanggung jawab tentunya sudah melekat sesuai dengan tupoksinya masing-masing

21. Apa yang menjadi dasar dan acuan program pengelolaan sampah ini?

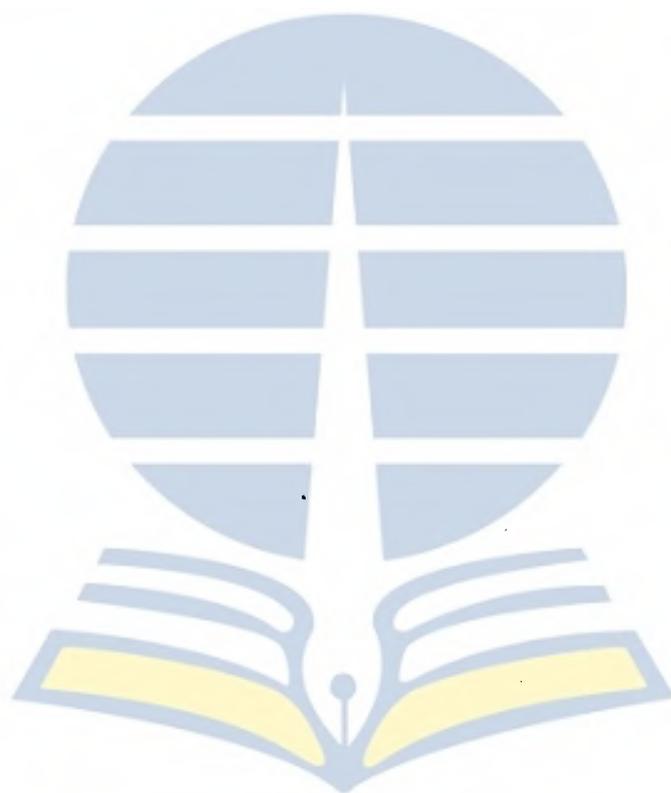
Jawaban :

Yang menjadi acuan kita dalam pengelolaan sampah selama ini memang Tupoksi sesuai Keputusan Bupati dan pedoman teknis pengelolaan sampah itu sendiri yang memuat tata cara pengelolaannya. Khusus untuk retribusi sampah kita sudah berpedoman pada qanun nomor 4 Tahun 2010

22. Apakah dampak yang diharapkan dari masyarakat terhadap program pengelolaan sampah ini?

Jawaban :

Dengan adanya program pengelolaan sampah ini dapat berperan sebagai pelopor bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya



## C. Informan III

Nama	: Munzir, SE
Jabatan	: Kepala Seksi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 3 Maret 2018

1. Apakah sudah ada ditetapkan target pengurangan sampah? Apakah ada kendala dalam realisasinya?

Jawaban :

Untuk jumlah volume sampah selalu berubah dik, kadang naik kadang turun, tapi kecenderungannya naik. Kalau target pastinya perbulannya harus segini kita bisa tetapkan, karena jumlah sampah selalu berubah-ubah. Karena memang agak sulit karena regulasinya berupa bentuk qanun belum ada.

2. Apakah ada penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap pengurangan sampah atau kegiatan mengguna ulang atau mendaur ulang?

Jawaban :

Untuk daur ulang kita masih terkendala peralatan sebenarnya

3. Bagaimana pengoperasian bank sampah yang direncanakan? Dan apa dampak yang diinginkan?

Jawaban :

Intinya kita menampung dan membeli sampah anorganik yang disetorkan oleh masyarakat, dengan harapan menimbulkan kasadaran masyarakat untuk memilah sampah yang masih bernilai ekonomis

4. Apakah jumlah petugas seperti personil angkutan sampah yang ada saat ini sudah mencukupi?

Jawaban :

Kalau jumlah staf sementara ini tercukupi, karena memang peralatannya segitu dan mungkin jumlah beban jumlah kerjanya sedikit lebih karena memang peralatannya yang kurang

5. Dalam pengeolaan sampah ini, sarana apa sajakah yang dirasa masih kurang?

Jawaban :

Terutama untuk angkutan sampah sarananya harus ditambah misalnya truk dan roda 3 itu masih kurang, kontainer TPS juga ada yang kondisinya tidak baik, sudah diperbaiki berkali-kali juga rusak lagi, sudah karatan, jadi harus diganti

6. Bagaimana respon bawahan anda atau petugas terhadap tugas yang diberikan?

Jawaban :

Sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kan tidak mungkin dia abaikan

7. Bagaimana intensitas petugas terkait tupoksi masing-masing petugas dan visi misi DLH?

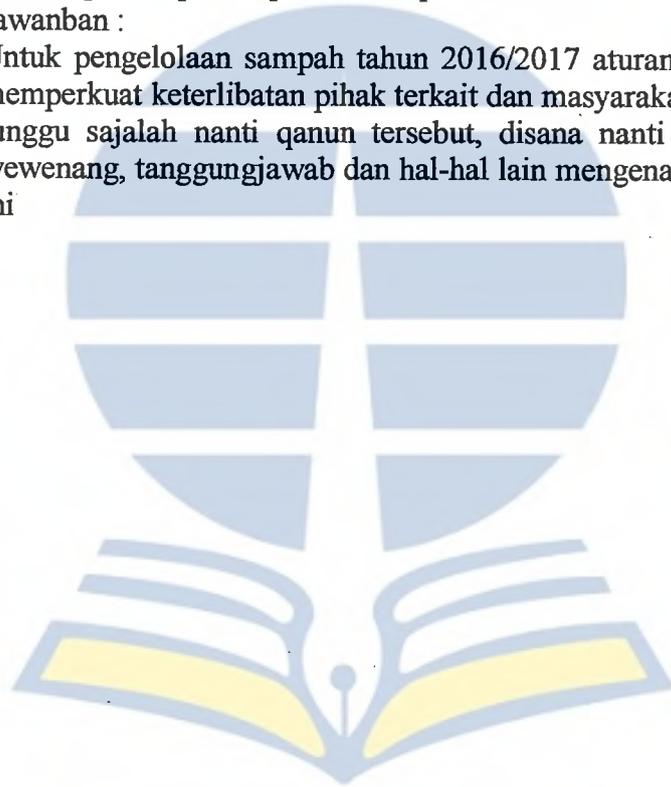
Jawaban :

Pegawai selalu aktif untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah itu baik pengangkutan maupun pengolahannya, sebagai pegawai dan petugas di DLH tetap harus melaksanakan sesuai visi misi DLH

8. Apakah sudah ada peraturan daerah untuk pengelolaan sampah ini? Jika belum apa harapan Bapak terhadap Perda tersebut?

Jawaban :

Untuk pengelolaan sampah tahun 2016/2017 aturan berupa qanun untuk memperkuat keterlibatan pihak terkait dan masyarakat kan belum ada, kita tunggu sajalah nanti qanun tersebut, disana nanti sudah jelas masalah wewenang, tanggungjawab dan hal-hal lain mengenai pengelolaan sampah ini



## D. Informan IV

Nama	: Kurnia Gading
Jabatan	: Kepala Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 14 Maret 2018

1. Bagaimana pengoperasian dan pengelolaan bank sampah di Kampung Lot Kala ini? Dan apa reward untuk masyarakat yang menyetorkan sampah disini?

Jawaban : Ya, untuk Kampung Lot Kala sendiri telah memiliki bank sampah yang pengelolaannya dilakukan oleh Kampung. Intinya masyarakat menyetorkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis untuk ditukarkan dalam bentuk uang, sembako ataupun pulsa telpon seluler selanjutnya sampah-sampah tersebut ada yang bisa dijadikan bahan kerajinan seperti tas dan perlengkapan dapur sedangkan yang tidak dapat diolah kami jual kembali ke pengepul

2. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah? Dalam bentuk apa? Dan bagaimana penggunaannya?

Jawaban :

Ya, ada bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berupa kendaraan pengangkut sampah roda 3 untuk mengangkut sampah organik ke TPS, namun untuk sampah anorganik seperti plastik dan bahan anorganik lainnya yang bernilai ekonomis, masyarakat mengantarnya sendiri ke Bank Sampah Kampung Lot Kala

3. Bagaimana Pengolahan sampah organik dan anorganik di Kampung Lot Kala ini?

Jawaban :

Untuk sampah anorganik umumnya memang bisa kita olah ataupun kita jual kembali ke pengepul, namun untuk sampah yang tidak terolah atau sampah organik kita angkut ke TPS terdekat

4. Bagaimana upaya pengurangan sampah yang dilaksanakan di Kampung Lot kala ini? Dan kira-kira berapa volume sampah yang tertampung di bank sampah?

Jawaban :

Bisa dibilang kita membelinya dari masyarakat. Untuk sampah yang bisa didaur ulang atau kita jual kembali ke pengepul itu sekitar 800 kg hingga 1 ton per minggu

## E. Informan V

Nama	: Azhari
Jabatan	: Kepala UPTD TPA Uwer Tetemi
Tanggal Wawancara	: 5. Maret 2018

1. Untuk Pengolahan sampah Teknik apa yang digunakan pada TPA Uwer Tetemi?

Jawaban :

Iya.. untuk pengelolaan sampah di TPA Uwer Tetemi ini, kita sudah menggunakan teknik *sanitary landfill*

2. Apakah personil atau petugas di TPA ini sudah mencukupi?

Jawaban :

Kalau sumberdaya manusianya untuk alat operator alat berat 2 orang itu belum cukup rasanya, karena mereka masuk tiap hari tanpa ada pergantian atau shift kalau bisa ditambah 2 orang operator lagi sesuai beban kerjanya, juga saya takutnya terkait dengan kesehatan operator ini, jika tanpa istirahat dan terlalu capek ditambah lagi menghirup zat beracun dari sampah-sampah ini

3. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan tapi belum ada di TPA ini?

Jawaban :

Kantor dan bengkel memang belum ada dan kita butuhkan itu sebagai pusat operasional TPA ini, sedangkan untuk kendaraan, kita butuh 1 unit alat berat berupa compactor yang berat untuk memadatkan tanah penimbun sampah agar lebih padat lagi serta 1 unit lagi kendaraan pick up untuk mengantar logistik BBM alat berat disini

4. Adakah kerjasama dengan pihak atau instansi lain terkait pengolahan sampah di TPA ini?

Jawaban :

Untuk penyemprotan lalat disini kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kalau keadaan normal biasanya 3 bulan sekali disemprot, tapi kalau lalatnya terlalu banyak kita dapat meminta penyemprotan lalat sesuai kebutuhan kita di TPA ini sekalian di Kampung-kampung sekitar sini juga

5. Menurut Bapak apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TPA ini?

Jawaban :

Dampaknya untuk saat ini, lalat akan banyak sekali sampai ke pemukiman warga, jika terlalu lama tidak disemprot anti lalat oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan. Dan saya khawatir suatu saat nanti kegiatan di TPA ini dapat mencemari sumber air untuk masyarakat, karena memang letak TPA ini kurang jauh dari pemukiman warga

## F. Informan VI

Nama	: Erwinsyah
Jabatan	: Staf Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun
Tanggal Wawancara	: 13 Maret 2018

1. Bagaimana pendapat Bapak apakah perlu dibuatkan Peraturan Daerah atau qanun untuk pengelolaan sampah terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak?

Jawaban :

Kalau untuk aturan berupa qanun saya tidak terlalu memikirkan. masalah kebijakan atau program itu kan urusan atasan, nanti bisa ditanyakan langsung ke kapid yang lebih tahu tentang kebijakan atau program tersebut, kalau kami staf yang penting kerja sesuai program yang ada sekarang



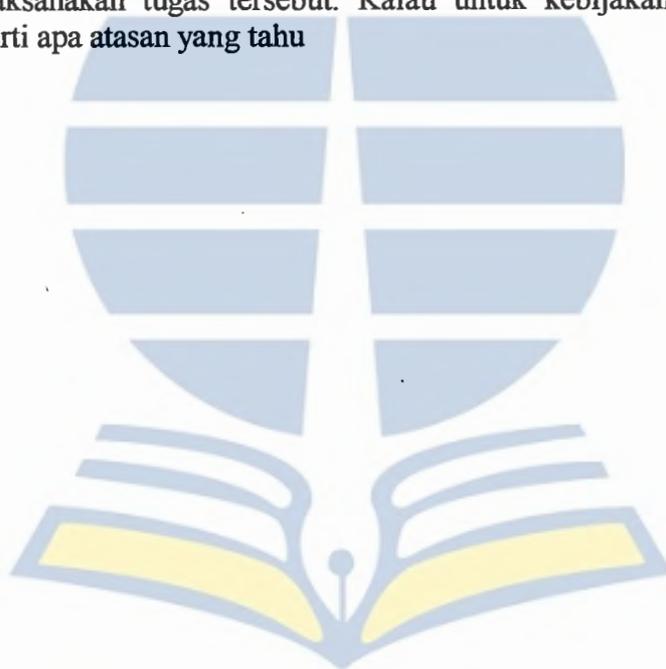
## G. Informan VII

Nama	: Bardansyah
Jabatan	: Petugas Lapangan Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun
Tanggal Wawancara	: 13 Maret 2018

1. Bagaimana pendapat Bapak apakah perlu dibuatkan Peraturan Daerah atau qanun untuk pengelolaan sampah terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak?

Jawaban :

Urusan kebijakan atau program yang tahu atasan, kalau saya tahunya ya apa yang saya kerjakan selama menjadi petugas lapangan seksi pengelolaan sampah. Kita kan hanya diberikan tugas saja dan kita melaksanakan tugas tersebut. Kalau untuk kebijakan atau programnya seperti apa atasan yang tahu



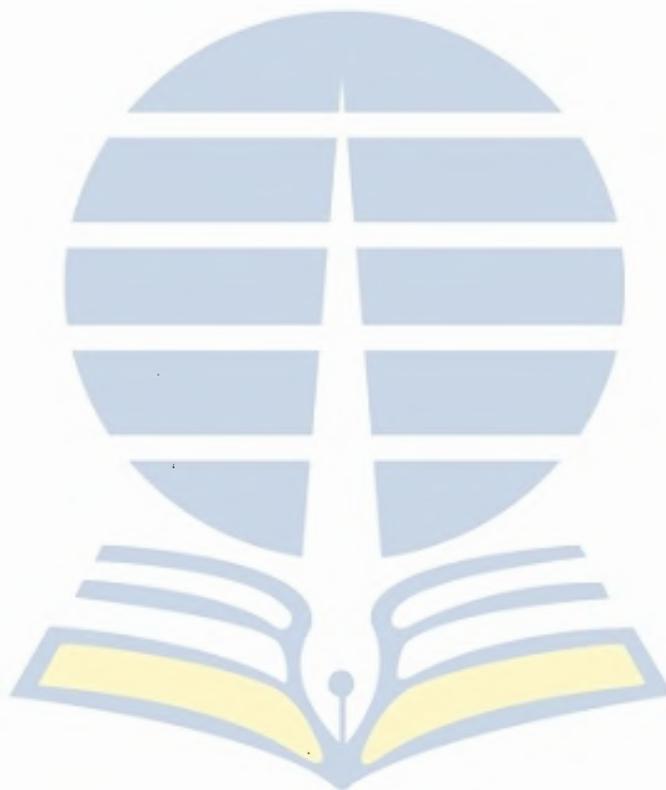
## H. Informan VII

Nama	:	Lukman
Jabatan	:	Sopir Kendaraan pengangkut sampah roda 3
Tanggal Wawancara	:	9. Maret 2018

1. Kapan waktu pengangkutan sampah ke TPS dilakukan?

Jawaban :

Sampah-sampah yang kami kumpulkan ini pak kami angkut langsung ke TPS harus sebelum jam 9 malam, kalau tidak nanti tidak terangkut ke TPA pak



## I. Informan VII

Nama	: Iwan Rahmat
Jabatan	: Sopir Kendaraan Truk Pengangkut Sampah
Tanggal Wawancara	: 13 Maret 2018

1. Bagaimana kepatuhan para pihak termasuk masyarakat untuk membuang sampah ke dalam bak TPS?

Jawaban :

Ya masih ada saja yang membuang sampah tidak tepat ke dalam bak sampah, melainkan disampingnya, terkadang memang bak sampah TPSnya sudah penuh, namun kadang-kadang masih ada juga baknya kosong tapi main buang sembarangan aja

2. Bagaimana jika ada sampah-sampah berat seperti bongkaran bangunan dan material lainnya yang bukan sampah rumah tangga jika dibuang ke TPS?

Jawaban :

Kita sering mendapatkan sampah yang bukan sampah rumah tangga, seperti batu-batuan bongkaran bangunan, kaca, kayu. Harusnya sampah tersebut langsung dibuang ke TPA, tapi karena udah di TPS ini ya terpaksa kita angkat bang



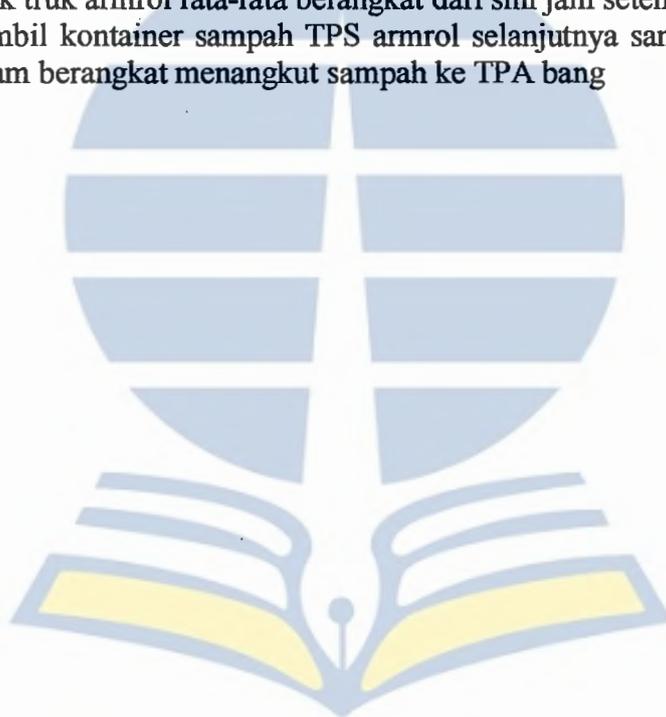
**J. Informan VIII**

<b>Nama</b>	<b>: Suhada</b>
<b>Jabatan</b>	<b>: Penjaga Gudang Transit</b>
<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>: a. Maret 2018</b>

1. Bagaimana jadwal pengangkutan sampah yang masuk dan keluar, dari dan ke lokasi transit ini?

Jawaban :

Saya selama menjadi penjaga disini memperhatikan armada pengangkut sampah yang ngambil sampah di Kota rata-rata di bawah jam 10.00 sudah terisi penuh dan sudah diparkir menunggu jam 09.00 malam, sedangkan untuk truk armrol rata-rata berangkat dari sini jam setengah 8 malam untuk ngambil kontainer sampah TPS armrol selanjutnya sama-sama jam 09.00 malam berangkat menangkut sampah ke TPA bang



## K. Informan IX

Nama	: Ucie Ibrahim
Jabatan	: Masyarakat pengguna jasa layanan kebersihan dengan angkutan roda 3
Tanggal Wawancara	: 8 Maret 2018

1. Bagaimana jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan roda 3 di lokasi ibu ini?

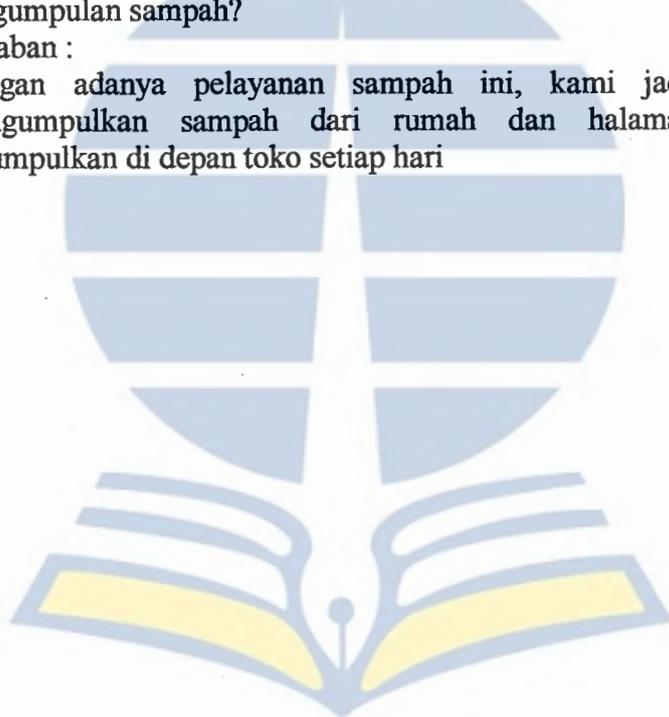
Jawaban :

Pengambilan sampah oleh petugas sampah 3 hari sekali dik, malas kali kita kalau udah 3 hari sampah ini kan bau, maunya kan tiap hari diangkut

2. Apakah ada pengaruh program sampah ini terhadap perilaku Saudari dalam pengumpulan sampah?

Jawaban :

Dengan adanya pelayanan sampah ini, kami jadi terbiasa untuk mengumpulkan sampah dari rumah dan halaman sekitar untuk dikumpulkan di depan toko setiap hari



**L. Informan X**

<b>Nama</b>	: NN
<b>Jabatan</b>	: Salah satu sopir kendaraan pengangkut sampah roda 3 : 3
<b>Tanggal Wawancara</b>	: 10 Maret 2018

1. Bagaimana jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan roda 3 di lokasi ini? Dan apa alasannya?

Jawaban :

Pengambilan sampah oleh petugas sampah makanya sampai 3 hari sekali bang, karena volume sampah disini sedikit, makanya harus 3 hari baru penuh bang bak sampah kereta ini jadi biar hemat BBM bang



## M. Informan XI

Nama	: Yanti
Jabatan	: Masyarakat pengguna jasa layanan kebersihan dengan angkutan truk sampah
Tanggal Wawancara	: 12 Maret 2018

1. Bagaimana cara pengumpulan dan jadwal pengambilan sampah yang dilakukan kendaraan truk sampah di lokasi ibu ini?

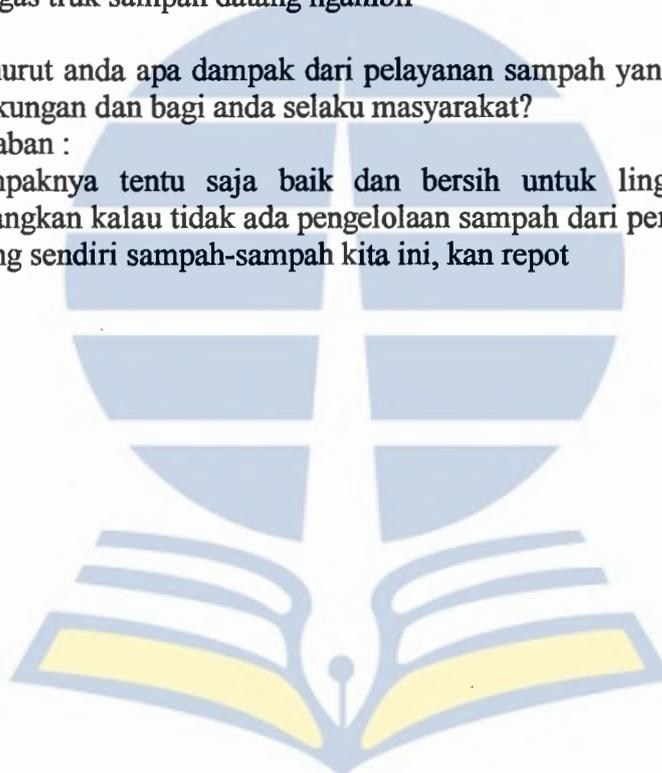
Jawaban :

Kita kumpulkan sampah di tempat sampah atau plastik dik, setiap pagi petugas truk sampah datang ngambil

2. Menurut anda apa dampak dari pelayanan sampah yang ada saat ini, bagi lingkungan dan bagi anda selaku masyarakat?

Jawaban :

Dampaknya tentu saja baik dan bersih untuk lingkungan, bisa kita bayangkan kalau tidak ada pengelolaan sampah dari pemerintah, kita harus buang sendiri sampah-sampah kita ini, kan repot



## N. Informan XII

Nama	: Kamal
Jabatan	: Masyarakat di sekitar lokasi TPS
Tanggal Wawancara	: 12 Maret 2018

1. Bagaimana jadwal dan cara pengangkutan sampah yang dilakukan kendaraan truk sampah dari TPS ini? Apakah terangkut semua?

Jawaban :

Biasanya petugas pengangkut sampah yang pakai truk itu kesininya 1 hari sekali. Ya biasanya malam selepas Isya, tapi pasti setiap harinya ambil sampah kesini bang, namun terkadang ga terangkut semua, kadang-kadang udah penuh kontainernya, kadang-kadang orang buang sampah terlalu malam pada waktu truk kontainer itu sudah berangkat, ya diletak aja disitu

2. Bagaimana keadaan sampah di TPS ini?

Jawab :

Yang namanya sampah sudah pasti bau dik, tapi yang saya inginkan kalau bisa sampah yang ada di kontainer ini tidak tercecer kemana-mana

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan TPS di sini?

Jawab :

Ya itu dik baunya tadi yang tidak enak, apalagi kalau musim hujan baunya lebih menyengat, pemandangan juga tidak enak kalau sampahnya kececeran, maunya kita kan jangan ada disini lah TPSnya tapi mau bagaimana lagi kita semua kan butuh TPS atau paling kurang ditutuplah kontainernya

## O. Informan XIII

Nama	: Irwandi
Jabatan	: Pedagang/masyarakat di sekitar lokasi TPS Pasar
Tanggal Wawancara	: 12 Maret 2018

1. Bagaimana tanggapan anda tentang penempatan TPS di pasar ini? Apakah dampak yang ditimbulkan menurut Saudara?

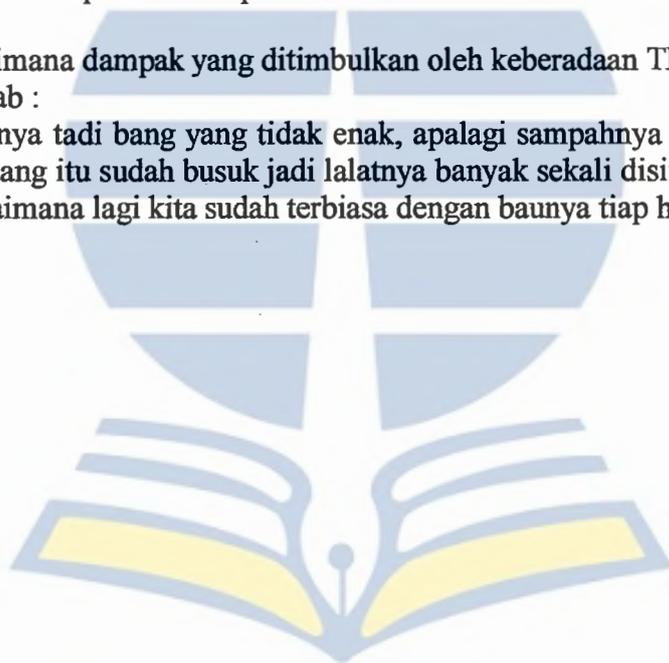
Jawaban :

Kami sudah biasa dengan bau dari kontainer TPS itu. Tapi ya kalau bisa tidak menimbulkan bau. Sekarang ini rasanya tiap hari bau sampahnya menyengat bang, apalagi sampah disini umumnya kan dari pedagang sayur mayur dan ikan kadang-kadang sudah membusuk, tapi walau bagaimanapun kita tetap butuh TPS

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan TPS di sini?

Jawab :

Baunya tadi bang yang tidak enak, apalagi sampahnya ini seringnya yang dibuang itu sudah busuk jadi lalatnya banyak sekali disini bang, tetapi mau bagaimana lagi kita sudah terbiasa dengan baunya tiap hari kita hirup

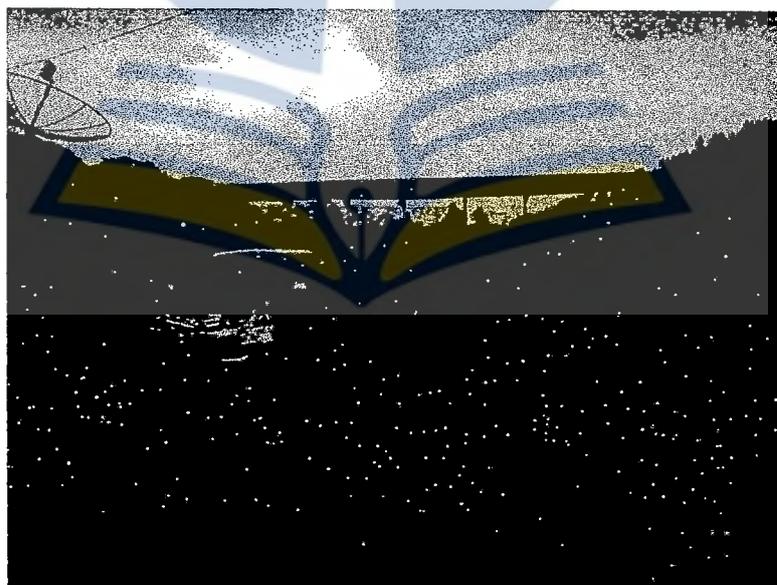


Lampiran. 3

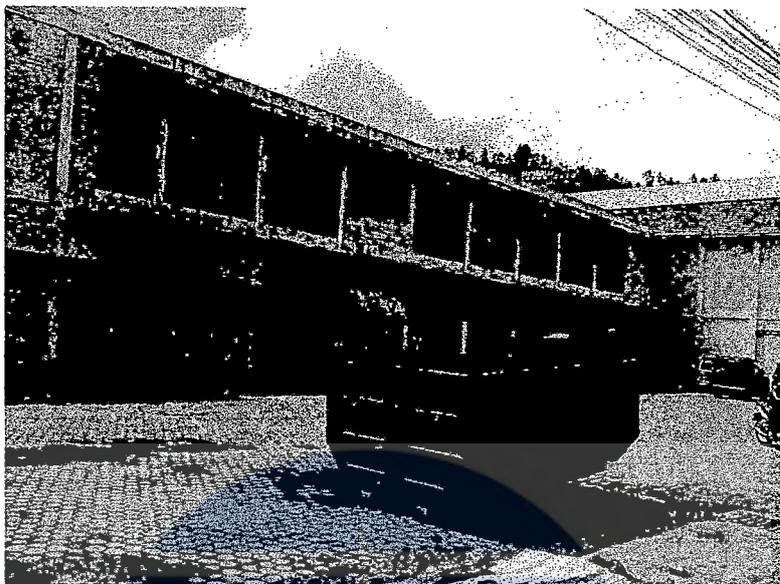
**DOKUMENTASI**



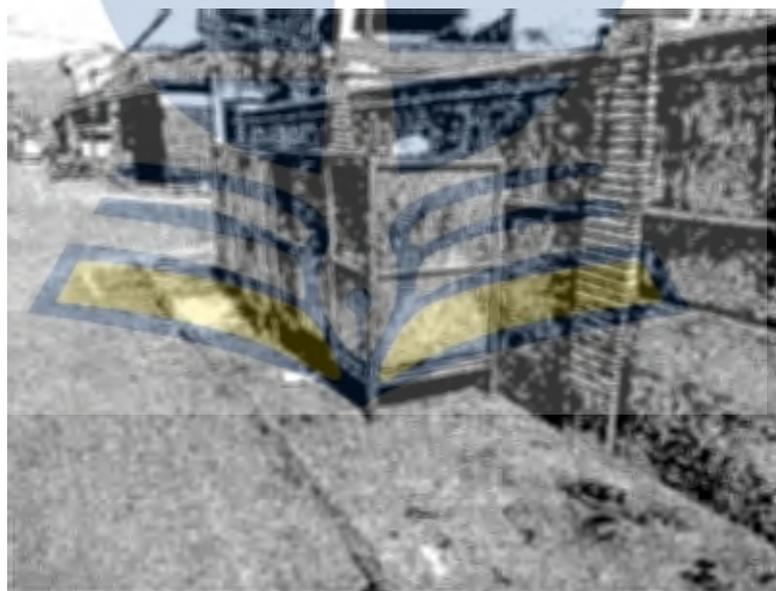
**Gambar 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah  
di Jalan Yos Sudarso Takengon**



**Gambar 2. Gudang Transit Angkutan Sampah  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 3. TPS/Kontainer Sampah Ukuran Besar di Pasar Inpres  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 4. TPS/Kontainer Sampah Ukuran Mini di Jalan Yos Sudarso  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 5. Tong Sampah di Pinggir Jalan  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 6. Tong Sampah berkategori  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 7. Tong Sampah Organik, Anorganik dan B3  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 8. Armada Truk Angkutan Sampah  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 9. Armada Truk *Armroll* Angkutan Sampah  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



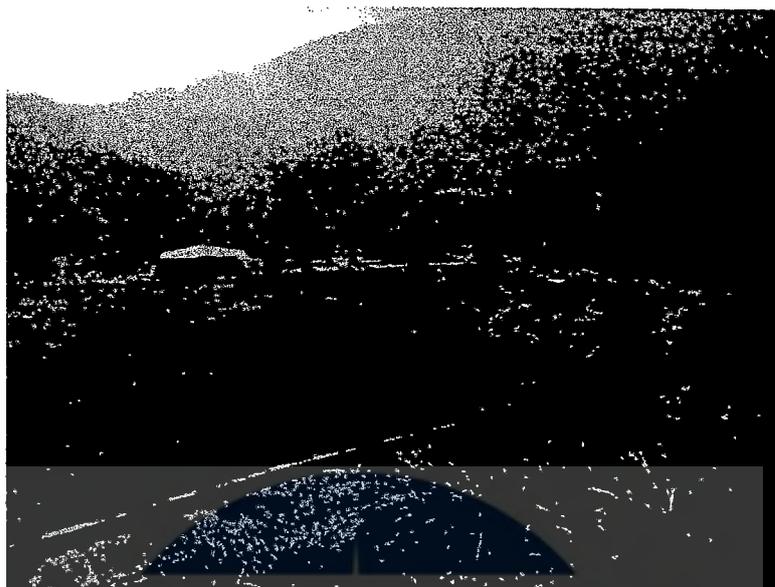
**Gambar 10. Armada Kendaraan Bermesin Roda 3 Angkutan Sampah  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



Gambar 11. Alat Berat *Bulldozer* di TPA Uwer Tetemi  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah



Gambar 12. Alat Berat *Excavator* di TPA Uwer Tetemi  
Milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah



**Gambar 13. Lokasi TPA Uwer Tetemi  
Di Kp. Mulie Jadi Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 14. IPLT di TPA Uwer Tetemi  
Kp. Mulie Jadi Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah**



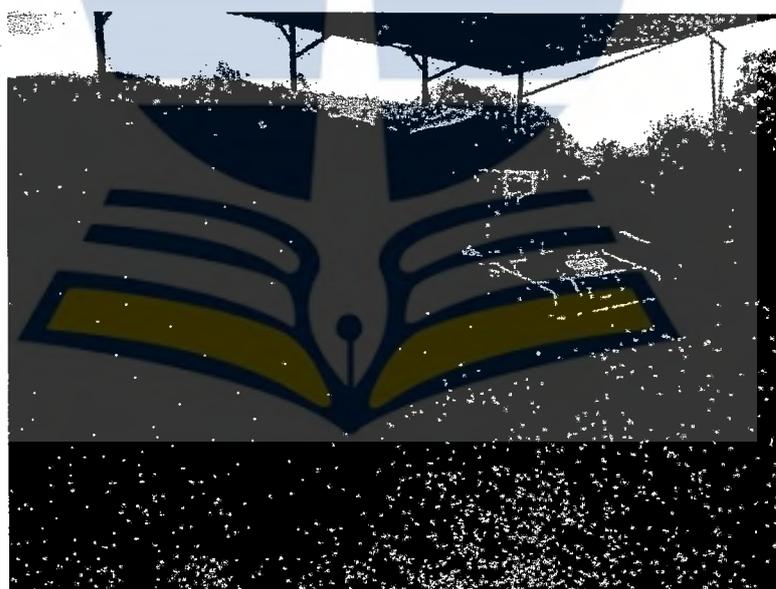
**Gambar 15. Pengambilan Sampah oleh Petugas di Lokasi Pemukiman Warga menggunakan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3**



**Gambar 16. Pengambilan Sampah oleh Petugas di Jalan Protokol menggunakan Truk Angkutan Sampah**



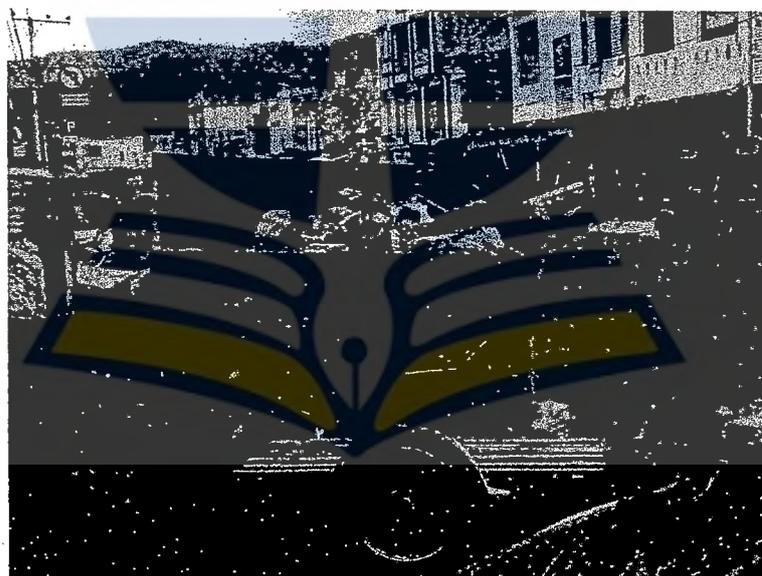
**Gambar 17. Pengambilan Sampah oleh Petugas dari salah satu TPS menggunakan Kendaraan Truk Angkutan Sampah**



**Gambar 18. Truk Angkutan Sampah yang telah berisi muatan Di Gudang Transit DLH Kab. Aceh Tengah**



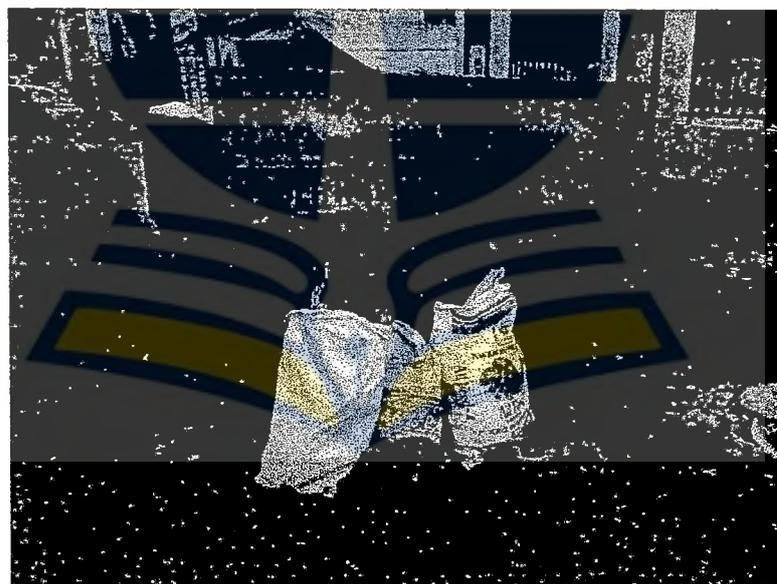
**Gambar 19. TPS dengan muatan penuh  
di sekitar Terminal Bus Lama Jalan Sengeda Takengon**



**Gambar 20. Seorang Pemulung sedang mengais sampah  
Di TPS Pasar Inpres Jalan Sengeda Takengon**



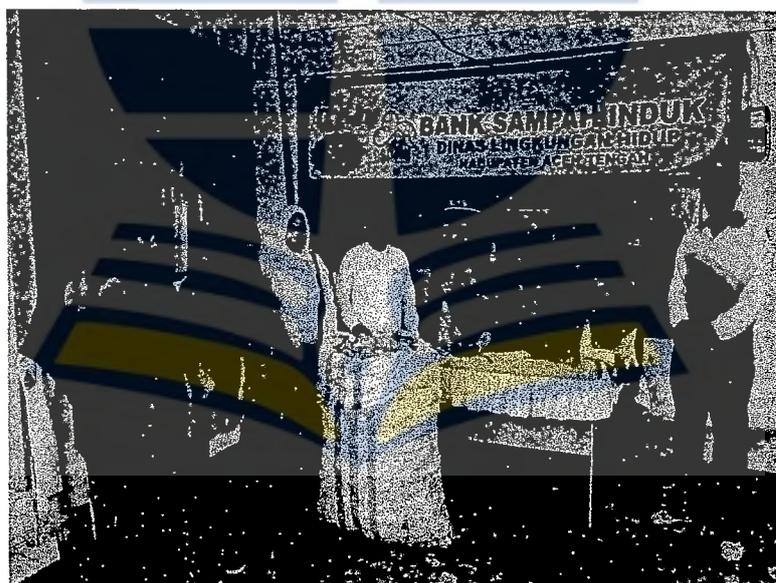
**Gambar 21. Sampah yang tidak terangkut di Lokasi TPS  
sekitar Terminal Bus Lama Jalan Sengeda Takengon**



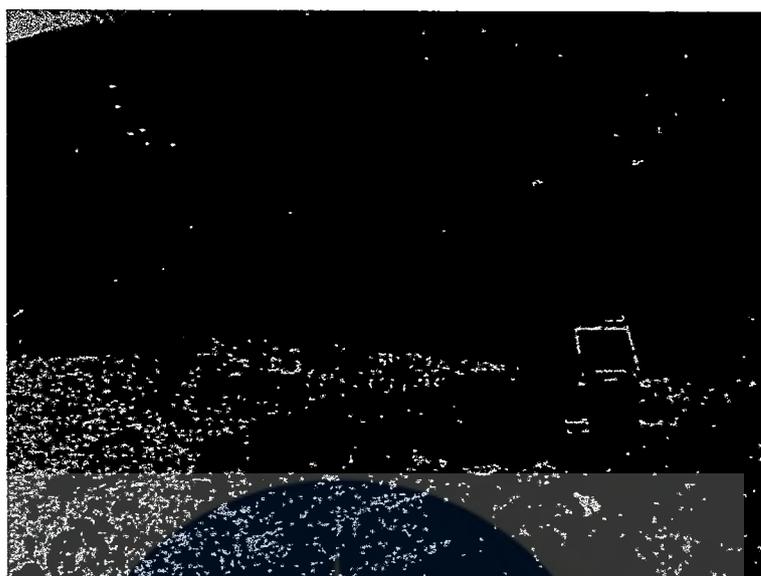
**Gambar 22. Sampah yang diletakkan di luar Kontainer  
Di sekitar salah satu TPS**



Gambar 23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah  
Memberikan arahan kepada Petugas Kebersihan di salah satu Jalan Protokol



Gambar 24. Pembukaan Bank Sampah Induk DLH Kab. Aceh Tengah  
Sumber : lintasgayo.co



Gambar 25. Pengolahan sampah *Sanitary Landfill* menggunakan *Bulldozer*  
Di TPA Uwer Tetemi



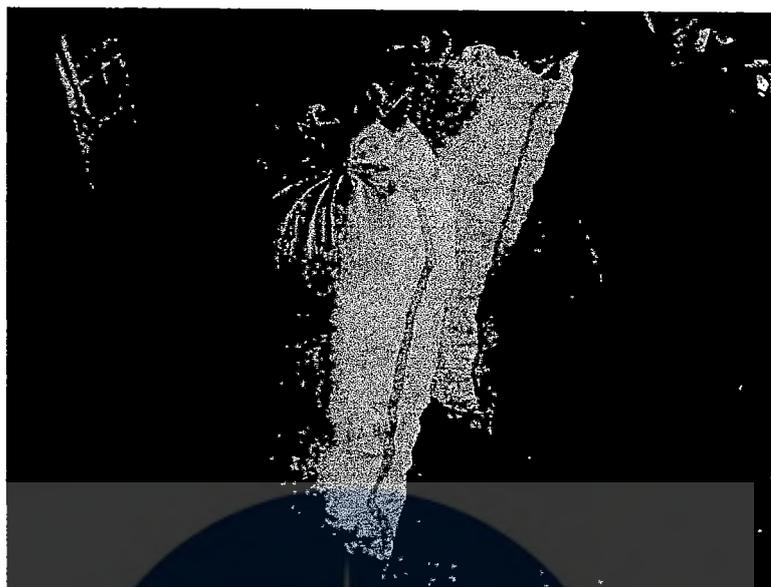
Gambar 26. Pengolahan sampah *Sanitary Landfill* menggunakan *Excavator*  
Di TPA Uwer Tetemi



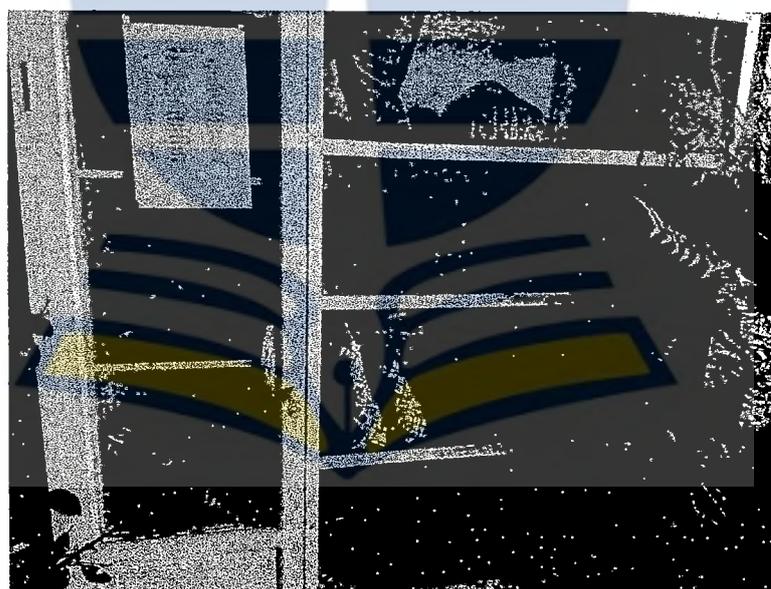
Gambar 27. *Green Office* Pusat Pengelolaan Sampah Di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah



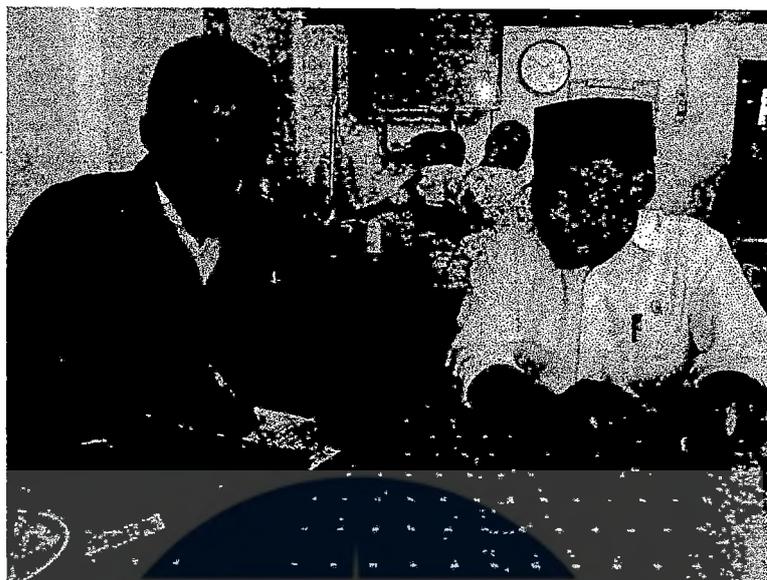
Gambar 28. Bank Sampah di dalam *Green Office* Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah



Gambar 29. Sampah yang terkumpul dari Masyarakat Sampah  
Di Bank Sampah Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah



Gambar 30. Hasil-hasil Kerajinan dari Sampah di Galeri *Green Office*  
Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah



**Gambar 31. Wawancara dengan Bapak Ir. Zikriadi, MM  
Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah**



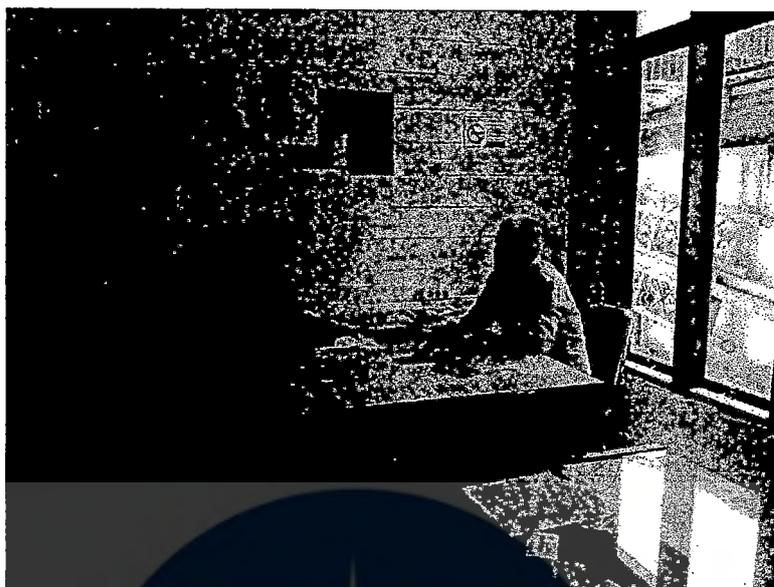
**Gambar 32. Wawancara dengan Bapak Ikhsan, SE Selaku Kepala Bidang Pengelolaan  
Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Tengah**



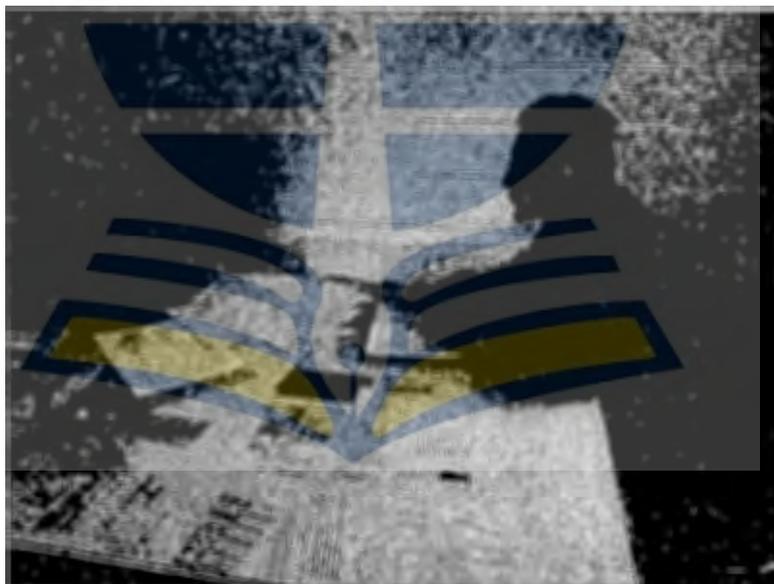
**Gambar 33. Wawancara dengan Bapak Munzir, SE selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 34. Wawancara dengan Bapak Azhari selaku Kepala UPTD TPA Uwer Tetemi DLH Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 35. Wawancara dengan Bapak Erwinsyah selaku Staf Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Kab. Aceh Tengah**



**Gambar 36. Wawancara dengan Sdr. Bardansyah selaku Petugas Lapangan Seksi Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Kab. Aceh Tengah**



Gambar 37. Wawancara dengan Bapak Suhada selaku Penjaga Gudang Transit  
DLH Kab. Aceh Tengah



Gambar 38. Wawancara dengan Sdr. Iwan Rahmat selaku Sopir Truk *Armroll*  
DLH Kab. Aceh Tengah



**Gambar 39. Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Pengguna Jasa Kebersihan di salah satu Jalan Protokol menggunakan Angkutan Truk**



**Gambar 40. Wawancara Ibu Uci Ibrahim selaku Masyarakat Pengguna Jasa Kebersihan menggunakan Angkutan Sampah Kendaraan Roda 3 Bermesin**



**Gambar 41. Wawancara dengan Bapak Kamal selaku Masyarakat yang tinggal di sekitar TPS Terminal Bus Lama Jalan Sengeda Takengon**



**Gambar 42. Wawancara Sdr. Irwandi selaku Masyarakat/Pedagang yang berjualan di sekitar TPS Pasar Inpres Jalan Sengeda Takengon**